



LAPORAN GFS STRATEGIS

Tingkat Wilayah Jawa Barat

Tahun 2023 Preliminary





DAFTAR ISI

i Daftar Isi

ii Dashboard Visualisasi LKPK -TW dan LSKP-TW Tahun 2023 *Preliminary*

1 Flash Report Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah Periode Tahun 2023 *Preliminary*

Gambaran Umum Kondisi Keuangan LKPP-TW, LKPDK-TW, LKSP-TW **1**

Perkembangan Kondisi Keuangan Berdasarkan Analisis Laporan Keuangan **2**

Permasalahan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang berdampak pada Kinerja Keuangan dan Statistik **4**

Resume Pelaksanaan Kegiatan **6**

Kesimpulan dan Rekomendasi **8**

Analisis Peran Pemda di Jawa Barat dalam Pencapaian Target Stunting Tahun 2024 **10**

Lampiran Laporan GFS Strategis tingkat Wilayah Periode Tahun 2023 *Preliminary* **46**

GFS STRATEGIS

TAHUN 2023 PRELIMINARY

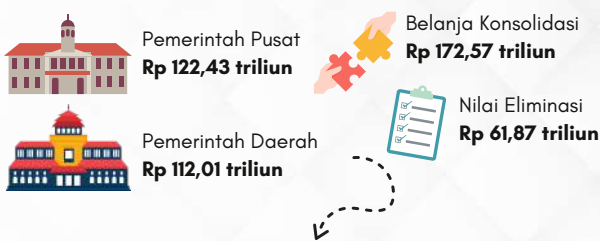
1 LRA Konsolidasian

Mencakup konsolidasi realisasi penerimaan, belanja, dan pembiayaan (basis kas) pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Penerimaan Konsolidasian



Belanja Konsolidasian



Rincian Belanja Konsolidasian



Surplus LRA sebesar Rp 4,28 triliun

Pembiayaan Konsolidasian



SILPA LRA sebesar Rp 11,74 triliun

2 LO Konsolidasian

Mencakup konsolidasi realisasi pendapatan dan beban (basis akrual) pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Pendapatan Konsolidasian



Beban Konsolidasian



Surplus LO sebesar Rp 110,32 triliun

3 Neraca

Mencakup nilai aset, kewajiban, dan ekuitas tingkat konsolidasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah



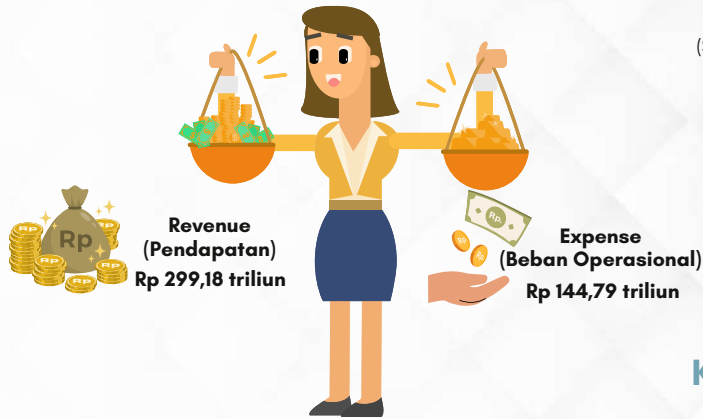
GFS STRATEGIS

TAHUN 2023 PRELIMINARY

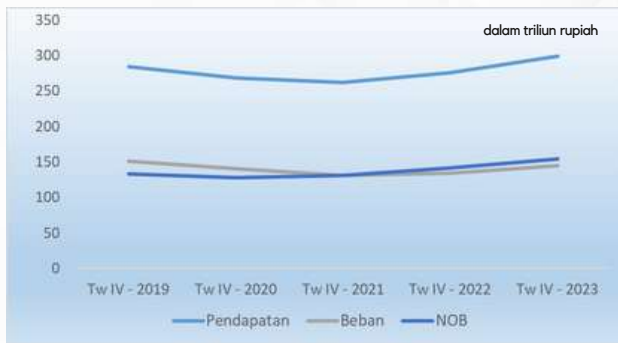
Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah

Laporan Operasional (LO) GFS merupakan ikhtisar transaksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada periode pelaporan tertentu. LO GFS menyajikan detail transaksi pendapatan dan beban, investasi neto pada aset non keuangan, akuisisi neto aset keuangan dan jumlah neto kewajiban yang timbul.

Ringkasan LO



Trend LO LSKP-TW (2018-2023)



Komposisi Beban Operasional GFS

Pemerintah Umum Triwulan Tahun 2023 Preliminary



Pendapatan Pemerintah Umum



Komposisi Expense (Beban Operasional)



Dikurangi eliminasi sebesar Rp 72,67 triliun

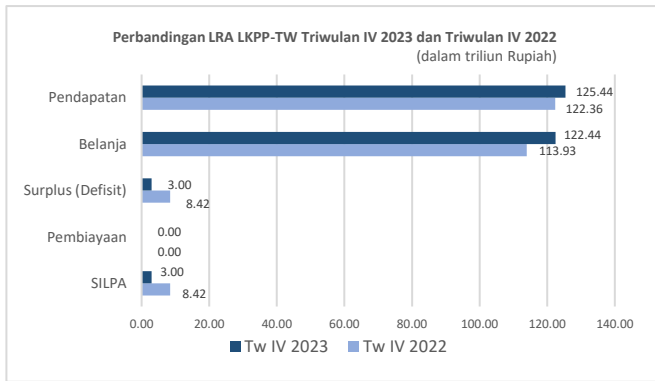


FLASH REPORT

A. GAMBARAN UMUM KONDISI KEUANGAN LKPP-TW, LKPKD-TW, LKPK-TW, DAN LSKP-TW

1. LKPP-TW Provinsi Jawa Barat

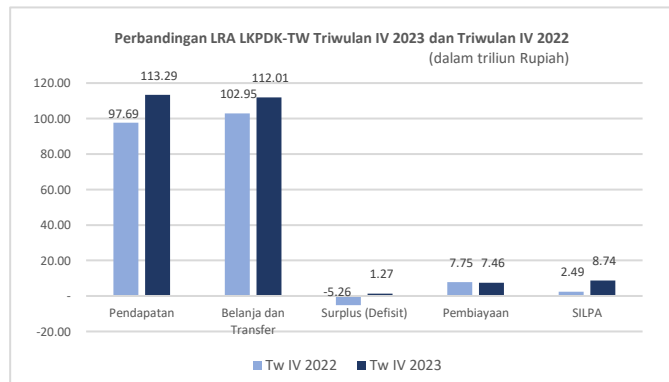
Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2023, pendapatan negara mencapai Rp125,44 triliun. Terdapat pertumbuhan realisasi pendapatan negara sebesar Rp3,08 triliun atau 2,51 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2022. Kenaikan ini disebabkan oleh pertumbuhan signifikan PNBPNP sebesar 19,56 persen. Sementara itu, total Belanja Negara mencapai Rp122,44 triliun, meningkat sebesar Rp8,5 triliun atau tumbuh sebesar 7,46 persen (yoy). Peningkatan belanja terjadi pada semua jenis kecuali belanja pegawai yang mengalami kontraksi



sebesar Rp421,45 miliar (turun 2,26 persen). Secara keseluruhan, kinerja APBN Jabar Tahun 2023 *Preliminary* masih mencatat surplus sebesar Rp2,99 triliun.

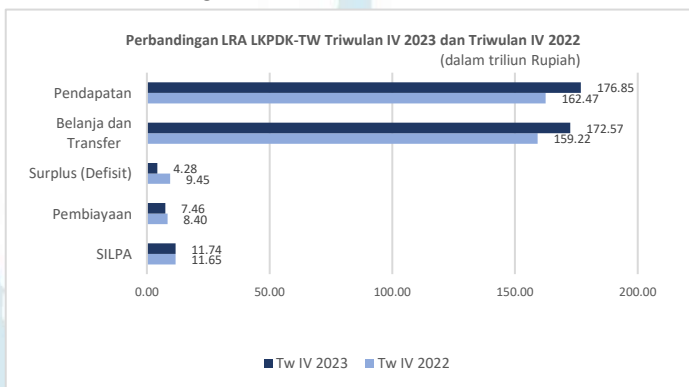
2. LKPKD-TW Provinsi Jawa Barat

Realisasi pendapatan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPKD-TW) Tahun 2023 *Preliminary* mencapai Rp113,29 triliun, tumbuh 15,97 persen atau sebesar Rp15,6 triliun (yoy). Peningkatan tersebut didominasi oleh tumbuhnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 37,33 persen atau Rp13,28 triliun. Sedang dari sisi realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 tercatat sebesar Rp112,01 triliun meningkat sebesar 8,8 persen atau sebesar Rp9,06 triliun (yoy). Nilai realisasi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja sehingga menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp1,27 triliun.



3. LKPK-TW Provinsi Jawa Barat

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) merupakan kondisi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dikonsolidasikan dengan memperhatikan nilai transaksi resipokal maupun skala resipokal.



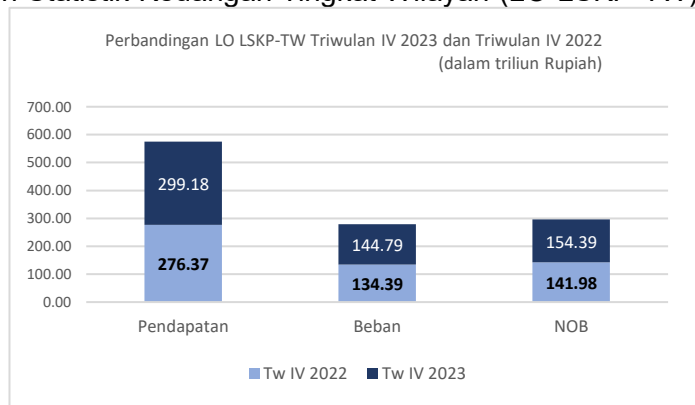
Pada LRA LKPK-TW Tahun 2023 *Preliminary* menunjukkan realisasi Pendapatan Konsolidasian sebesar Rp176,85 triliun, meningkat sebesar Rp14,38 triliun atau sebesar 8,85 persen. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan perpajakan konsolidasi sebesar Rp13,99 triliun atau 9,83



persen (yoy) dan Pendapatan PNBPN sebesar Rp575 miliar atau 2,89 persen (yoy). Sementara dari segi Belanja Daerah tercatat nilai realisasi sebesar Rp172,57 triliun, meningkat sebesar Rp13,35 triliun atau sebesar 8,39 persen (yoy). Meningkatnya realisasi Belanja dialami pada seluruh jenis belanja kecuali belanja subsidi, belanja bansos, dan belanja lain-lain. Pada LKPK-TW Tahun 2023 *Preliminary* mengalami surplus anggaran sebesar Rp4,28 triliun.

4. LSKP-TW Provinsi Jawa Barat

Pos pada Laporan Operasional Laporan Statistik Keuangan Tingkat Wilayah (LO LSKP-TW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 *Preliminary*, Realisasi Pendapatan sebesar Rp299,18 Triliun naik sebesar Rp22,82 triliun atau sebesar 8,26 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sedangkan untuk Beban pada Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah sebesar Rp144,79 triliun, meningkat Rp10,4 triliun atau sebesar 7,74 persen (yoy). Dari nilai pendapatan dan beban di atas, maka dapat diketahui *Net Operating Balance* bernilai positif yakni sebesar Rp154,39 triliun.



B. PERKEMBANGAN KONDISI KEUANGAN BERDASARKAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

1) Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Rasio solvabilitas jangka pendek pada LKPK Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 *Preliminary* yakni sebesar 1.900,5 persen. Perhitungan tersebut berasal dari aset lancar sebesar Rp94,11 triliun dibagi dengan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp4,95 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Konsolidasian di tingkat LKPK memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini dikarenakan tersedianya aset lancar yang hampir 19 kali lebih tinggi dari setiap utang jangka pendek pemerintah yang akan jatuh tempo.

Sedangkan untuk rasio solvabilitas jangka panjang pada LKPK Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 *Preliminary* yakni sebesar 1.309 persen. Perhitungan tersebut berasal dari total Aset Rp934,81 triliun dibagi dengan Kewajiban Jangka Panjang yang keseluruhannya berasal dari pemda sebesar Rp71,41 Triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Konsolidasian di tingkat LKPK memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Hal ini dikarenakan tersedianya aset yang nilainya sebesar 13 kali dari setiap utang jangka panjang pemerintah yang jatuh tempo.

2) Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio solvabilitas jangka pendek pada LKPK Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 *Preliminary* yaitu sebesar 1.956 persen. Perhitungan tersebut diperoleh dari nilai aset lancar sebesar Rp65,7 triliun dibagi dengan nilai kewajiban jangka pendek sebesar Rp3,36 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Konsolidasian di tingkat LKPD memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini dikarenakan tersedianya aset lancar yang 19 kali lebih besar dari setiap utang jangka pendek pemerintah yang jatuh tempo. Selanjutnya, jika dirinci per pemda untuk rasio solvabilitas jangka pendek tertinggi tercatat pada Pemerintah Kabupaten Garut yakni dengan



rasio sebesar 17.410 persen. Sedangkan Rasio Solvabilitas Jangka Pendek terendah tercatat pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan rasio sebesar 331 persen.

Rasio solvabilitas jangka panjang pada LKPKD Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 *Preliminary* yaitu sebesar 9.048 persen. Perhitungan tersebut berasal dari Total Aset sebesar Rp328,92 triliun dibagi dengan kewajiban jangka panjang sebesar Rp3,64 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya kemampuan pemerintah konsolidasian di tingkat LKPD dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Persentase yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa pemerintah konsolidasian di tingkat LKPD memiliki Aset yang bernilai 90 kali dari setiap kewajiban jangka panjangnya. Selanjutnya, jika dirinci per pemda, rasio solvabilitas jangka panjang tertinggi tercatat pada Pemerintah Kota Bekasi yakni dengan rasio solvabilitas jangka panjang sebesar 1.225.928 persen. Adapun rasio solvabilitas jangka panjang terendah tercatat pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yakni dengan rasio sebesar 1.388 persen. Selain analisis rasio solvabilitas diatas, terdapat 5 jenis analisis lainnya yang dilakukan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Kemandirian Daerah	<p>Rasio Kemandirian Daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan yang diperlukan daerah, yaitu dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan LRA.</p> <p>Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 39,38 persen (naik 5,78 poin yoy) dan masuk ke dalam kategori cukup. Artinya masih terdapat kontribusi pihak luar yakni sekitar 60,62 persen dalam mendukung penerimaan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah masih rendah sejalan dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Angka capaian rasio keuangan yang hanya 39,38 persen tersebut menunjukkan kondisi bahwa daerah masih dalam kriteria cukup terkait penilaian keuangan daerah. Selanjutnya jika dirinci per Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tertinggi terdapat pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Rasio Kemandirian Keuangan daerah tercatat sebesar 79,55 persen. Adapun Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terendah tercatat pada Pemerintah Kabupaten Kuningan yakni dengan rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 8,32 persen.</p>
2.	Solvabilitas Anggaran	<p>Solvabilitas anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan untuk mendanai belanja pemerintah selama satu periode anggaran, yaitu dengan membandingkan Total Pendapatan LRA-DAK LRA dibagi dengan Total Belanja-Belanja Modal.</p> <p>Solvabilitas anggaran Jawa Barat secara keseluruhan bernilai positif, yaitu sebesar 0,95 (naik 0,08 poin yoy) atau <1, yang berarti secara rata-rata pemda tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk mendanai belanjanya. Namun demikian terdapat 8 pemda yang bernilai di atas 1. Pemerintah Kabupaten Majalengka memiliki kemampuan tertinggi dalam menghasilkan pendapatan dengan solvabilitas anggaran sebesar 1,14 dan terendah Pemerintah Kota Tasikmalaya 0,77.</p>
3.	Solvabilitas Layanan	<p>Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang</p>



No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
		<p>dibutuhkan dan diinginkan masyarakat, yang diperoleh dengan membandingkan Jumlah Aset dengan Jumlah Penduduk.</p> <p>Solvabilitas layanan Jawa Barat secara total senilai 6.657.437 (turun 744.933 yoy). Kemampuan Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyediakan pelayanan terhadap publik memiliki rasio terendah yaitu 2.312.255, dan tertinggi terdapat pada Pemerintah Kota Bandung dengan rasio sebesar 19.893.504. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai satker tidak memiliki penduduk, hanya sebagai wilayah, sehingga solvabilitas layanan tidak dapat diukur.</p>
4.	Solvabilitas Operasional	<p>Solvabilitas operasional merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama priode anggaran keuangan. Solvabilitas operasional ini dihitung dengan menerapkan basis aktual, yaitu dengan membandingkan Total Pendapatan LO-DAK LO dibagi dengan Beban Operasi LO.</p> <p>Rasio Solvabilitas Operasional Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 1,1 (naik 0,75 poin yoy). Rasio ini menunjukkan kondisi bahwa sekitar 1,1 persen Beban Operasional didanai dari Pendapatan Operasional diluar Dana Alokasi Khusus (DAK). Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa Pemerintah Daerah masih memerlukan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menutupi Beban Operasionalnya. Jika dirinci per Pemerintah Daerah, Rasio Solvabilitas Operasional terbesar tercatat pada Pemerintah Kota Bekasi yakni dengan rasio 3,61. Adapun Rasio Solvabilitas Operasional terendah tercatat pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran yakni dengan rasio 0,19.</p>
5.	Fleksibilitas Keuangan	<p>Fleksibilitas Keuangan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang, yaitu dengan membandingkan Total Pendapatan LO – DAK LO – Pembayaran Pokok Utang - Belanja Operasional LO dibagi dengan Belanja Operasional LO + Pembayaran Pokok Utang.</p> <p>Fleksibilitas Keuangan Jawa Barat secara keseluruhan menunjukkan nilai 0,09 (naik 0,74 poin yoy), yang artinya belum memiliki fleksibilitas dalam menghadapi kondisi peningkatan pendapatan atau utang. Pemerintah Kota Bekasi memiliki nilai fleksibilitas keuangan tertinggi sebesar 2,61 dan terendah yaitu Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebesar minus 0,82.</p>

C. PERMASALAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERPENGARUH PADA KINERJA KEUANGAN DAN STATISTIK

1. Pemerintah Pusat

a. Permasalahan Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Sebagai indikator yang diperuntukkan untuk menilai baik/buruknya pelaksanaan anggaran pada satuan kerja, capaian IKPA menjadi kunci keberhasilan satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran. Meskipun IKPA sudah dimulai sejak tahun 2019, namun masih terdapat beberapa satker di Jabar yang terkendala dalam meraih nilai optimal capaian IKPA. Permasalahan tersebut diantaranya:

- 1) Revisi DIPA



- Kurangnya perencanaan yang matang sehingga masih dibutuhkan penyesuaian anggaran yang termasuk jenis revisi diperhitungkan dalam penilaian IKPA.
 - Kurangnya koordinasi antara satker dengan eselon I sehingga pada saat satker akan melakukan revisi di Kanwil DJPb terkendala oleh pelaksanaan revisi DIPA yang dilakukan oleh eselon I di DJA.
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- Satker mengalami kesulitan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana Halaman III DIPA, karena kegiatan menunggu juknis/SK/ijin pelaksanaan lelang dari kantor pusat masing-masing.
 - Terdapat revisi level pusat secara nasional, menyebabkan satker tidak dapat mengajukan revisi Halaman III DIPA.
- 3) Belanja Kontraktual
- Kurangnya koordinasi internal satker sehingga terjadi keterlambatan dalam penyampaian data kontrak.
 - Adanya data kontrak yang sudah habis masa kontraknya tetapi satker tidak monitoring, dan tidak melakukan perpanjangan masa kontrak atau adendum kontrak
- 4) Capaian Output
- Petugas penginput data kurang melakukan koordinasi dengan PPK dan hanya melihat progress realisasi anggaran serta tidak memperhatikan tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai capaian kinerja kegiatan.
 - Penyerapan anggaran yang rendah berdampak pada capaian output terutama yang terkait dengan proyek-proyek fisik yang memang masih dalam tahap proses lelang.

b. Permasalahan Penyaluran Belanja

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambat dalam eksekusi belanja oleh satker lingkup Jabar pada tahun 2023, diantaranya

- 1) Kebijakan *Automatic Adjustment*. adanya *Automatic Adjustment* ini membuat kegiatan yang ada mengalami penyesuaian untuk belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran yang terkena *Automatic Adjustment* terkadang baru di buka di akhir tahun anggaran sehingga berdampak waktu eksekusi kegiatan yang sangat singkat dan risiko anggaran tidak dapat terserap secara optimal.
- 2) Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa. Adanya kegiatan paket pekerjaan kontruksi yang mengalami gagal proses lelang. Selain itu masih terbatasnya penyedia, untuk barang dengan spesifikasi tertentu masih dilakukan impor, karena produk dalam negeri spesifikasinya tidak sesuai harapan.

c. Permasalahan Rekonsiliasi Data Keuangan

- 1) Penerapan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023. Pemberlakuan Perdirjen tersebut baru diterapkan untuk periode rekonsiliasi bulan September 2023. Dimana saat itu, penyelesaian to do list dan tutup buku periode menjadi persyaratan penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). Beberapa satker belum memahami seutuhnya menjadikan mereka terlambat terbit SHR dan mendapatkan SP2S.
- 2) Aplikasi SAKTI dan MonSAKTI yang sering *troubleshoot*. Seringkali kedua aplikasi tersebut mengalami *error* pada saat batas waktu rekonsiliasi.
- 3) Pembatasan waktu OLAP modul Pelaporan. Pada bulan Desember 2023, aplikasi SAKTI mengalami *overload* sehingga kantor pusat merubah jadwal OLAP modul pelaporan yang sebelumnya 2 kali per hari menjadi 1 kali per hari. Kebijakan tersebut

tidak diiringi dengan perpanjangan batas waktu rekonsiliasi November 2023, sehingga terdapat beberapa satker yang belum terbit SHR hingga batas waktu rekonsiliasi.

2. Pemerintah Daerah

Pendapatan Transfer masih menjadi faktor dominan dalam pendanaan Pemda di Jawa Barat dengan kontribusi sebesar 60,62 persen baik dari TKD maupun dana transfer antar daerah. Sementara PAD memberikan kontribusi 39,38 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi 0,24 persen. salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan antara lain dengan mengoptimalkan penerimaan dari pemanfaatan aset dan barang milik daerah serta pengoptimalan kinerja BUMD. Selain itu pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan upaya pelayanan Samsat online dan Samsat mobile. Melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan serta stakeholder untuk pengelolaan data wajib pajak dan sistem informasi pajak yang lebih baik. Dan terus meningkatkan profesionalisme pengelola pajak dengan peningkatan kompetensi standarisasi pelayanan minimal.

Realisasi (Pendapatan Asli Daerah) PAD harus terus ditingkatkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi dan meningkatkan kemandirian fiskal di daerahnya. Dari keempat komponen PAD, Pajak Daerah menjadi komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD. Kontribusi dari PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) 22,68 persen dari total pendapatan pajak daerah. Optimalisasi penerimaan PKB dilakukan dengan meningkatkan layanan daring melalui Samsat Mobile Jawa Barat (SAMBARA). Dengan adanya pembayaran pajak berbasis digitalisasi layanan yang mempermudah masyarakat membayar pajak akan meningkatkan efisiensi dan meningkatkan pendapatan di Jawa Barat. Disisi lain, keseluruhan rasio kemandirian Pemda di Jawa Barat diperoleh hasil 49,56 persen atau termasuk Rendah dalam kategori kemampuan keuangan. Namun, apabila dilihat per pemda, ada beberapa pemda yang memiliki kemandirian yang tinggi seperti Provinsi Jawa Barat, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Depok.

D. RESUME PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat pada periode Triwulan IV Tahun 2023, antara lain:

1. Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2022 (Satuan Kerja UAPPA-W dan BLU)

Kegiatan tersebut diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 bertempat di Aula Soekarno Gedung Dwi Warna Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Dengan diadakannya kegiatan evaluasi atas laporan keuangan dan tidak lanjut LHP BPK atas LKPP Tahun 2022 diharapkan para peserta mendapatkan pandangan dan pemahaman yang lebih baik atas peraturan Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023, tindak lanjut atas diterbitkannya PMK 109 Tahun 2023





tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran khususnya terkait RPATA, dan mitigasi risiko atas temuan BPK pada LKPP tahun 2022 untuk dipertahankannya opini WTP pada tahun 2023.

2. Sosialisasi PSAP 16 Konsesi Jasa-Pemberi Jasa dan Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 21 November 2023. Kegiatan tersebut



bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap PSAP Nomor 16 tentang Konsesi Jasa-Pemberi jasa dan pemaparan hasil kajian dari Direktorat Akuntansi Pelaporan Keuangan dengan judul Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Upaya meningkatkan tingkat pengungkapan LKPD dapat dilakukan dengan memprioritaskan peningkatan pengungkapan terhadap PSAP 8 yang memiliki tingkat pengungkapan di bawah 50%;

meningkatkan implementasi PSAP 5, PSAP 6, PSAP 7, dan PSAP 9; dan mempertahankan capaian tingkat pengungkapan PSAP 1, PSAP 4, dan PSAP 10. Hasil dari studi yang dilakukan oleh Dit. APK mengungkapkan bahwa tingkat pengungkapan LKPD tahun 2021 adalah sebesar 79,68%. Hasil ini meningkat jika dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis, di mana tingkat pengungkapan LKPD sebesar 36,2%.

3. Publikasi Laporan GFS Strategis Triwulan III Tahun 2023 dilakukan melalui:

- Dokumentasi yang diunggah pada akun Instagram @djpbjabar pada tanggal 14 November 2023.
- Artikel yang diunggah pada situs Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Barat <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar>.





E. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil analisis pada Laporan GFS Strategis Tingkah Wilayah Tahun 2023 *Preliminary* dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kinerja realisasi Pendapatan tingkat Jawa Barat baik pada LKPK-TW, LKPP-TW, dan LKPKD-TW Tahun 2023 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, masing-masing tumbuh sebesar 8,85 persen, 2,51 persen, dan 15,97 persen (*yoy*). Pertumbuhan yang demikian cukup signifikan disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan PNBP pada LKPP-TW yang tumbuh 19,56 persen (*yoy*). Selain itu juga, Pendapatan Asli Daerah pada LKPKD-TW tumbuh signifikan sebesar 37,33 persen (*yoy*). Hal demikian menyebabkan pada LKPK-TW pendapatan perpajakan konsolidasian tumbuh 9,83 persen dan pendapatan penerimaan bukan pajak konsolidasian tumbuh 2,89 persen (*yoy*).
2. Dari segi Belanja Pemerintah baik pada tingkat LKPK-TW, LKPP-TW, dan LKPKD-TW Tahun 2023 tumbuh namun tetap terkendali (berkisar di bawah 10 persen). Belanja pada LKPK-TW tumbuh sebesar 8,39 persen (*yoy*) didorong utamanya oleh meningkatnya belanja barang dan jasa sebesar Rp7,65 triliun atau naik 15,56 persen (*yoy*). Belanja pada LKPP-TW juga tumbuh sebesar 7,46 persen (*yoy*) didorong oleh meningkatnya belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Sedangkan Belanja pada LKPKD-TW tumbuh 8,8 persen (*yoy*) didorong dari kenaikan belanja operasi sebesar 7,65 persen (*yoy*).
3. Dalam analisis rasio solvabilitas jangka pendek dan jangka panjang baik tingkat LKPK-TW maupun LKPKD-TW, menunjukkan bahwa Jawa Barat masih dalam keadaan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Ini disebabkan karena ketersediaan aset yang nilainya melebihi dari nilai kewajiban tersebut.

Saran dan Rekomendasi

1. Proses penyusunan LKPK-TW dan LSKP-TW masih bersifat manual dengan menggunakan kertas kerja yang telah disediakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Tentunya hal tersebut masih dimungkinkan terjadi *human error* yang tinggi. Seharusnya hal tersebut dapat diolah secara otomatis melalui sistem yang telah digunakan yaitu SIKRI, karena sumber data yang digunakan dalam penyusunan kertas kerja juga berasal dari SIKRI.
2. Terdapat level pemerintahan yang laporan keuangannya belum masuk ke dalam konsolidasi laporan keuangan yakni pemerintahan desa. Kedepannya, perlu disusun *design* aplikatif agar laporan keuangan pemerintahan desa dapat masuk ke laporan keuangan pemerintah konsolidasian sehingga lebih memberikan gambaran utuh terkait konsolidasi laporan keuangan pemerintah dalam suatu wilayah.
3. Perlu dikaji kembali terkait dengan analisis yang disusun dalam penyusunan Laporan GFS seperti analisis rasio solvabilitas, analisis rasio keuangan, dan analisis indikator fiskal pada statistik keuangan pemerintah. Selama ini analisis itu hanya dibuat namun intepretasinya belum optimal.
4. Jika dilihat pada Laporan Operasional LKPK-TW terdapat nilai beban penyusutan dan amortisasi yang seharusnya dapat di *mapping* ke dalam Laporan Operasional LSKP-TW pada akun GFS *consumption of fixed capital*. Namun, karena proses *mapping* pada LSKP-TW masih berbasis LRA, menyebabkan akun *consumption of fixed capital* bernilai nihil. Kedepannya, proses *mapping* GFS dapat dilakukan berdasarkan basis LRA dan LO.



5. Dengan implementasi SIPD pada seluruh Pemda, seringkali Kanwil DJPb juga mendapat pertanyaan seputar SIPD. Diperlukan pelatihan SIPD bagi pegawai Kanwil DJPb untuk dapat memahami proses bisnis yang ada pada SIPD.



ANALISIS TEMATIK

Peran Pemda di Jawa Barat dalam Mencapai Target *Stunting* Tahun 2024

A. Pendahuluan

Visi Indonesia Maju pada tahun 2045 memiliki target Indonesia menjadi salah satu negara maju dengan pendapatan dan kesejahteraan rakyatnya yang tinggi. Salah satu prasyarat untuk tercapainya target tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang memiliki inovasi dan produktivitas yang tinggi. Prasyarat tersebut sulit terpenuhi bila masih banyak anak balita (bayi di bawah lima tahun) yang mengalami *stunting* di Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018) menyebutkan bahwa berbagai kasus *stunting* yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu permasalahan utama terkait gizi yang sedang dihadapi pemerintah dan masyarakat. *Stunting* didefinisikan sebagai kekurangan gizi secara kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar pada usianya.

Dengan mempertimbangkan urgensi penanganan masalah ini, pemerintah tetap menegaskan bahwa upaya pencegahan *stunting* tetap menjadi prioritas meskipun sempat dihadapi pada situasi pandemi Covid-19 (Setwapres, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Aryastami (2017) menunjukkan dampak serius yang dialami oleh individu yang mengalami *stunting*, mulai dari dampak jangka pendek hingga jangka panjang yang terkait dengan penurunan kualitas sumber daya manusia dan masalah kesehatan degeneratif di masa dewasa. Selain itu, *stunting* dan masalah gizi lainnya diyakini berkontribusi terhadap

hilangnya 2-3% dari produk domestik bruto (PDB) setiap tahunnya (World Bank, 2014).

A.1. *Stunting* di Indonesia

Permasalahan *stunting* ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di berbagai negara. *World Health Organization* (WHO) mengestimasi prevalensi (jumlah penderita) *stunting* di seluruh dunia sebesar 22 persen, atau sebanyak 149,2 juta jiwa pada tahun 2020. Berdasarkan data *Asian Development Bank* (ADB) pada tahun 2020, persentase *Prevalence of Stunting Among Children Under 5 Years of Age* di Indonesia adalah 31,8 persen, dan menjadi salah satu tertinggi di kawasan ASEAN. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibanding rata-rata di ASEAN sebesar 27,41 persen. Selanjutnya pada tahun 2022, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, angka *stunting* Indonesia dapat turun menjadi 21,6 persen.

Dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, Pemerintah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Strategi nasional tersebut memiliki target jangka panjang, yaitu tercapainya target tujuan pembangunan berkelanjutan, atau *sustainable development goals* (SDGs), pada tahun 2030. Adapun target nasional prevalensi *stunting* pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen). Adapun Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk

1. Menurunkan prevalensi *stunting*;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. Memperbaiki pola asuh;

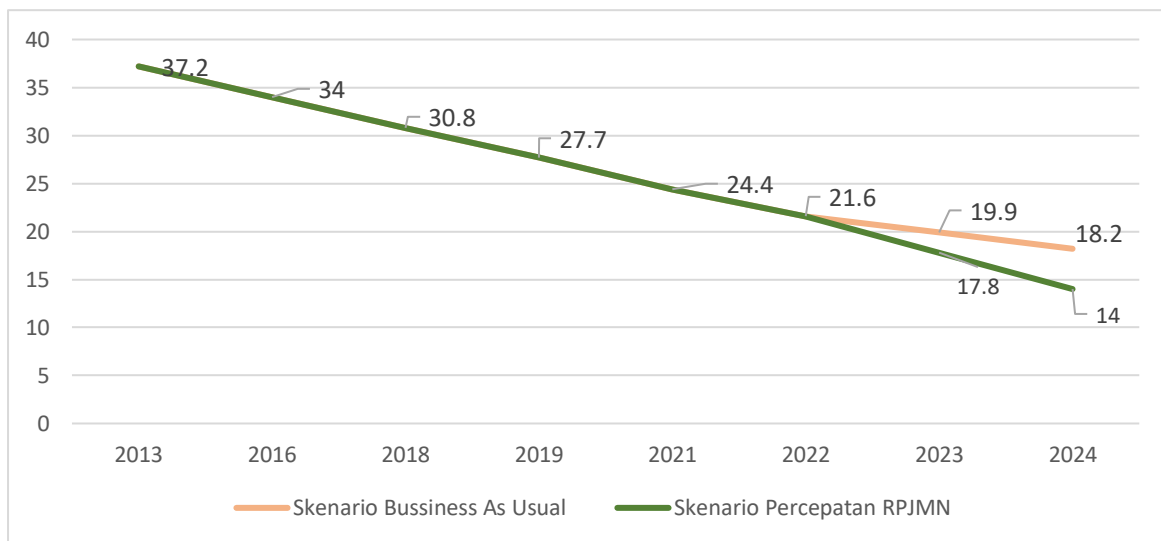


5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
6. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di K/L, Pemda provinsi (Pemprov), Pemda kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot), dan Pemdes;

Target SDGs pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang meliputi:

1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (Pemda) provinsi, Pemda kabupaten/kota, dan pemerintah Desa (Pemdes);
4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Grafik 1.1. Tren dan Target Penurunan *Stunting* di Indonesia



Sumber: Hasil Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI

Grafik 1.1. menjelaskan perkembangan prevalensi *stunting* sejak tahun 2013 hingga perkiraan/target prevalensi *stunting* pada tahun 2023 dan 2024. Diketahui bahwa rata-rata penurunan per tahun dari tahun 2013 hingga 2022 adalah 1,7%. Sehingga jika menggunakan *skenario business as usual* maka angka *stunting* tahun 2024 hanya berada di angka 18,2%. Untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024 sesuai RPJMN, maka pada tahun 2023 dan 2024 Pemerintah harus berhasil menurunkan angka prevalensi *stunting* minimal sebesar 3,8 persen setiap tahunnya. Tentunya, ini menjadi suatu tantangan yang kompleks perlu melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat,

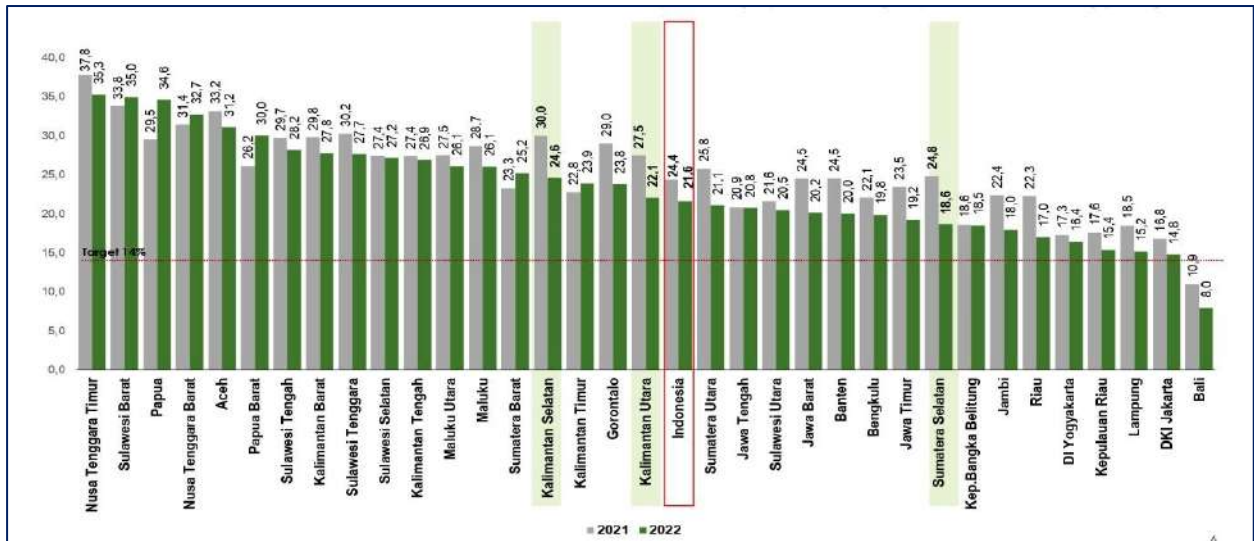
pemerintah daerah, masyarakat, hingga sektor swasta.

A.2. *Stunting* di Jawa Barat

Sebagai provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia dengan populasi yang mencapai hampir 50 juta jiwa, prevalensi *stunting* di Jawa Barat memiliki kontribusi tertinggi pada capaian prevalensi *stunting* secara nasional. Dengan kata lain, tinggi atau rendahnya prevalensi *stunting* akan berkontribusi pada tinggi atau rendahnya prevalensi *stunting* secara nasional baik dari jumlah jiwa maupun persentase *stunting*.



Grafik 1.2. Angka Prevalensi *Stunting* Per Provinsi



Sumber: SSGI tahun 2022

Berdasarkan Grafik 1.2., pada tahun 2021, Provinsi Jawa Barat memiliki nilai prevalensi *stunting* sebesar 24,5 persen, dan angka ini berada di atas angka nasional yang sebesar 24,4 persen. Namun di tahun 2022, posisi Jawa Barat membaik, dan menduduki urutan ke 13 (dari nilai prevalensi terendah) dengan angka prevalensi sebesar 20,2 persen yang berada di bawah angka nasional yakni sebesar 21,6 persen. Angka ini menurun sebesar 4,3 persen dibandingkan tahun 2021, sehingga dapat diasumsikan program prioritas pemerintah dalam percepatan penurunan *stunting* melalui kebijakan dan penganggaran (APBN dan APBD) memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan angka prevalensi *stunting* di Jawa Barat. Jika angka penurunan tersebut konstan pada dua tahun berikutnya maka target 14 persen di tahun 2024 kemungkinan besar dapat tercapai.

Kendati demikian, Pemda di Jawa Barat harus melakukan upaya yang lebih kuratif dalam mencapai target *stunting* 2024. Baik melalui penganggaran dalam APBD bagi program *stunting* maupun inovasi/kegiatan dalam menurunkan prevalensi *stunting*.

Adanya alokasi dana dari pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten, pemerintah kota, maupun pemerintah provinsi di Jawa Barat merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan angka prevalensi *stunting* di Jawa Barat. Sebagian besar kab/kota memiliki anggaran kesehatan yang tidak meningkat cukup besar dari tahun sebelumnya. Sementara itu, kondisi penurunan prevalensi *stunting* Jawa Barat saat ini juga belum mencapai target sebesar 14 persen sesuai Perpres 72 Tahun 2021. Dengan demikian, rumusan masalah dalam kajian analisis ini adalah:

- 1) Bagaimana Kebijakan Pemda di Jawa Barat dalam Penanganan *Stunting*?
- 2) Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi Pemda dalam menurunkan angka Prevalensi *Stunting*?
- 3) Apakah Belanja Penanganan *Stunting* berkorelasi dengan Prevalensi *Stunting*?
- 4) Apakah Pemda di Jawa Barat mampu mencapai target *stunting* pada tahun 2024?

Analisis ini disusun dalam rangka kewajiban penyampaian Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Preliminary.



B. Landasan Teori

Urgensi Penanganan *Stunting*

Menurut WHO (2015), *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Selanjutnya menurut WHO (2020) *stunting* adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang/kronis yang terjadi dalam 1000 HPK.

Stunting memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi kesehatan anak-anak. Pada jangka pendek dapat menurunkan kemampuan kognitif, motorik, dan verbal, peningkatan morbiditas bahkan mortalitas akibat infeksi, meningkatnya risiko kematian perinatal dan neonatal, meningkatkan risiko penyakit kronis pada masa dewasa, dan perkembangan anak yang buruk (Stewart et al., 2013; Wali, Agho and Renzaho, 2019). Langkah yang strategis dalam penanggulangan *stunting* perlu dilakukan, salah satu yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait menurunkan faktor risiko diatas adalah intervensi gizi berupa langkah intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik (Joint Child Malnutrition Estimates, 2018).

Pemerintah Indonesia telah melakukan intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menangani penyebab langsung *stunting* berupa asupan nutrisi dan adanya infeksi, serta intervensi gizi sensitif yang bertujuan untuk mengatasi penyebab tidak langsung seperti ketahanan pangan, akses pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, serta pengasuhan orang tua (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2018 ; Widiyanto et al, 2019).

Secara makro masalah gizi merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, dan ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa (Widiastuti, 2019). Dalam sudut pandang ekonomi, masalah juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan. Hasil dari penelitian Sebastian Mary pada tahun 2018 menyatakan bahwa *stunting* dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan turunnya GDP (*Gross Domestic Products*) (Rizki, 2019). Potensi kerugian secara nasional pada balita *stunting* sekitar Rp3.057 miliar hingga Rp13.758 miliar atau 0,04-0,16% dari total PDB Indonesia. Potensi kerugian ekonomi karena *stunting* pada balita di Indonesia mencapai Rp1,7 juta/orang/tahun atau Rp71 juta/orang selama 49 tahun (usia produktif 15-64 tahun) berdasarkan BPS Tahun 2014 (Renyonet, 2016).

Peran Belanja Daerah

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, menjelaskan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk program penurunan *stunting* sebagai bentuk sinergi Pemda dengan pemerintah pusat dalam upaya mengatasi permasalahan nasional dan sebagai tindak lanjut dari Perpres 7 Tahun 2021.

Peran belanja daerah dalam penurunan *stunting* sangat penting karena belanja daerah memungkinkan Pemda untuk mengalokasikan sumber daya secara langsung ke program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat, termasuk program-program penanggulangan *stunting*. Dana yang dialokasikan dapat digunakan untuk



berbagai kegiatan, seperti penyediaan makanan bergizi tambahan, program pendidikan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta kampanye penyuluhan tentang pentingnya gizi yang baik selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak. Dengan memprioritaskan belanja daerah pada program-program ini, Pemda dapat secara langsung mempengaruhi kondisi gizi anak-anak di wilayahnya dan berperan aktif dalam upaya penurunan *stunting*. (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2019)

Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu diharapkan dapat memberikan gambaran dan model bagi analisis ini. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan analisis yang dilakukan:

- 1) Heru dan Iyas (2020) melakukan penelitian “Peran Belanja Negara dalam Program Penurunan *Stunting*” dengan lokus penelitian di Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa Belanja Negara melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang digunakan untuk penurunan *stunting* melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Belanja DAK Fisik Penugasan untuk penurunan *stunting* diperuntukkan untuk dana pengadaan makanan tambahan, dan pendistribusian dan manajemen pelaksanaan penyediaan makanan tambahan.
- 2) Lia (2022) dalam analisisnya yang berjudul “Strategi Kebijakan Penanganan *Stunting* Provinsi Jawa Barat di Masa Pandemi Covid 19 (Analisis Implementasi dan Solusi)”, menyebutkan Hasil analisis terhadap faktor-faktor menunjukkan bahwa strategi implementasi kebijakan penurunan *stunting* sudah dilaksanakan dengan optimal oleh Pemerintah Provinsi berkolaborasi dengan berbagai pihak. Keseriusan Pemda di Provinsi

Jawa Barat dalam penanganan *stunting* terlihat dari adanya berbagai program *stunting* yang dimasukkan di dalam anggaran kegiatan *stunting* di beberapa perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat.

C. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada gabungan kualitatif dan kuantitatif (*Mixed method design*). *Mixed method design* adalah suatu prosedur mengumpulkan data, menganalisis, dan “*mixing*” kedua metode kualitatif dan kuantitatif dalam suatu analisis tunggal untuk memahami masalah. Metode kualitatif dengan pemikiran Creswell yang menyebutkan bahwa “*we conduct qualitative research because a problem or issue needs to be explored*” (Creswell, 2013) dengan metode analisis deskriptif untuk mengungkapkan dan membahas permasalahan yang dijadikan obyek analisis. Obyek dalam analisis ini adalah belanja APBD dan kebijakan pemda dalam upaya penurunan *stunting* di Jawa Barat. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan/keterkaitan antara belanja APBD untuk penanganan *stunting* terhadap angka prevalensi *stunting* di Jawa Barat.

Data yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Pemda yakni pagu dan realisasi APBD dalam penanganan *stunting* di daerah Jawa Barat, tantangan dan hambatan dalam penanganan *stunting*, kebijakan pemda dalam menurunkan prevalensi *stunting*. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah angka prevalensi *stunting* yang diperoleh dari hasil Status Survei Gizi Indonesia (SSGI).

D. Pembahasan dan Analisis

Provinsi Jawa Barat memiliki populasi hampir 50 juta jiwa, dan merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Dengan 28



Pemda, yakni 1 pemerintah provinsi (Pemprov), 18 pemerintah kabupaten (Pemkab), dan 9 pemerintah kota (pemkot), Provinsi Jabar memiliki peran sentral dalam penurunan prevalensi *stunting* karena menentukan tinggi atau rendahnya prevalensi *stunting* di tingkat nasional.

Permasalahan *stunting* yang tersebar di 28 Pemda di Jabar memerlukan penanganan yang terintegrasi dan komprehensif dari berbagai pihak terkait agar target nasional dengan tingkat prevalensi *stunting* 14% pada tahun 2024 dapat tercapai. Seluruh Pemda telah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya untuk program penurunan *stunting*. Beberapa Pemda bahkan telah menerbitkan beberapa kebijakan atau peraturan daerah (Perda) sebagai tindak lanjut dari Perpres No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Perpres 72/2021). Oleh karenanya, perlu untuk diketahui kontribusi dari APBD tersebut bagi penurunan prevalensi *stunting* dan pencapaian target nasional *stunting* di masing-masing Pemda.

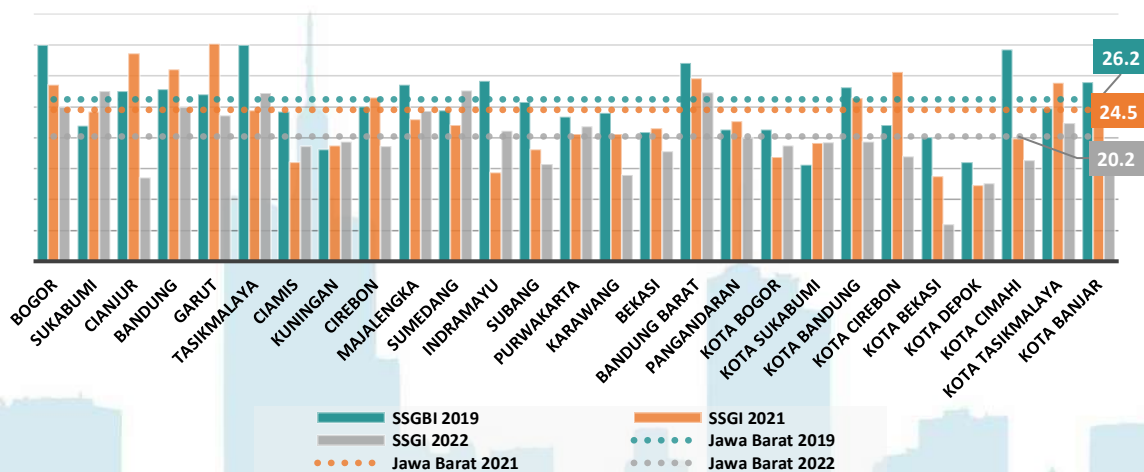
Bab ini akan membahas intervensi Pemda di Jabar melalui APBD dalam penurunan

prevalensi *stunting*. Secara spesifik akan dianalisis kontribusi APBD di tingkat provinsi dan masing-masing kabupaten/kota, kebijakan serta tantangan dan hambatan masing-masing pemda dalam penanganan *stunting*. Dalam upaya optimalisasi penanganan *stunting* akan dianalisis lebih lanjut korelasi belanja *stunting* terhadap penurunan *stunting* serta komposisi belanja *stunting* di daerah, yakni belanja birokrasi dan substansi, yang berpotensi mempengaruhi pencapaian target *stunting* nasional sebesar 14 persen di 2024.

Angka Prevalensi *Stunting* per Kab/Kota

Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi *stunting* pada balita di Jabar mencapai 20,2 persen pada tahun 2022 dengan penurunan sebesar 4,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 24,5 persen. Angka prevalensi Jabar tersebut berada di bawah prevalensi *stunting* di tingkat nasional yang berada pada 21,6 persen pada tahun 2022, dan menempatkan Provinsi Jabar pada peringkat ke-13 prevalensi *stunting* terendah dari seluruh provinsi di Indonesia.

Grafik 1.3. Angka Prevalensi *Stunting* Pemda Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022



Sumber: Kanwil DJPb Jabar dari data olahan Studi Status Gizi Balita di Indonesia/SSGI



Dari Grafik 1.3. di atas menunjukkan tingkat prevalensi *stunting* di Jawa Barat yang terus menurun selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2022. Dari data survei SSGBI (Studi Status Gizi Balita di Indonesia), tingkat prevalensi *stunting* Jawa Barat tahun 2019 sebesar 26,2 persen dan menurun pada tahun 2021 menjadi 24,5 persen, dan berlanjut menurun di 2022 menjadi 20,22 persen.

Hingga tahun 2022, hanya 4 kabupaten/kota dengan prevalensi di bawah 14 persen yakni Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. Cianjur, dan Kab. Karawang, sementara 23 kabupaten/kota lainnya masih di atas 14 persen. Bahkan, 4 kabupaten prevalensinya masih di atas 25 persen. Namun demikian, bila dibandingkan 2021, sebanyak 16 Pemda mengalami penurunan angka prevalensi *stunting* atau sebagian besar pemda kondisi *stuntingnya* mengalami perbaikan. Kabupaten Cianjur mengalami penurunan prevalensi *stunting* terbesar yakni 59,64 persen sedangkan Kab. Indramayu mengalami peningkatan terbesar yakni 46,53 persen.

Pemprov Jabar menargetkan penurunan *stunting* menjadi 0 persen dalam jangka panjang. Namun, Pemprov Jabar dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun 2024 mencantumkan penurunan prevalensi *stunting* menjadi 15,2 persen, masih di atas target *stunting* nasional yang sebesar 14 persen. Berpotensi ketidaktercapaian target *stunting* di tahun 2024 perlu menjadi prioritas utama baik di tingkat Pemda maupun K/L terkait termasuk Kementerian Keuangan mengingat Provinsi Jabar sangat berkontribusi bagi pencapaian target nasional dari populasi terbanyak.

Kebijakan dan Inovasi Pemda dalam Penanganan *Stunting*

Sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, beberapa Pemda di Jabar menerbitkan

kebijakan, peraturan daerah (Perda), atau program, dalam mendukung akselerasi penurunan *stunting* di wilayahnya masing-masing.

Beberapa kebijakan, Perda, dan inovasi program percepatan penurunan *stunting* dari level Pemprov, Pemkab, dan Pemkot dijelaskan di bawah ini.

- 1) Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Pergub Nomor 107 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah Provinsi Jawa Barat. Penurunan *Stunting* di Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui dua intervensi: Perbaikan asupan gizi dan penurunan infeksi dengan pendekatan 8 aksi konvergensi. Dengan program Jabar *Zero New Stunting* yang merupakan program unggulan Gubernur Jawa Barat dalam mendukung program nasional untuk menurunkan prevalensi *stunting* dengan target capaian pada 2023 yakni 19,2 persen. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan seperti diantaranya melakukan kegiatan inovasi berupa *West Java Research Summit* (WJRS) Tahun 2023, *Jabar High Level Meeting* (Jabar Hiling) dengan tema “Pemerintahan digital untuk penanganan *stunting*”, *Obrolan Daring Stunting* (ODADING) Series, *Monitoring Aksi Stunting* (MORING), *Coffee Morning Stunting* (COMRING), *Desk Tagging* Program Prioritas Penurunan *Stunting*, *Aksi Stunting Award* (ASA) Jawa Barat, *Launching Health Heros Nutrihunt*, *Pemantapan Kelas Ibu Hamil* dan *Edukasi Gizi Seimbang* bagi Ibu Hamil, *Penguatan Skrinning Layak Hamil* Bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dan Calon Pengantin (Catin), dan *Sosialisasi Buku Kesehatan Ibu dan Anak* (KIA).
- 2) Pemerintah Kabupaten Bekasi telah memetakan wilayah prioritas dengan tujuan untuk melihat keterkaitan faktor determinan



penyebab *stunting* di wilayah kantong kemiskinan, sehingga pemda dapat fokus tidak hanya pada isu *stunting*, namun juga fokus pada penurunan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan pada keluarga yang terdapat pada lokus prioritas. Berdasarkan hasil analisis situasi tahun 2023, ditetapkan 39 desa lokus prioritas penanganan *stunting* pada tahun 2023 yang ditetapkan melalui SK Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.452-BAPPEDA/2022. Adapun program yang dilakukan dalam upaya penurunan *stunting* diantaranya yaitu menggerakkan perangkat daerah dan 16 perusahaan yang aktif dalam CSR, pembentukan rumah bermain anak *stunting*, mengoptimalkan peran perguruan tinggi, menggaungkan aksi *zero new stunting awards*, aksi kenceng *stunting*, dan aksi cinta kelor.

- 3) Pemerintah Kabupaten Cirebon selalu aktif berkoordinasi dengan Kemenag dan KUA, serta TPPS dan perangkat daerah dalam hal sinergitas program *stunting*. Inovasi atau kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain penyediaan sanitasi dan air minum yang layak, pembentukan kader Pemantau Minum Obat TTD ibu hamil, konseling ASI pada Ibu hamil, suami serta keluarga, dan *sweeping* imunisasi.
- 4) Pemerintah Kota Banjar juga melakukan berbagai kebijakan dalam menurunkan angka *stunting* dengan penguatan regulasi PPPS, penguatan pelaksanaan kegiatan intervensi spesifik, melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, inovasi penanganan percepatan penurunan *stunting*, dan meningkatkan peran orang tua asuh anak *stunting*.
- 5) Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan Peraturan Walikota No 26 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Surat

- Edaran Nomor 800/1774-DPPKB tentang Himbauan Seluruh PNS dan Pegawai BUMD/BLUD Berkontribusi di Program Pemkot. Berbagai upaya yang dilakukan yakni dengan pendekatan kemandirian keluarga, mensosialisasikan gerakan masyarakat hidup sehat, dan Taleus Bogor (Tanggap Leungitkeun *Stunting* ti Kota Bogor)
- 6) Pemerintah Kabupaten Majalengka menekan angka penurunan *stunting* dengan mengoptimalkan kegiatan intervensi spesifik, seperti penguatan pencegahan anemia pada remaja putri dan pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil. Kemudian kegiatan intervensi sensitif juga dilakukan seperti pemberian obat pencegahan massal cacangan pada anak dan imunisasi rotavirus untuk mencegah diare, dan deklarasi ODF Pengadaan Alat Ukur Tinggi dan Berat Badan/Antropometri di seluruh Desa.
 - 7) Pemerintah Kota Bandung menjadikan isu *stunting* sebagai isu prioritas permasalahan kota yang dalam penanganannya tertuang dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Bandung semenjak Kota Bandung dijadikan Lokus Percepatan Penanganan Stunting Tahun 2020 sesuai surat Menteri PPN/Bapenas Nomor B 240/M.PPN/D.5/PP. 01.01/04/2019 tentang Penyampaian perluasan Lokus *Stunting* Terintegrasi Tahun 2020. Dokumen yang telah memasukan Indikator strategis percepatan penurunan *stunting* yaitu Dokumen RPJMD Perubahan 2018-2023 serta Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.. Perangkat daerah sudah memasukan Program kegiatan dan sub-kegiatan terkait *stunting*.

Berikut di atas merupakan beberapa kebijakan dan inovasi atau kegiatan/upaya yang telah dilakukan oleh 7 pemda dalam menurunkan



prevalensi *stunting*, untuk kebijakan pemda lainnya dapat dilihat pada lampiran I analisis ini.

Tantangan dan Hambatan

Menurunkan angka *stunting* dalam suatu daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya perbedaan letak geografis, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat, pola hidup masyarakat dan sebagainya. Berikut merupakan tantangan dan hambatan dalam penurunan angka *stunting* di Jawa Barat:

- 1) Masih ada masyarakat yang menganggap bahwa *stunting* (pendek) bukan menjadi masalah sehingga pola asuh terhadap anak kurang optimal;
- 2) Intervensi sensitif dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya masih belum optimal, terkendala oleh persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan dari K/L terkait;
- 3) Masih kurangnya pemahaman tentang pemantauan dan pertumbuhan balita;
- 4) Komitmen, merubah perilaku, konversi program dan kegiatan termasuk anggaran, peningkatan pangan dan gizi serta data, inovasi, monitoring dan evaluasi *stunting*;
- 5) Masih terdapat keluarga berisiko *stunting* yang tidak berkenan menerima pelayanan kesehatan khusus;
- 6) Dukungan lintas sektor belum maksimal dalam hal edukasi dan promosi dalam rangka

- pembinaan kader di desa, kecamatan dalam hal pemberian imunisasi tepat sasaran;
- 7) Keterampilan kader posyandu dalam melakukan pemantauan pertumbuhan belum merata;
- 8) Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan penanganan segera tapi terkendala dengan sistem rujukan yang berjenjang. Sehingga diperlukan dukungan kebijakan, melalui penunjukan rumah sakit;
- 9) Masih rendahnya cakupan PMT berbasis pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil KEK;
- 10) Masih tingginya angka pernikahan di bawah umur yang telah ditentukan (pria 21 tahun, wanita 19 tahun).

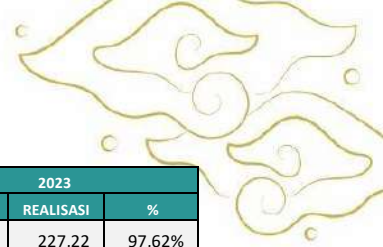
Untuk mengetahui tantang dan hambatan yang ada pada masing-masing daerah di Jawa Barat dalam menurunkan prevalensi *stunting* dapat dilihat pada lampiran I.

Alokasi dan Realisasi Belanja *Stunting* pada Pemda

Sumber dana dalam program percepatan penurunan *stunting* pada Pemda di Jawa Barat diperoleh dari belanja daerah yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota yang juga telah mencakup TKD yang diterima berupa DAK Fisik. Data yang dihimpun berasal dari 28 Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat.

Tabel 1.1. Pagu dan Realisasi Belanja *Stunting* Pemda Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 s.d. 2023 (dalam miliar Rupiah)

No.	PEMDA	2021			2022			2023		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	Jawa Barat	876,72	97,68	11,14%	1.126,52	35,81	3,18%	113,62	101,44	89,28%
2	Kab. Bogor	776,77	3,39	0,44%	30,60	5,10	16,66%	161,39	113,47	70,31%
3	Kab. Sukabumi	19,42	19,26	99,18%	98,33	98,33	100,00%	93,15	82,18	88,22%
4	Kab. Cianjur	171,22	171,20	99,98%	236,21	231,62	98,06%	266,77	264,33	99,09%
5	Kab. Bekasi	327,23	222,74	68,07%	264,11	264,08	99,99%	352,84	343,17	97,26%
6	Kab. Karawang	23,70	23,70	100,00%	50,56	42,39	83,84%	81,27	79,35	97,63%
7	Kab. Purwakarta	111,83	107,68	96,29%	28,82	27,58	95,70%	63,37	60,27	95,10%
8	Kab. Subang	70,69	69,49	98,31%	52,80	43,12	81,67%	25,42	25,19	99,10%
9	Kab. Bandung	68,84	66,05	95,95%	170,74	147,49	86,39%	92,13	90,52	98,25%
10	Kab. Sumedang	76,83	72,71	94,64%	92,11	81,92	88,93%	105,92	101,80	96,11%



No.	PEMDA	2021			2022			2023		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
11	Kab. Garut	113,65	106,20	93,44%	192,81	186,56	96,76%	232,77	227,22	97,62%
12	Kab. Tasikmalaya	28,59	27,20	95,14%	47,53	41,34	86,98%	79,56	75,33	94,69%
13	Kab. Ciamis	52,67	45,82	86,99%	32,74	31,05	94,85%	47,88	45,87	95,80%
14	Kab. Cirebon	7,36	6,30	85,55%	26,30	25,11	95,48%	56,01	54,12	96,63%
15	Kab. Kuningan	66,82	66,70	99,82%	28,37	26,11	92,04%	41,10	37,58	91,43%
16	Kab. Indramayu	8,68	7,05	81,28%	13,70	12,51	91,36%	42,24	39,50	93,53%
17	Kab. Majalengka	118,97	97,51	81,96%	80,66	70,98	88,01%	59,26	55,94	94,40%
18	Kab. Bandung Barat	147,48	112,48	76,27%	141,93	34,05	23,99%	155,51	115,35	74,17%
19	Kab. Pangandaran	1,85	1,79	96,38%	69,37	68,30	98,45%	92,85	91,00	98,01%
20	Kota Bandung	392,21	392,21	100,00%	366,32	359,21	98,06%	337,00	290,91	86,32%
21	Kota Bogor	118,90	113,30	95,29%	127,57	127,18	99,69%	119,56	117,91	98,62%
22	Kota Sukabumi	43,57	39,10	89,75%	63,01	57,86	91,82%	51,51	51,37	99,73%
23	Kota Cirebon	2,45	2,45	100,00%	12,18	10,27	84,34%	16,55	13,17	79,58%
24	Kota Bekasi	66,87	22,23	33,24%	97,30	97,30	100,00%	200,49	200,49	100,00%
25	Kota Depok	24,77	21,36	86,24%	31,23	25,00	80,06%	67,69	42,81	63,25%
26	Kota Tasikmalaya	5,85	5,74	98,03%	19,72	17,36	88,00%	41,40	38,88	93,92%
27	Kota Cimahi	15,96	11,76	73,71%	16,53	0,45	2,71%	59,15	50,09	84,70%
28	Kota Banjar	64,81	59,03	91,08%	57,13	50,83	88,96%	56,59	54,00	95,43%
TOTAL		3.804,71	1.992,11	52,36%	3.575,21	2.229,76	62,37%	3.113,00	2.863,26	91,98%

Sumber: Kanwil DJPB Jabar dari data olahan Pemda di Jabar

Alokasi belanja daerah pada Pemda-pemda (Prov/Kab/Kota) di Jawa Barat untuk penanganan *stunting* pada tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp3,8 triliun, sedikit mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi Rp3,58 triliun, dan tahun 2023 menjadi Rp3,11 triliun. Dari anggaran yang dialokasikan untuk belanja penanganan *stunting* tersebut, secara agregat pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1,99 triliun (52,36%), dan mengalami peningkatan penyerapan, yakni di tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2,23 triliun (62,37%), dan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2,86 triliun (91,98%).

Pada tahun 2021, terdapat tiga pemda yang seluruh alokasi belanja *stunting* nya terealisasi seluruhnya (100%), yakni Kab. Karawang, Kota Bandung, dan Kota Cirebon. Di sisi lain, tiga pemda memiliki realisasi di bawah 50% dengan realisasi terendah yaitu Kab. Bogor 0,44%.

Pada tahun 2022, secara agregat terdapat kenaikan penyerapan dibanding tahun sebelumnya, namun demikian pemda yang mencapai realisasi 100% menjadi dua pemda yakni Kab. Sukabumi dan Kota Bekasi. Sementara itu terdapat tiga pemda yang memiliki

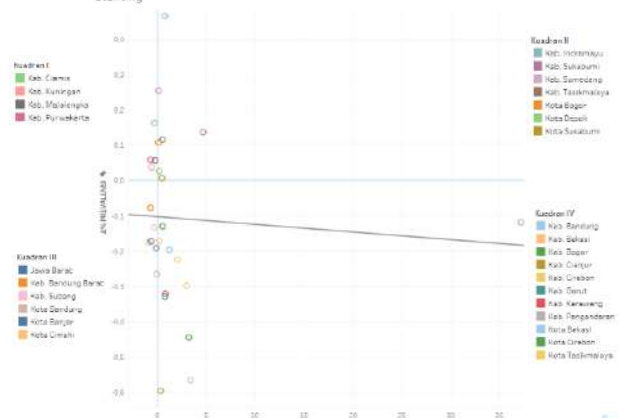
realisasi di bawah 50 persen dengan realisasi terendah yaitu Provinsi Jawa Barat 3,18%.

Pada tahun 2023, penyerapan anggaran semakin membaik dengan realisasi secara agregat mencapai 91,98%. Belanja penanganan *stunting* Kota Bekasi teralisasi seluruhnya yakni 100%, serta tidak ada Pemda yang memiliki realisasi <50%. Realisasi terendah yaitu Kota Depok sebesar 63,25%.

Korelasi Belanja *Stunting* terhadap Angka Prevalensi *Stunting*

Analisis Scatter Plot

Diagram Sebar Kenaikan/Perurunan Realisasi Anggaran dan Kenaikan/Perurunan Prevalensi *Stunting*



Dari diagram sebar (*scatter plot*) dapat disimpulkan bahwa pada 11 pemda (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon,



Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya), hubungan antara belanja dengan prevalensi *stunting* bersifat negatif walaupun lemah.

Sedangkan pada 17 Pemda yang lain, belanja belum menjadi alat yang efektif untuk menurunkan prevalensi *stunting*.

Analisis trend yang dilakukan atas data yang sama menunjukkan kecenderungan bahwa belanja berpengaruh dalam penurunan prevalensi *stunting*.

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Anggaran yang dialokasikan untuk program *stunting* di Jawa Barat cukup besar. Pada tahun 2023, anggaran tersebut mencapai Rp3,2 triliun. Namun, perlu dilihat bagaimana anggaran tersebut dibagikan dan digunakan oleh berbagai dinas dan lembaga terkait.
- 2) Anggaran belum digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai target penurunan *stunting*.
- 3) Belum efektifnya program-program yang telah dilaksanakan dalam menurunkan *stunting*. Harus dipastikan bahwa program-program tersebut tepat sasaran dan berkelanjutan.

Uji Korelasi Pearson

Correlations

		Realisasi	Stunting
Realisasi	Pearson Correlation	1,000	-,066
	Sig. (2-tailed)		,739
	N	28	28
Stunting	Pearson Correlation	-,066	1,000
	Sig. (2-tailed)	,739	
	N	28	28

Hipotesis H0 Tidak terdapat hubungan antara realisasi belanja dengan prevalensi *stunting*. H1 Terdapat hubungan antara realisasi belanja dengan prevalensi *stunting*.

Pearson (rhitung) = -0,066

Signifikansi = 0,739

Cara Interpretasi I

Jika nilai signifikansi < 0,05 Terdapat korelasi (H1 diterima). Jika nilai signifikansi > 0,05 Tidak terdapat korelasi (H0 diterima). Nilai signifikansi = 0,739 > 0,05 Tidak terdapat korelasi (H0 diterima).

Cara Interpretasi II

Jika nilai rhitung > rtabel Terdapat korelasi (H1 diterima). Jika nilai rhitung < rtabel Tidak terdapat korelasi (H0 diterima). Sampel = 28, rtabel = 0,361 rhitung = -0,066 < 0,361 rtabel. Tidak terdapat korelasi (H0 diterima).

Analisis Tren

Hasil analisis tren yaitu negatif. Hal ini disebabkan karena koefisien suku $\Delta\%$ REALISASI bernilai negatif (-0,002169) dan tidak signifikan secara statistik (p-value = 0,747159). Koefisien negatif berarti terdapat hubungan negatif antara kedua variabel. Dalam hal ini, jika $\Delta\%$ REALISASI meningkat maka $\Delta\%$ PREVALENSI cenderung menurun. Namun, penting untuk dicatat bahwa nilai p-nya tinggi, yang berarti hubungan yang diamati tidak signifikan secara statistik. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan, seperti ukuran sampel yang kecil atau adanya faktor lain yang mempengaruhi $\Delta\%$ PREVALENSI.

Catatan tambahan:

- Nilai R-squared (0,0040667) yang sangat rendah menunjukkan bahwa model tidak menjelaskan besarnya varians pada $\Delta\%$ PREVALENSI. Artinya, kemungkinan ada faktor lain yang mempengaruhi $\Delta\%$ PREVALENSI yang tidak tercakup dalam model ini.
- Nilai p dari suku intersep (0,0418643) signifikan secara statistik, yang berarti terdapat intersep yang bukan nol. Namun, besarnya intersep



tersebut kecil (-0,102543), sehingga signifikansinya tidak jelas.

- Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang lemah antara $\Delta\%$ REALISASI dan $\Delta\%$ PREVALENSI. Namun, model tersebut tidak menjelaskan jumlah varian yang signifikan dalam $\Delta\%$ PREVALENSI, dan hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, sulit untuk menarik kesimpulan pasti mengenai tren $\Delta\%$ PREVALENSI hanya berdasarkan model ini.

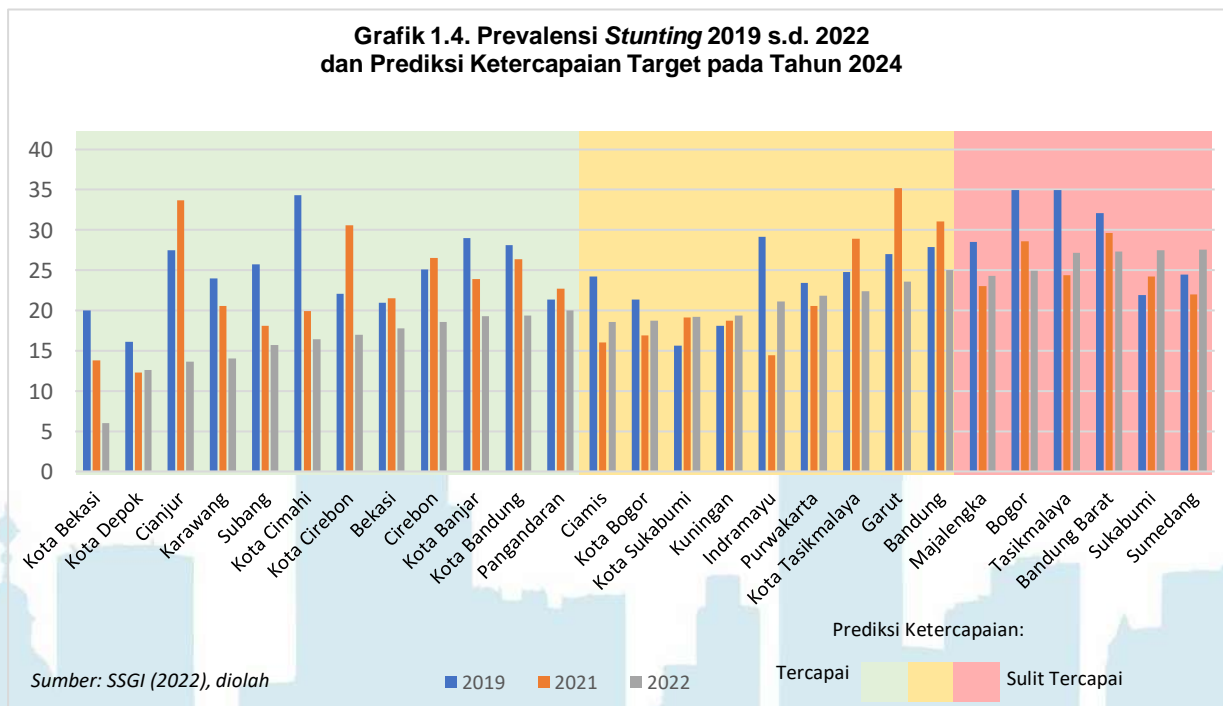
Analisis Belanja Birokrasi dan Substansi

Sampai dengan tahun 2022 penurunan prevalensi *stunting* hingga 14 persen telah dapat dipenuhi oleh 4 kabupaten/kota (Kota Bekasi, Kota Depok, Cianjur, dan Karawang). Sesuai laporan SSGI 2022, Kementerian Kesehatan menetapkan target prevalensi *stunting* sebesar 17,8 persen pada tahun 2023, dengan harapan target 14 persen tercapai pada tahun 2024. Pada Grafik 1.4. berikut tergambar daerah yang diperkirakan mampu memenuhi target 2023 dan pada akhirnya target RPJMN 2024 adalah sebanyak 12 kabupaten/kota (diarsir warna

hijau), 9 kabupaten/kota diperkirakan masih mungkin untuk mengejar (diarsir warna kuning), sedangkan 6 kabupaten lainnya akan kesulitan untuk dapat mengejar ketertinggalannya apabila tidak dilakukan upaya percepatan (diarsir warna merah). Provinsi Jabar menghadapi tantangan yang besar dalam memenuhi target 14 persen pada tahun 2024 mengingat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jabar masih mencantumkan prevalensi *stunting* sebesar 15,2 persen pada tahun 2024. Pencapaian target 14 persen memerlukan komitmen yang tinggi dari seluruh kepala daerah baik dari sisi kebijakan maupun penganggaran pada APBD, dan sinergi dan konvergensi dengan program dan dana yang dimiliki K/L terkait.

Salah satu fenomena yang ada pada APBD terkait Belanja Daerah untuk penanganan *stunting* adalah belanja birokrasi untuk penanganan *stunting* rata-rata di atas 20%. Bahkan sekitar 35 persen Pemda mengalokasikan belanja birokrasi di atas 50%. Tingginya belanja birokrasi pada Pemda perlu menjadi perhatian bersama untuk dapat diturunkan di tahun anggaran berikutnya agar

Grafik 1.4. Prevalensi *Stunting* 2019 s.d. 2022 dan Prediksi Ketercapaian Target pada Tahun 2024





mayoritas dana dapat digunakan untuk intervensi langsung kepada kelompok target yang mengalami *stunting*.

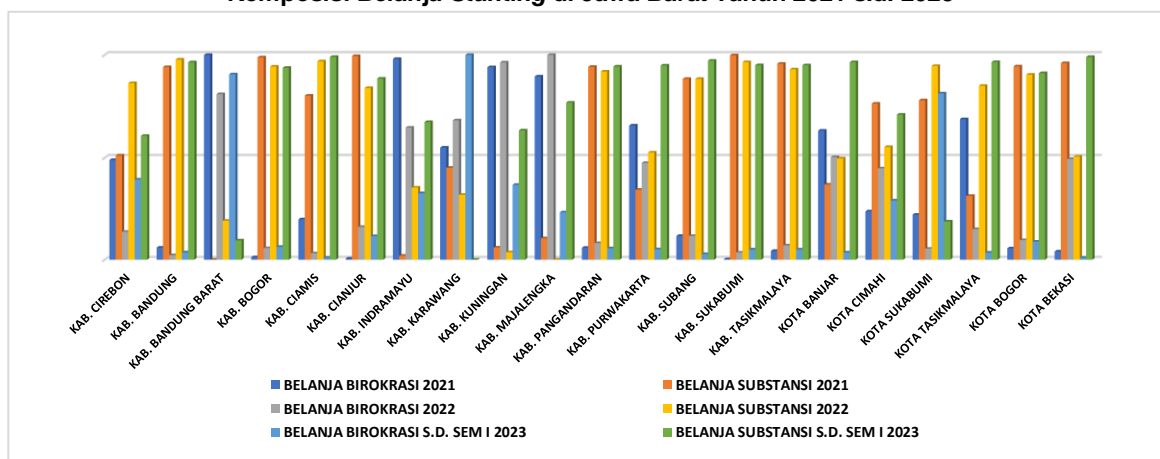
Untuk tujuan analisis, belanja daerah yang digunakan untuk program penanganan *stunting* terbagi menjadi dua kategori, yaitu belanja birokrasi dan belanja substansi. Cakupan kedua jenis belanja dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja birokrasi merupakan belanja yang dikeluarkan unit kerja Pemda terkait (Sekretariat Daerah/Badan/Dinas) untuk memenuhi kebutuhan internal unit kerja berupa kegiatan perencanaan, pemantauan, pelaporan, penunjang, dan belanja modal (jika ada) dalam rangka mendukung program.
2. Belanja substansi merupakan belanja yang

ditujukan langsung ke masyarakat, Rumah Sakit/Posyandu dan penerima bantuan untuk penanganan *stunting* yang mencakup berbagai kegiatan pencegahan dan penanganan *stunting*.

Program penanganan *stunting* akan berjalan lebih efektif dan efisien apabila proporsi belanja substansi lebih besar daripada belanja birokrasi. Dalam hal ini, belanja birokrasi diharapkan tidak lebih dari 20% dari total belanja untuk penanganan *stunting* sehingga mayoritas dana dapat diterima oleh para penerima yang menjadi target dan berdampak bagi penurunan prevalensi *stunting*. Grafik 1.5. menyajikan komposisi belanja birokrasi dan substansi dari 21 Pemda yang digunakan untuk program *stunting*.

Grafik 1.5.
Komposisi Belanja *Stunting* di Jawa Barat Tahun 2021 s.d. 2023



Sumber: Kanwil DJPb Jabar dari data olahan 21 Pemda di Jabar

Pada tahun 2021, secara rata-rata komposisi belanja birokrasi 37,51 persen dan belanja substansi 62,49 persen. Belanja birokrasi pada 11 (sebelas) Pemda masih berada di atas 20 persen. Hal ini mengindikasikan sebagian besar Pemda masih lebih fokus pada pembiayaan konsolidasi internal antar satker di Pemda dibandingkan membiayai kegiatan yang berhubungan langsung pihak penerima. Delapan Pemda dengan belanja birokrasi di atas 50 persen secara berurutan adalah Kabupaten Karawang (54,94%), Kota Banjar (63,17%),

Kabupaten Purwakarta (65,71%), Kota Tasikmalaya (68,74%), Kabupaten Majalengka (89,53%), Kabupaten Kuningan (94,04%), Kabupaten Indramayu (98,07%), dan Kabupaten Bandung Barat (100%).

Pada tahun 2022, secara rata-rata komposisi belanja *stunting* dalam kondisi yang kurang lebih sama, namun sedikit membaik yakni ditandai dengan peningkatan proporsi belanja substansi 66,52 persen dan belanja birokrasi 33,48 persen. Hal ini ditandai dengan penurunan jumlah Pemda yang merealisasikan belanja birokrasi di atas



20%, yakni sebanyak 9 Pemda. Enam Pemda dengan belanja birokrasi di atas 50% dalam penggunaan dana *stunting* secara berurutan adalah Kota Banjar (50,33%), Kabupaten Indramayu (64,62%), Kabupaten Karawang (68,2%), Kabupaten Bandung Barat (80,92%), Kabupaten Kuningan (96,33%), dan Kabupaten Majalengka (100%). Selama periode tahun 2021 dan 2022, enam kabupaten/kota yang konsisten belanja birokrasi di atas 50%. Bahkan pada tiga kabupaten, belanja birokrasi mencapai lebih dari 80%, yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kuningan, dan Majalengka.

Komposisi belanja *stunting* pada tahun 2023 hingga Semester I menunjukkan bahwa 7 Pemda mengalokasikan belanja birokrasi di atas 20 persen, Terdapat tiga Pemda dengan belanja birokrasi di atas 80 persen dari alokasi anggaran *stunting*, yaitu: Kota Sukabumi (81,28%), Kabupaten Bandung Barat (90,57%), dan Kabupaten Karawang (100%).

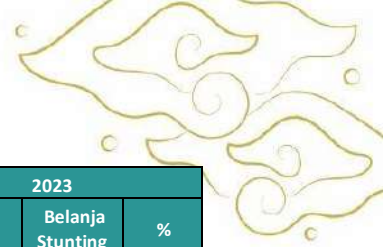
Selama periode tahun 2021 dan 2023, Kabupaten Bandung Barat menjadi satu-satunya Pemda

yang konsisten belanja birokrasi di atas 50%, bahkan mencapai lebih dari 80% hingga 100%. Lebih dominannya belanja birokrasi dibanding belanja substansi di sebagian besar Pemda berdampak pada meningkatnya risiko tidak tercapainya target prevalensi *stunting* 14 persen di tahun 2024 baik di tingkat nasional maupun di Provinsi Jabar. Disamping itu, kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penanganan *stunting*.

Dalam akselerasi penurunan *stunting*, besaran dana, khususnya belanja substansi, diyakini akan berkontribusi pada penurunan prevalensi *stunting*. Oleh karenanya, perlu untuk menganalisis jumlah dana yang dikucurkan Pemda untuk program *stunting* dibandingkan dengan total APBD dari masing-masing Pemda. Tabel 1.2. menyajikan perbandingan belanja *stunting* dengan belanja APBD pada periode tahun 2021 hingga 2023.

Tabel 1.2.
Perbandingan Belanja *Stunting* dan Belanja APBD di Jawa Barat Tahun 2021-2023 (miliar Rp)

No.	PEMDA	2021			2022			2023		
		Belanja APBD	Belanja Stunting	%	Belanja APBD	Belanja Stunting	%	Belanja APBD	Belanja Stunting	%
1	Jawa Barat	37.470,91	97,68	0,26%	32.774,22	35,81	0,11%	27.325,64	101,44	0,37%
2	Kab. Bogor	8.708,39	3,39	0,04%	9.310,40	5,10	0,05%	9.597,80	113,47	1,18%
3	Kab. Sukabumi	4.059,03	19,26	0,47%	4.057,58	109,17	2,69%	4.262,52	82,18	1,93%
4	Kab. Cianjur	3.901,61	171,20	4,39%	3.997,44	231,62	5,79%	4.098,67	264,33	6,45%
5	Kab. Bekasi	6.192,20	222,74	3,60%	6.169,83	264,08	4,28%	6.741,65	343,17	5,09%
6	Kab. Karawang	4.670,67	23,70	0,51%	4.806,74	42,39	0,88%	4.885,62	79,35	1,62%
7	Kab. Purwakarta	2.397,79	107,68	4,49%	2.242,04	27,58	1,23%	2.297,49	60,27	2,62%
8	Kab. Subang	3.120,31	69,49	2,23%	3.170,15	43,12	1,36%	2.463,56	25,19	1,02%
9	Kab. Bandung	5.498,61	66,05	1,20%	6.080,68	147,49	2,43%	5.042,67	90,52	1,80%
10	Kab. Sumedang	2.712,13	72,71	2,68%	2.930,94	81,92	2,79%	2.840,80	101,80	3,58%
11	Kab. Garut	4.649,60	106,20	2,28%	4.688,38	186,56	3,98%	4.292,96	227,22	5,29%
12	Kab. Tasikmalaya	3.163,52	27,20	0,86%	3.171,35	41,34	1,30%	3.145,12	75,33	2,40%
13	Kab. Ciamis	2.706,10	45,82	1,69%	2.798,75	31,05	1,11%	2.771,31	45,87	1,66%
14	Kab. Cirebon	3.942,81	6,30	0,16%	3.988,92	25,11	0,63%	3.873,68	54,12	1,40%
15	Kab. Kuningan	2.742,15	66,70	2,43%	2.708,52	26,11	0,96%	2.685,93	37,58	1,40%
16	Kab. Indramayu	3.257,42	7,05	0,22%	3.197,44	12,51	0,39%	3.364,44	39,50	1,17%
17	Kab. Majalengka	3.105,90	97,51	3,14%	2.989,79	70,98	2,37%	3.408,38	55,94	1,64%
18	Kab. Bandung Barat	2.917,75	112,48	3,86%	2.893,54	34,05	1,18%	2.580,08	115,35	4,47%
19	Kab. Pangandaran	1.349,23	1,79	0,13%	1.447,23	68,30	4,72%	1.226,09	91,00	7,42%
20	Kota Bandung	5.675,60	392,21	6,91%	6.473,48	359,21	5,55%	6.384,20	290,91	4,56%
21	Kota Bogor	2.637,73	113,30	4,30%	2.986,35	127,18	4,26%	3.007,67	117,91	3,92%



No.	PEMDA	2021			2022			2023		
		Belanja APBD	Belanja Stunting	%	Belanja APBD	Belanja Stunting	%	Belanja APBD	Belanja Stunting	%
22	Kota Sukabumi	1.201,05	39,10	3,26%	1.251,74	57,86	4,62%	1.283,04	51,37	4,00%
23	Kota Cirebon	1.334,56	2,45	0,18%	1.433,81	10,27	0,72%	1.358,89	13,17	0,97%
24	Kota Bekasi	5.704,89	22,23	0,39%	5.719,82	97,30	1,70%	6.337,70	200,49	3,16%
25	Kota Depok	3.267,62	21,36	0,65%	3.614,13	25,00	0,69%	3.753,61	42,81	1,14%
26	Kota Tasikmalaya	2.013,49	5,74	0,29%	1.912,31	17,36	0,91%	1.620,71	38,88	2,40%
27	Kota Cimahi	1.481,51	11,76	0,79%	1.377,67	0,45	0,03%	1.498,66	50,09	3,34%
28	Kota Banjar	754,62	59,03	7,82%	790,68	50,83	6,43%	664,74	54,00	8,12%
TOTAL		130.637,22	1.992,11	1,52%	128.983,93	2.229,76	1,73%	122.813,65	2.863,26	2,33%

Sumber: Kanwil DJPB Jabar dari data olahan Pemda di Jabar

Sebagian besar Pemda mengalokasikan dana untuk program *stunting* kurang dari 1% dari APBN Pemda. Sebagai akibatnya pada sebagian besar Pemda dengan alokasi *stunting* kurang dari 1% APBD, prevalensi *stunting* masih di atas dari prevalensi *stunting* di tingkat nasional. Dari Tabel 1.2. di atas, alokasi belanja *stunting* di masing-masing Pemda sangat beragam, dari 0,04% dari APBD atau Rp3,39 miliar (Kab. Bogor tahun 2021) hingga 7,82% dari APBD atau Rp59,03 miliar (Kota Banjar tahun 2021), dari 0,03% dari APBD atau Rp450 juta (Kota Cimahi tahun 2022) hingga 6,43% dari APBD atau Rp50,83 miliar (Kota Banjar tahun 2022), dan 0,37% dari APBD atau Rp101,44 miliar (Pemprov Jawa Barat tahun 2023) hingga 8,12% dari APBD atau Rp54 miliar (Kota Banjar tahun 2023). Dengan rendahnya proporsi belanja *stunting* dibandingkan belanja APBD, maka belanja *stunting*, khususnya belanja substansi, diyakini akan berkontribusi pada penurunan prevalensi *stunting*. Oleh karenanya, perlu untuk menganalisis jumlah dana yang dikucurkan Pemda untuk program *stunting* dibandingkan dengan total APBD dari masing-masing Pemda.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kajian *Stunting* telah menjelaskan berbagai upaya Pemda dalam percepatan penurunan *stunting* baik di tingkat Provinsi Jawa Barat melalui serangkaian intervensi kebijakan dan dukungan pendanaan yang berasal dari APBD. Bagian ini akan mengikhtisarkan simpulan dari

berbagai upaya tersebut, dan memberikan saran/rekomendasi bagi tercapainya target penurunan *stunting* 14 persen pada tahun 2024.

Kesimpulan

- 1) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 memiliki nilai prevalensi *stunting* sebesar 24,5 persen, atau berada di atas angka nasional sebesar 24,4 persen. Sementara pada tahun 2022 posisi Jabar membaik, dan menduduki urutan ke 13 (dari nilai prevalensi terendah) dengan angka sebesar 20,2 persen atau berada di bawah angka prevalensi nasional sebesar 21,6 persen. Angka ini menurun sebesar 4,3 persen dibandingkan tahun 2021. Adapun untuk tahun 2023 ditargetkan tingkat prevalensi sebesar 19,2 persen atau menurun 1 persen dibanding tahun 2022.
- 2) Beberapa Pemda telah menindaklanjuti Perpres No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dengan melakukan berbagai kebijakan, peraturan daerah atau program dalam mendukung akselerasi penurunan *stunting* di wilayahnya masing-masing. Diantaranya, seperti Program Jabar *Zero New Stunting* yang merupakan program unggulan Gubernur Jabar dengan capaian target sebesar 19,2 persen pada tahun 2024, Pemkab Bekasi telah menetapkan 39 desa lokus prioritas penanganan *stunting* pada tahun 2023 yang ditetapkan melalui SK Bupati Bekasi, Pemkot Bogor mengeluarkan Peraturan Walikota No 26 Tahun 2023 tentang Percepatan



- Penurunan *Stunting* dan Surat Edaran Nomor 800/1774-DPPKB tentang Himbauan Seluruh PNS dan Pegawai BUMD/BLUD Berkontribusi di Program Pemkot Bogor, Pemerintah Kota Bandung menjadikan isu *stunting* sebagai isu prioritas permasalahan kota dan telah memasukan indikator strategis percepatan penurunan *stunting* pada Dokumen RPJMD Perubahan 2018-2023 serta Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.
- 3) Total alokasi pagu Pemda di Jawa Barat untuk penanganan *stunting* pada tahun 2021 sebesar Rp3,8 triliun miliar dengan realisasi sebesar 1,9 triliun (52%), dimana terdapat tiga pemda yang seluruh alokasi belanja *stunting* terealisasi seluruhnya (100%) terdapat di Kab. Karawang, Kota Bandung, dan Kota Cirebon. Pada tahun 2022, total alokasi turun menjadi sebesar Rp3,58 triliun dengan realisasi sebesar 2,23 triliun (62,37%) dan hanya dua pemda yang realisasinya mencapai 100% yaitu Kabupaten Sukabumi dan Kota Bekasi. Untuk tahun 2023 alokasi anggaran kembali menurun menjadi sebesar Rp3,11 triliun dengan realisasi yang cukup meningkat mencapai sebesar 91,99% atau Rp2,86 triliun, dimana Kota Bekasi belanja *stunting*-nya terealisasi 100%, serta tidak ada Pemda yang memiliki realisasi kurang dari 50%. Realisasi terendah yaitu Kota Depok sebesar 63,25%.
 - 4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jabar pada tahun 2024 mencantumkan penurunan prevalensi *stunting* menjadi 15,2 persen, masih di atas target *stunting* nasional yang sebesar 14 persen. Tidak tercapainya target *stunting* di tahun 2024 perlu menjadi prioritas utama mengingat Provinsi Jabar sangat berkontribusi bagi pencapaian target nasional dari populasi terbanyak di Indonesia.
 - 5) Seluruh Pemda di Jabar telah mengalokasikan dana APBD setiap tahunnya untuk program penurunan *stunting*, baik APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota. Dari 28 Pemda kabupaten dan kota menyampaikan data pendanaan *stunting* pada APBD, realisasi rata-rata belanja daerah untuk *stunting* dibandingkan APBD adalah: (i) pada tahun 2021 sebesar Rp1.992,11 miliar atau rata-rata 1,52% dari APBD; (ii) tahun 2022 sebesar Rp2.229,76 miliar (1,73% APBD); dan pada tahun 2023 sebesar Rp32.863,26 miliar (2,33%) APBD. Namun, mayoritas Pemda (sekitar 59% dari total Pemda) mengalokasikan dana *stunting* di bawah 1% setiap tahunnya selama periode tahun 2021 dan tahun 2022.
 - 6) Adapun alokasi belanja daerah untuk program *stunting* yang diklasifikasi berdasarkan jenis belanja birokrasi dan belanja substansi/program bervariasi persentasenya di tiap Pemkab dan Pemkot. Pemanfaatan dana untuk belanja birokrasi dan belanja substansi pada Pemkab dan Pemkot adalah sebagai berikut : (a) Pada tahun 2021, 11 dari 28 Pemda (39%) mengalokasikan belanja birokrasi di atas 20%, dan masih terdapat delapan Pemda (28%) dengan belanja birokrasi di atas 50%. (b) Pada tahun 2022, jumlah Pemda yang mengalokasikan belanja birokrasi di atas 20% berkurang menjadi 9 Pemda (32%) dan masih terdapat 6 pemda (21%) yang belanja birokralnya diatas 50%. (c) Tahun 2023 hingga semester I menunjukkan tujuh pemda yang mengalokasikan belanja birokrasi diatas 20% dan masih terdapat tiga pemda dengan belanja birokrasi diatas 80% yaitu Kota Sukabumi (81,28%), Kab Bandung Barat (90,57%) dan Kab karawang (100). (d) Terdapat enam Pemda yang konsisten pada tahun 2021 dan 2022 dengan belanja

birokrasi di atas 20 persen dari alokasi anggaran stunting, dan tiga Kabupaten yaitu Bandung Barat, Kuningan dan Majalengka yang realisasi belanja birokrasi di atas 80% hingga 100%.

- 7) Hasil analisis dengan menggunakan beberapa pengujian statistik disimpulkan adanya hubungan yang bersifat negatif antara korelasi belanja *stunting* terhadap prevalensi *stunting* di Provinsi Jawa Barat, banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat prevalensi *stunting* seperti masih rendahnya proporsi belanja *stunting* dibandingkan dengan belanja APBD yaitu kurang dari 1% dan rendahnya proporsi belanja substansi dalam menangani penurunan tingkat *stunting* yang diyakini akan berkontribusi pada penurunan prevalensi *stunting*.

Rekomendasi

- 1) Berdasarkan hasil pengujian statistik di atas menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif dan kurang signifikan antara kenaikan realisasi belanja dengan penurunan prevalensi *stunting*, hal ini dimungkinkan oleh masih besarnya rata-rata realisasi belanja birokrasi yang masih di atas 20%. Hal ini perlu itikad baik dari semua pihak untuk dapat menekan belanja birokrasi dan lebih memfokuskan belanja substansinya. Pihak Pemda dapat bekerja sama dengan BKKBN dalam merumuskan program kegiatan yang lebih dititikberatkan pada belanja substansi.
- 2) Perlunya sinkronisasi antara kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh Pemda dengan alokasi dana *stunting* yang dialokasikan pada satuan kerja kementerian/lembaga agar sasaran yang dituju lebih jelas dan tidak ada tumpang tindih. Perlunya TPPS Provinsi untuk proaktif menyelaraskan dengan program yang akan dilaksanakan Pemda dengan program yang sudah ada di satuan kerja kementerian/lembaga.
- 3) Perhitungan prevalensi *stunting* didasarkan pada perhitungan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Angka prevalensi tersebut diberikan kepada Kabupaten/Kota tanpa diberikan detail lebih lanjut penjelasan sehingga Pemda tidak dapat mengetahui secara pasti hal-hal mana saja yang masih kurang dan perlu peningkatan lebih lanjut. Oleh karena itu diharapkan dalam release prevalensi *stunting* agar diberikan juga penjelasan dari persentase prevalensi *stunting* per kabupaten/kota sehingga bisa menjadi bahan evaluasi oleh Pemda masing-masing.
- 4) Adanya data sasaran yang akurat dan sama sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait penanganan *stunting* baik di pemerintah pusat maupun Pemda.
- 5) Alokasi dan belanja Pemda masih tergantung kepada dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat, oleh karena itu perlu kiranya percepatan proses pencairan dana transfer ke daerah baik itu Dana Desa maupun DAK Fisik yang di dalamnya terdapat alokasi dana untuk penanganan penurunan *stunting*.
- 6) Hidup manusia adalah siklus hidup yang kontinu sehingga konteks intervensi dalam rangka penanganan *stunting* dalam bentuk belanja pun harus kontinu, tidak sporadis dan random serta dilakukan oleh semua pihak, sehingga realisasi persentase prevalensi *stunting* terus menurun dari waktu ke waktu sehingga dapat mendorong mewujudkan generasi Indonesia Emas di tahun 2045.



Daftar Pustaka

- Akhmadi, M. H. (2020). *Peran Belanja Negara Dalam Program Penurunan Stunting*. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 6 (2), 161-174
- Aryastami, N. K. (2017). *Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia*. Indonesian Bulletin of Health Research, 45(4), 233-240.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI. (2019). *Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi 2020-2024*, Jakarta.
- Bhutta, Z.A., Ahmed, T., Black, R.E., Cousens, S., Dewey, K., Giugliani, E., Haider, B.A., Kirkwood, B., Morris, Scholastica Nadya Almitha / WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 3, Nomor 1, Mei 2022 / Halaman 39-50 [50] S.S., Sachdev, H.P.S. dan Shekar, M. (2008). *What works? Interventions for maternal and child undernutrition and survival*. The lancet, 371(9610), pp.417-440.
- Creswell, J. (2013). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches third Edition*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fitrianingrum, L. (2022). *Strategy Of Stunting Handling Policy In West Java Province During The Covid-19 Pandemi (Analysis Of Implementation And Solution)*. Jurnal Ilmu Administrasi, 19 (1). Pp. 1-14.
- Joint Child Malnutrition Eltimates. (2018). Buletin Stunting. *Journal of Molecular Biology*, 301(5), pp. 1163–1178
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Studi Status Gizi Balita di Indonesia*, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019*, Jakarta
- Renyoet, D. (2016). *Potensi Kerugian Ekonomi Karena Stunting Pada Balita di Indonesia Tahun 2013*, Jurnal Gizi dan Pangan. Gizi Pangan, 11, p. 253.
- Rizki, A. (2019) '*Stunting Ancaman Bagi Ekonomi Indonesia*'. Surabaya: Joss Today.Com, p. 3. Available at: https://josstoday.com/read/2019/11/19/53880/Stunting_Ancaman_bagi_Ekonomi_Indonesia.
- Saptati, Reni D.I. (2023). APBN Targetkan Percepatan Penurunan Stunting Melalui Tiga Intervensi. Jakarta: Kementerian Keuangan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/how/apbn-targetkan-percepatan-penurunan-stunting-melalui-tiga-intervensi>.
- Stewart, C. P. et al. (2013). *Contextualising complementary feeding in a broader framework for stunting prevention*. Maternal and Child Nutrition. doi: 10.1111/mcn.12088.
- Wali, N., Agho, K. and Renzaho, A. M. N. (2019). *Past drivers of and priorities for child undernutrition in South Asia: a mixed methods systematic review protocol*. Systematic Reviews. Systematic Reviews, 8(1), pp. 1–8. doi: 10.1186/s13643-019-1112-7.
- Widiastuti, N. K. (2019) '*Penurunan Stunting di Gianyar, Bali*'. Denpasar: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, p. 1. Available at: <https://www.diskes.baliprov.go.id/penurunan-stuntingdi-gianyar-bali/>.
- Widiyanto, A., Atmojo JT., Darmayanti AT. (2019). *Pengaruh faktor kerawanan pangan dan lingkungan terhadap stunting*. Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan. Vol 8. Pp. 61-66.
- World Bank. (2018). *Aiming High Indonesia's Ambition to Reduce Stunting*. Washington DC.



Lampiran I

Kebijakan dan Inovasi, serta Hambatan dan Tantangan dalam Mencapai Target Prevalensi *Stunting* Tahun 2024 Per Daerah di Jawa Barat

1. Provinsi Jawa Barat

a) Kebijakan

Pergub Jabar Nomor 107 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan *stunting* Daerah Provinsi Jawa Barat. Penurunan *stunting* di Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui dua intervensi: Perbaikan asupan gizi dan penurunan infeksi dengan pendekatan 8 aksi konvergensi.

b) Inovasi

1. *West Java Research Summit (WJRS)* Tahun 2023. Salah satu inovasi BP2D Provinsi Jawa Barat selaku ketua Divisi R&D TPPS Provinsi Jawa Barat. Salah satu tema yang diangkat di tahun 2023 adalah “Refleksi Inovasi dan Kolaborasi” dengan *stunting* sebagai salah satu subtema.
2. *Jabar High Level Meeting (Jabar Hiling)* Tema “Pemerintahan digital untuk penanganan *stunting*”. Presiden Republik Indonesia memimpin langsung pelaksanaan Rapat Terbatas (Ratas) Percepatan Penanganan *Stunting* Melalui SPBE, di Istana Merdeka.
3. *Obrolan Daring Stunting (ODADING) Series*.
4. *ODADING (Obrolan Daring Stunting) Series* Merupakan Forum rutin mingguan yang dilaksanakan setiap hari jum’at secara daring, yang menyajikan berbagai Inovasi diseluruh kabupaten/kotase-Jawa Barat dan memperkuat komitmen percepatan penurunan *stunting* menuju *Jabar Zero New Stunting*.
5. *Monitoring Aksi Stunting (MORING)*. *MORING (Monitoring Aksi Stunting)* adalah Monitoring Terpadu TPPS Jabar keTPPSkab/kota untuk penguatan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* dan upaya peningkatan komitmen kepala daerah dalam percepatan penurunan *stunting*.
6. *Coffee Morning Stunting (COMRING)*. *COMRING (Coffee Morning Stunting)* Merupakan wadah koordinasi dan kolaborasi TPPS Provinsi Jawa Barat untuk membahas Program Kinerja, Inovasi dan Isu terkini terkait upaya percepatan penurunan *stunting* di Jawa Barat.
7. *Desk Tagging* Program Prioritas Penurunan *Stunting*. Forum yang diselenggarakan oleh Divisi *Planning and Budgeting* TPPS Provinsi Jawa Barat dengan tujuan melakukan identifikasi, koordinasi, serta sarana evaluasi program/kegiatan penurunan *stunting* di Provinsi Jawa Barat.
8. *Aksi Stunting Award (ASA)* Jawa Barat. Merupakan *event stunting* yang diselenggarakan oleh TPPS Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan pentahelix dalam upaya percepatan penurunan *stunting* menuju *Jabar Zero New Stunting*.
9. *Launching Health Heros Nutrihunt*. Aplikasi *health heroes nutrihunt* dengan fitur utama ‘*scanbarcode*’ akan membantu membiasakan remaja membaca informasi gizi pada pangan kemasan. Sehingga dengan peluncuran aplikasi ini mempersiapkan masyarakat khususnya remaja dalam kondisi apapun untuk memperhatikan konsumsi gizi seimbang.
10. *Pemantapan Kelas Ibu Hamil dan Edukasi Gizi Seimbang bagi Ibu Hamil*. Kelas Ibu Hamil merupakan sarana belajar bersama tentang kesehatan bagi ibu hamil, dalam kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu mengenai kehamilan, persalinan, nifas, KB pasca persalinan, pencegahan komplikasi, perawatan bayi baru lahir, aktivitas fisik & senam ibu hamil.
11. *Penguatan Skrinning Layak Hamil Bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dan Calon Pengantin (Catin)*. Kegiatan ini bertujuan memperkuat layanan *skrinning* layak hamil untuk perencanaan kehamilan yang sehat, mendukung upaya penurunan AKI, AKB, serta gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak.
12. *Sosialisasi Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)*. Melalui pertemuan sosialisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaannya terutama untuk pencegahan terjadinya *stunting* sejak dini.

c) Hambatan dan Tantangan

Permasalahan regulasi yang perlu ditindaklanjuti berupa:



1. Perlu adanya evaluasi pergub 107/20 tentang RAD penurunan *stunting* Prov Jabar dan penyusunan perubahan RAD.
2. Perlu dievaluasi apakah susunan tim saat ini telah berjalan efektif dalam menjalankan tugas masing-masing.
3. Penyederhanaan birokrasi yang mengakibatkan hilangnya eselon 3 dan 4 yang ada dalam struktur TPPS.
4. Perubahan kewenangan (ex: KRPL/PPL yang sebelumnya ada di DKPP namun dialihkan ke DTPH).
5. Pembentukan sekretaris Bersama.
6. Penyusunan *tagging* program/kegiatan yang mendetail dan rencana target *output/outcome* di seluruh PD/Instansi.

2. Kabupaten Bekasi

a. Kebijakan

Dilakukan pemetaan wilayah prioritas dengan tujuan untuk melihat keterkaitan faktor determinan penyebab *stunting* di wilayah kantong kemiskinan, sehingga Pemerintah daerah dapat fokus tidak hanya pada isu *stunting*, namun juga fokus pada penurunan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan pada keluarga yang terdapat pada lokus prioritas. Berdasarkan hasil analisis situasi tahun 2023, ditetapkan 39 desa lokus prioritas penanganan *stunting* pada tahun 2023 yang ditetapkan pada Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.452-BAPPEDA/2022.

b. Inovasi

1. Perangkat Daerah dan 16 Perusahaan yang aktif dalam CSR bertindak sebagai *Laison Officer* di 16 Kecamatan lokus *stunting*.
2. Pembentukan rumah bermain anak *stunting* yang digunakan sebagai rumah tempat bermain dan pemberian makanan tambahan bergizi bagi anak penderita *stunting* di masing-masing desa.
3. Peran perguruan tinggi bersama masyarakat terkait updating validitas data dan penyaluran bantuan agar tepat sasaran di lokasi lokus *stunting*.
4. Aksi *zero new stunting awards* berupa *awards* bagi kecamatan yang sudah *zero stunting* dengan reward berupa piagam penghargaan dan alokasi pagu pembangunan infrastruktur.
5. Aksi *kencleng stunting* untuk mengajak ASN berbagi makanan minuman bergizi untuk keluarga dengan penderita *stunting*.
6. Aksi cinta kelor dengan melakukan budidaya kelor untuk diambil dan dimanfaatkan daunnya yang banyak gizi.

c. Hambatan dan Tantangan

1. Sinergi lintas sektor berupa kolaborasi unsur pentahelix masih perlu dioptimalkan
2. Perlunya penguatan digitalisasi berupa dilakukan *update realtime* terhadap validitas data terpadu.
3. Ketahanan keluarga masih perlu dikuatkan melalui peran tim pendamping desa dan tim pendamping keluarga (DPPKB).

3. Kabupaten Cirebon

a. Kebijakan

1. Berkoordinasi dengan Kemenag dan KUA untuk pendaftaran calon pengantin 3 bulan sebelum pernikahan dan Kemenag, KUA dapat mensosialisasikan mengenai *elsimil catin*.
2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait uraian tugas TPPS.
3. Melakukan koordinasi antar perangkat daerah untuk merencanakan kegiatan di lokus *stunting*.
4. Melakukan koordinasi antar perangkat daerah untuk menganggarkan kegiatan di lokus *stunting*.
5. Membuat jadwal pertemuan TPPS Kecamatan dan TPPS Desa di selaraskan dengan Minilokakarya Di tingkat Kecamatan, untuk TPPS Kabupaten di anggedakan dengan pertemuan di Bappelitbangda.
6. Monitoring dan evaluasi yang terencana kepada TPK.
7. Melaksanakan advokasi kepada lintas sektor terus menerus.

b. Inovasi atau kegiatan yang sudah dilaksanakan



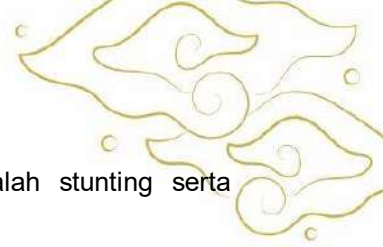
1. Pembangunan Tanki Septiktank Skala Komunal untuk 5 - 10 KK dan Skala Individual Minimal 50 KK Desa yang masih Non ODF dan ODF yang masuk Desa Kategori masuk wilayah *Stunting* yang masih tinggi.
 2. Melaksanakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara bertahap dan menyeluruh agar tercapainya Pembangunan yang berkelanjutan sehingga di Kabupaten Cirebon bebas dari *Stunting*.
 3. Melaksanakan Program SPAM Air Minum Perdesaan dan Perkotaan meliputi Pengeboran Sumur Dalam Terlindungi, Pembangunan Menara Air, Perpipaan dan Sambungan Rumah.
 4. Membentuk kader PMO (Pemantau Minum Obat) TTD ibu hamil.
 5. Konseling ASI pada Ibu hamil, suami serta keluarga. Pembentukan Kelompok Pendukung ASI di tingkat Kecamatan, membatasi adanya iklan konsumsi susu formula.
 6. Sweeping Imunisasi dan membuat sentra Imunisasi di tiap desa.
- c. Hambatan dan Tantangan
1. Masih rendahnya cakupan TTD Remaja putri di Sekolah dan belum adanya regulasi di tingkat Kabupaten.
 2. Masih rendahnya cakupan PMT berbasis pangan lokal bagi Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil KEK.
 3. Belum maksimalnya pemanfaatan dana Desa untuk pencegahan stunting serta peran serta sektor swasta (CSR) dalam percepatan penurunan *stunting*.
 4. Belum maksimalnya cakupan ODF dan belum adanya regulasi mengenai percepatan cakupan ODF.
 5. Masih terdapat perkawinan pada usia anak.

4. Kota Banjar

- a. Kebijakan
1. Penguatan regulasi PPPS (Penanganan Percepatan Penurunan *Stunting*)
 2. Penguatan pelaksanaan kegiatan intervensi spesifik.
 3. Melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan *stakeholders* lain (CSR, BAZNAS, dan Lain-lain).
 4. Inovasi penanganan percepatan penurunan *Stunting*
 5. Meningkatkan peran orang tua asuh anak *stunting*.
- b. Hambatan dan Tantangan
1. Anggarannya masih belum memadai.
 2. Angka kemiskinan masih relatif tinggi.
 3. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin belum optimal.
 4. Kesadaran untuk konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri masih kurang.
 5. Kesulitan pemantauan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).
 6. Calon Pengantin dan Pasangan Usia Subur (PUS) masih ada yang belum memeriksakan kesehatan di pusat kesehatan.
 7. Penduduk miskin yang terdaftar di PBI mencapai 42,8%.
 8. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro kecil belum berimbang.
 9. Sinergi kebijakan dan program belum optimal.

5. Kota Bogor

- a. Kebijakan
- Peraturan Walikota No 26 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Surat Edaran Nomor 800/1774-DPPKB Tentang Himbuan Seluruh PNS dan Pegawai BUMD/BLUD Berkontribusi di Program Pemkot - PENTING LUR.
- b. Inovasi atau kegiatan yang sudah dilaksanakan
1. Pendekatan kemandirian keluarga
Dilakukan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai, dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan kelompok penyedia secara berkala, kontinu, dan terintegrasi.
 2. Gerakan masyarakat hidup sehat



Dalam rangka mensinergikan tindakan upaya promotif preventif masalah stunting serta meningkatkan produktifitas masyarakat melalui kampanye ABCDEF, yaitu:

- a) Aktivitas fisik
- b) (konsumsi) Buah dan sayur
- c) Cek kesehatan rutin
- d) Diberikan ASI eksklusif
- e) Enyahkan asap rokok
- f) *Open Defecation Free*

3. Taleus Bogor (Tanggap Leungitkeun Stunting ti Kota Bogor)

Merupakan suatu upaya untuk menurunkan *stunting* dengan menggerakkan masyarakat, kerja sama dengan lintas program serta lintas sektor.

c. Hambatan dan Tantangan

1. Belum efektifnya program-program pencegahan *stunting*.
2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan, dan pemantauan dan evaluasi.
3. Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana.
4. Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program.
5. Masih minimnya advokasi, kampanye, dan diseminasi terkait *stunting*, dan berbagai upaya pencegahannya.

6. Kabupaten Majalengka

a. Kebijakan dan Strategi

Intervensi Spesifik

1. Aksi bergizi di setiap sekolah SMP dan SMA;
2. Penguatan pencegahan anemia pada remaja putri;
3. Pembudayaan Germas di Tatanan Sekolah dan Sosialisasi Pentingnya Gizi Seimbang di Sekolah;
4. Intervensi ibu Hamil berupa peningkatan kualitas pemeriksaan ANC sesuai standar dengan pemenuhan USG di seluruh puskesmas dan dokter terlatih;
5. Pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil;
6. Sosialisasi pedoman gizi seimbang berbasis pangan lokal;
7. Sosialisasi pemberian makan pada bayi dan anak;
8. Pendampingan Catin, Ibu Hamil, Ibu pasca persalinan, Baduda dan Balita oleh Tim Pendamping Keluarga;
9. Intervensi Ibu Hamil melalui pelaksanaan Kelas Ibu Hamil;
10. Distribusi Pemberian Makanan Tambahan Balita dan Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil berupa Biskuit dan berbahan pangan lokal;
11. Bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) masing-masing OPD dan PKK dalam penanganan balita *stunting* dan gizi kurang;

Intervensi sensitif

1. Pemberian obat pencegahan massal cacingan pada anak dan imunisasi rotavirus untuk mencegah diare;
2. Deklarasi ODF Pengadaan Alat Ukur Tinggi dan Berat Badan/Antropometri di seluruh Desa dan sedang diupayakan untuk seluruh Posyandu;
3. Program "KISSING" Pemberian Kartu JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat) bagi Masyarakat untuk Cegah Stunting;
4. Bincang Sehat Rutin dilaksanakan setiap hari Selasa minggu ketiga di Radio Radika;
5. Pemutaran ILM stunting di Radio Radika;
6. Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Perkemahan Bakti Saka Bakti Husada (SBH).

b. Hambatan dan Tantangan

1. Produk hukum terkait penurunan *stunting* di Kabupaten Majalengka belum menyesuaikan dengan aturan terbaru sebagai turunan dari terbitnya Peraturan presiden nomor 72 Tahun 2021;
2. Keterampilan kader posyandu dalam melakukan pemantauan pertumbuhan belum merata;



3. Masih kurangnya pengetahuan remaja puteri, ibu hamil dan ibu menyusui dalam mengkonsumsi makanan gizi seimbang;
4. Koordinasi program antar lembaga dalam TPPS belum maksimal.

7. Kota Sukabumi

a. Kebijakan

1. SK Wali Kota Nomor 188.45/84 - Bappeda/2023.
2. Surat Keputusan Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Sukabumi Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan se-Kota Sukabumi Tahun 2022.
3. Keputusan 33 Lurah tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
4. SK Kepala Dinas P2KBP3A Nomor : 900/kep.06/DP2KBP3A/2023.
5. Perda Kota Sukabumi Air Susu Ibu Eksklusif 2 TAHUN 2016 Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
6. PERWAL No 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Perwal Renstra Dinkes Tahun 2018-2023.
7. Komitmen TTD Rematri Tahun 2022.

b. Inovasi/Kegiatan yang sudah dilaksanakan

1. Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*
2. Sudah terbentuk TPPS tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan
3. Pemantauan tumbuh kembang balita
4. Kelas ibu hamil dan ibu balita
5. Klinik gizi dengan dokter spesialis
6. Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Gizi Buruk dan Ibu Hamil KEK
7. Pemberian Tablet Tambah Darah bagi remaja putri
8. Konseling kesehatan bagi calon pengantin
9. Skrining kesehatan pra nikah
10. Stimulan jamban sehat
11. Kelurahan ODF (31 Kelurahan)
12. Pengadaan Obat dan BMHP
13. Penyediaan air minum
14. Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga
15. Pengadaan alat kesehatan untuk penanganan *stunting*
16. Pembentukan dan optimalisasi posyandu Remaja dalam penyampaian KIE tentang Pencegahan *Stunting*

c. Hambatan

1. Remaja
Hanya dilakukan cek hemoglobin ketika ada kasus *suspect* anemia pada remaja putri.
2. Balita
Belum dilakukan pengukuran cakupan balita gizi kurang yang diberi intervensi tambahan asupan gizi (Sebelum dan setelah)
3. Keluarga berisiko *stunting*
Belum dilaksanakan dengan sasaran anak-anak sekolah serta Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya menu beragam, bergisi, aman dan seimbang.
4. Ibu hamil
Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penundaan kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi/KB.
5. Perlindungan sosial
Perubahan regulasi di Kemensos terkait BPNT yang sebelumnya Natura/Bahan pangan menjadi Bantuan Tunai.
6. Catin/PUS
Pendaftaran nikah dilakukan kurang dari 3 bulan pra nikah dan kurangnya edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi.

8. Kabupaten Pangandaran

a. Kebijakan

1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;



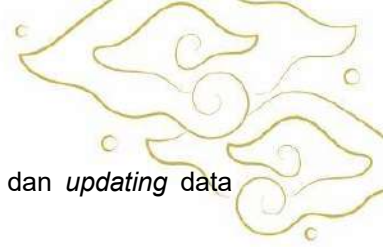
2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 68 tahun 2020 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 66 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Pangandaran Sehat;
 4. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif.
- b. Inovasi/kegiatan yang sudah dilaksanakan
1. Di Kabupaten Pangandaran sudah terbentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dari mulai tingkat desa, kecamatan dan kabupaten yang berperan mengkoordinasikan, mengsinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor baik di tingkat desa, kecamatan, maupun tingkat kabupaten.
 2. Telah dilaksanakan intervensi spesifik dan intervensi sensitif melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh OPD, hal tersebut tentunya ditempuh untuk mencapai target percepatan penurunan stunting di Tahun 2024 baik melalui pencegahan maupun penanganan
 3. Terdapat inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Desa, Puskesmas maupun Tingkat Kabupaten untuk percepatan penurunan *stunting*.
- c. Hambatan
1. Di tingkat lapangan berbagai kegiatan yang terkait dengan penanganan *stunting* belum terpadu, sehingga soliditas koordinasi dalam melaksanakan intervensi di lapangan masih berproses.
 2. Anggaran belum terpusat dalam pencegahan dan penanganan *stunting*. Hal tersebut dikarenakan pemenuhan kebutuhan sumber dana untuk pencegahan dan penanganan *stunting* belum optimal.
 3. Pada kasus stunting yang tidak disertai penyakit penyerta tidak dapat dirujuk ke rumah sakit, hal tersebut tentunya menjadi kendala dalam penanganan *stunting*.

9. Kabupaten Bandung

- a. Kebijakan
- Strategi penurunan stunting diturunkan dari isu strategis pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang kemudian diturunkan di Misi 2, yaitu “Menyediakan layanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas dan merata”.
- b. Inovasi
1. BUNGA DESA (Bupati Ngamumule Desa)
Program inovatif Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan pembangunan dan layanan publik di desa meliputi penyerapan aspirasi, sosialisasi, komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat desa, pembinaan dan pengawasan proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih baik, partisipatif dan kolaboratif dengan pendekatan pentahelix sebagai wujud pemerintah daerah mengurus desa.
 2. GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)
Program rutin Kabupaten Bandung yang mengkampanyekan gerakan makan ikan di masyarakat.
 3. Pemberian Tablet Tambah Darah kepada Remaja Putri.
Ketua TP PKK Kabupaten Bandung Hj. Emma Dety Dadang Supriatna memberikan edukasi kepada sejumlah remaja putri yang masih duduk di kelas 7-9 SMP untuk mencegah anemia pada remaja putri.
 4. GEKKSOR (Gerakan Konsumsi Sayuran, Susu dan Telor)
Inovasi yang diusung oleh Kabupaten Bandung berupa bantuan paket sayuran, susu, dan telur yang diberikan kepada anak balita, ibu hamil, dan ibu bersalin. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pembagian paket sebanyak 10.500 paket ke 53 desa oleh Hj. Emma Dety Dadang Supriatna selaku Ketua Harian TPPS Kabupaten Bandung.
 5. Simpul Pangan
Merupakan inovasi yang bertujuan untuk menguatkan ketahanan Pangan Keluarga dan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan keberdayaan masyarakat (Kader PKK, Kelompok Wanita Tani, Desa, dan Komunitas masyarakat) berbasis sumber daya lokal,



6. BEDAS SAPUJAGAT (Berencana Dewasakan Anak Agar Sejahtera Sinergitas Akselerasi Pendewasaan Usia Kawin Terjaga, Keluarga Sehat)
Merupakan strategi kolaborasi dan integrasi penanganan permasalahan perkawinan usia anak yang melibatkan berbagai stakeholders.
 7. DAGADU GIBANG (Dalam Gambar Edukasi Gizi Seimbang)
Merupakan inisiasi nutrisisionis Puskesmas Panca untuk meningkatkan pengetahuan asupan gizi seimbang Ibu Hamil dan Ibu Baduta sebagai upaya pencegahan *stunting* di wilayah kerja Puskesmas Panca
 8. OPAK SIMPING (Inovasi Puskesmas Banjaran: Olahan Pangan Lokal Atasi Permasalahan *Stunting*)
Inovasi yang diinisiasi oleh Puskesmas Banjaran Kota berupa Kader posyandu membagikan PMT penyuluhan dari bahan pangan lokal sekaligus berbagi resep olahannya melalui penyuluhan kepada ibu balita.
 9. KATRESNA (Kader Terampil atasi *Stunting* pada Anak)
Inovasi yang diusung oleh Pokja PKK kabupaten Bandung dalam rangka peningkatan kapasitas kader PKK melalui kegiatan pelatihan dengan berbagai materi seputar *stunting* mulai dari definisi, penyebab dan upaya pencegahan serta penanganan *stunting* dan cara penimbangan balita yang baik dan benar.
 10. Ruang Riung Ceria
Ruang Riung Ceria adalah suatu kegiatan yang merupakan inovasi berbasis komunitas bertujuan melindungi 1000 Hari Pertama Kehidupan sehingga dapat terhindar dari risiko *stunting*.
 11. Circular Economy Model Desa Cibiru Wetan
Desa Cibiru Wetan merupakan Desa yang berhasil mengembangkan konsep *circular economy* untuk meningkatkan mencapai kedaulatan pangan mandiri untuk mendukung percepatan penurunan *stunting*.
 12. Pemberian Bahan Pangan dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPPD)
Cadangan pangan pemerintah daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah. Bahan pangan yang yang disalurkan bagi keluarga resiko *stunting*/balita *stunting*/Ibu hamil berupa beras premium, beras nutrizink/fortivit, Daging ayam, Ikan, Minyak Goreng dan Daging sapi.
- c. Hambatan
1. Koordinasi antar bidang dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bandung belum optimal.
 2. Pelaksanaan monev belum dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa hingga kabupaten.
 3. Pemahaman Tim Pendamping Keluarga (TPK) belum merata dikarenakan adanya pergantian personel TPK.
 4. Belum terbentuknya bank data dalam intervensi sasaran.
 5. Belum meratanya penafsiran perangkat daerah terhadap kebijakan mengenai *tagging* sub kegiatan yang digunakan untuk intervensi *stunting*.
 6. Belum semua sub kegiatan intervensi *stunting* pada tingkat daerah terakomodir dalam aplikasi Aksi Bangsa Kemendagri.
 7. Belum optimalnya pemahaman dan pengawasan masyarakat terkait konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD), proses menyusui, pemberian MP-ASI yang adekuat.
 8. Banyak anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap karena kondisi kesehatan anak.
 9. Dukungan lintas sector belum maksimal dalam hal edukasi dan promosi dalam rangka pembinaan kader di desa, kecamatan dalam hal pemberian imunisasi bagi sasaran.
 10. Keterampilan kader posyandu dalam melakukan pemantauan pertumbuhan belum merata.
 11. Keterbatasan petugas dan tenaga kesehatan yang terlatih.
 12. Pemahaman ibu hamil tentang pentingnya mengatur jarak kehamilan belum merata.
 13. Penerima bantuan sosial belum tepat sasaran.
 14. Bimbingan perkawinan untuk catin yang bekerja, belum maksimal.
 15. Kapasitas kader BKP dan TPG belum merata terkait pengasuhan 1000 HPK.



16. Belum optimalnya updating data balita *stunting*, *updating* data ibu hamil dan *updating* data keluarga yang beresiko *stunting*.
17. Kebutuhan lahan untuk pembangunan MCK komunal.

10. Kabupaten Sukabumi

a. Kebijakan

1. Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) tingkat Kabupaten Sukabumi dengan keputusan bupati sukabumi nomor 440/kep.311-dinkes/2022.
2. Membentuk tim percepatan penurunan *stunting* kecamatan se-Kabupaten Sukabumi dengan keputusan ketua pelaksana tim percepatan penurunan *stunting* Kabupaten Sukabumi nomor: ks.14.00/3110/dppkb/2022.
3. Membentuk tim audit kasus *stunting* kabupaten sukabumi dengan keputusan ketua pelaksana tim percepatan penurunan *stunting* kabupaten sukabumi nomor: pa.04/665-sekret/2022.
4. Mendorong Peran Pentahelix (Perusahaan, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat) Untuk Berpartisipasi Dalam Aksi Sinergi Penanganan *Stunting* Dengan Surat Edaran Bupati Sukabumi Nomor 400.2.5/3269/Bappelitbangda/2023.
5. Mencanangkan program anak asuh *stunting* dengan mengeluarkan surat himbauan bupati sukabumi nomor 400.2.5/7075/bappelitbangda/2023.

b. Hambatan

1. Pengadaan antropometri yang belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan jumlah puskesmas.
2. Tidak terintegrasinya sistem pelaporan penyelenggaraan PPS.
3. Masih terdapat keluarga berisiko *stunting* yang tidak berkenan menerima pelayanan kesehatan.
4. Kesulitan pengukuran tinggi badan maupun berat badan bayi yang tantrum pada saat pengukuran.
5. Tidak standarnya alat pengukuran yang digunakan/dimiliki oleh setiap Posyandu.
6. Kesulitan jaringan dalam mengakses aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil).
7. Masih tingginya angka pernikahan di bawah umur yang telah ditentukan (pria 21 tahun, wanita 19 tahun).

11. Kabupaten Subang

a. Kebijakan

1. Instruksi Bupati No 2 Tahun 2023 tentang Verifikasi dan Validasi Data Sasaran Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Tahun 2023.
2. Keputusan Bupati Tahun 2023 tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa.
3. Komitmen Pemerintah Kabupaten Subang tentang Penerapan Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS).
4. Peraturan Bupati No 31 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Subang.

b. Inovasi atau kegiatan yang sudah dilaksanakan

1. Kamisan Stunting
Pertemuan Perangkat Daerah untuk membahas progres percepatan penurunan *stunting* yang diadakan setiap hari kamis tiap minggunya
2. TPPS Award
Bentuk penghargaan kepada TPPS TK Kecamatan & Desa/Kelurahan yang bertujuan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
3. Siber (Siswa Bertanya)
Kolaborasi antara DP2KBP3A, DISDIK, DISKOMINFO dan DINKES dalam bentuk Talk Show seputar Kesehatan Reproduksi Remaja, Germas dan Stunting pada media Radio Pemerintah



Daerah Kabupaten Subang (Benpas Radio) yang melibatkan Siswa/i SMA/SMK/MA di Kabupaten Subang.

4. Ceulirebing (Celoteh Remaja Bicara *Stunting*)

Obrolan antar remaja yang mensosialisasikan tentang kesehatan reproduksi, pernikahan dini, *bullying* dan isu yang sedang marak di kalangan remaja saat ini.

5. Aping (ASN Peduli *Stunting*)

ASN Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kabupaten Subang berperan Aktif dalam Percepatan Penurunan *Stunting* pada Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS).

6. Pepes (Perusahaan Peduli *Stunting*)

Peran atau Kontribusi Dunia Usaha dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kab. Subang.

7. Kemitraan – BRIN

Pengembangan inovasi pangan lokal berbasis sumber daya hayati di lokus Desa dengan jumlah balita *stunting* yang paling tinggi.

c. Hambatan

1. Keterbatasan SDM sehingga data hasil penimbangan berat badan di Posyandu belum dapat dilaporkan setiap bulan pada Aplikasi e-PPGBM.
2. Data antar OPD terkait *stunting* belum terintegrasi.
3. Koordinasi tentang program terkait *stunting* di tiap OPD belum optimal.
4. Verifikasi dan Validasi data Keluarga Berisiko *Stunting* belum dapat terupdate setiap bulan karena keterbatasan SDM.
5. Pemahaman terkait definisi *stunting* yang masih beragam.
6. Perangkat Daerah tertentu belum mengetahui apa tugas dan perannya dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.
7. Keterbatasan anggaran terutama yang bersumber dari APBD.
8. Intervensi *stunting* dari dana desa belum optimal karena hanya terfokus pada intervensi spesifik (Pemberian PMT).
9. Kurang optimalnya pelaporan pemberian PMT dari sumber lain (BAAS, Dana Desa, swadaya masyarakat dan dana CSR).
10. Banyaknya ibu bekerja di masa menyusui secara Eksklusif.
11. Alur rujukan kasus *stunting* belum ada.

12. Kabupaten Bandung Barat

a. Kebijakan

Optimalisasi Impelentasi Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bandung Barat.

b. Kegiatan yang sudah dilaksanakan

1. Pemenuhan Antropometri Kit terstandar untuk seluruh Posyandu dan Puskesmas di Bandung Barat (2.341 Posyandu dan 32 Puskesmas).
2. Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk bayi/balita 5-59 bulan yang berisiko *stunting*.
3. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil Kurang Energi Krenis (KEK).
4. Membuka Kamus usulan DASHAT (Dapur Sehat Atasi *Stunting*) pada Musrenbang Tahun 2024 untuk Penyusunan RKPD Tahun 2025.
5. Membangun jamban sehat 220 unit di 20 Lokus *Stunting* Tahun 2024.
6. Optimalisasi kegiatan Kunjungi Catat Intervensi Cintai (KCIC) kepada Keluarga Berisiko *Stunting*.
7. Optimalisasi Impelentasi Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bandung Barat
8. Pelaksanaan Rembuk *Stunting* Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten .



9. *Emotional demonstration* (Emo Demo) terkait Pelatihan Kader Posyandu.
10. Bimbingan teknis pengembangan PAUD Holistik Integratif (HI).

c. Tantangan

1. Gap data antara prevalensi stunting berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dan data Bulan Penimbangan Balita (BPB) Dinas Kesehatan, mengingat data SSGI berasal dari survey dan tidak BNBA. Intervensi BNBA balita beresiko stunting diambil dari data BPB Dinas Kesehatan, namun perbedaan atau gap dari kedua data ini sangat besar yaitu sebesar 22,14%.
2. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah, terutama pasca adanya *Mandatory Spending*, dimana menyita banyak alokasi anggaran untuk mendukung kewajiban/mandatory bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, sehingga intervensi baik spesifik maupun sensitif belum bisa optimal.
3. Banyaknya tim pendamping lintas kementerian yang ditempatkan di daerah seperti TA BKKBN, TPK, KPM, dll. Yang mana setiap tim juga memiliki lembar pelaporan Aksi Konvergensi *Stunting* di daerah, yang belum diintegrasikan satu sama lain.

13. Kabupaten Sumedang

a. Kebijakan

1. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa. Dalam Peraturan ini di atur tentang salah satu indikator kinerja utama Kepala Desa adalah target penurunan *stunting*.
2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2023. Dalam Peraturan ini di atur tentang prioritas penggunaan dana desa salah satunya adalah penurunan *stunting*.

b. Inovasi

1. Simpati (Sistem Informasi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi)
Pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Sumedang bekerjasama dengan PT. Telkomsel membangun *platform* digital yaitu aplikasi Simpati (Sistem Informasi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi) sebagai solusi penanganan permasalahan program pencegahan *stunting* yang tidak efektif.
2. Simpati (Sistem Informasi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi)
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Sakip Desa) merupakan terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat Desa (*Good Village Governace*).
3. Simpati (Sistem Informasi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi)
Merupakan *platform* digital yang berfungsi untuk mengecek kesehatan Remaja Putri dan Ibu Hamil.

c. Hambatan

1. Perubahan Perilaku Masyarakat.
2. Konvergensi Program dan kegiatan Serta Anggaran.
3. Peningkatan Gizi dan Pangan.
4. Kualitas Data.
5. Kualitas Monitoring dan Evaluasi.

14. Kabupaten Garut

a. Kebijakan

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, telah membuat Regulasi sebagai bentuk Komitmen Pemerintah Daerah dalam Penurunan *Stunting* sesuai dengan Perpres No 72 Tahun 202.

b. Inovasi

1. Gerakan Bersama Intervensi *Stunting* Menuju Kabupaten Garut *Zero New Stunting* dengan Kegiatan T.O.S.S (Temukan, Obati, Sayangi, Balita *Stunting*).
2. Pemerintah Kabupaten Garut, melalui Dinas Kesehatan melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting salah satu prioritas sasaran yaitu ibu hamil. Selanjutnya, kegiatan ini mengakselerasi dengan inovasi MELANI (memastikan semua ibu hamil beresiko tinggi terlayani).
3. Pada ibu hamil akan dilaksanakan gerakan bumil sehat bayi sehat, sebagai upaya percepatan penurunan *stunting* yang fokus untuk mencegah terjadinya *stunting* baru atau *new stunting*.



- c. Hambatan
 1. Cakupan TTD Rematri masih rendah dikarenakan Pendistribusian TTD terhambat.
 2. Belum semua pengantin mendapatkan TTD.
 3. Belum semua calon PUS memahami pentingnya pemeriksaan Kesehatan sebelum menikah.
 4. Materi stunting belum menjadi bahan / topik wajib yang harus disampaikan ke calon pengantin.
 5. Data dan sasaran Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi PBI Jaminan Kesehatan penerima bantuan belum optimal.
 6. Kurangnya Anggaran untuk penambahan asupan gizi bagi Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK).

15. Kabupaten Kuningan

- a. Kebijakan

Dasar dalam pembentukan kelembagaan percepatan penurunan *stunting* berpedoman pada Perpres no. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
- b. Inovasi
 1. Aksi Bergizi di sekolah tingkat SMP/MTS dan SMA/MA guna meningkatkan status gizi remaja.
 2. Menggalakan program Bapak/Ibu Asuh bagi anak terindikasi *Stunting* yang ada di wilayahnya
 3. Meningkatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang Gizi dan Kesehatan Reproduksi
- c. Hambatan
 1. Komitmen, merubah perilaku, konversi program dan kegiatan termasuk anggaran, peningkatan pangan dan gizi serta data, inovasi, monitoring dan evaluasi.
 2. Perlu ada kegiatan surveilans atau pemantauan lingkungan untuk melihat keadaan masyarakat sekitar. Ini bisa dilakukan oleh pengurus RT/RW atau desa dan kelurahan, petugas kesehatan seperti bidan dan perawat, atau dengan kesadaran kita sebagai masyarakat.
 3. Diperlukan adanya sosialisasi dan evaluasi yang rutin untuk menumbuhkan kebiasaan masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan dan lahan kosong dengan tanaman sayuran atau ternak/ikan sebagai sumber gizi bagi keluarga/masyarakat.

16. Kabupaten Tasikmalaya

- a. Kebijakan

Meningkatkan Alokasi Anggaran Desa lebih dari 10% dari tahun sebelumnya (2023) (sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 77 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa)
- b. Inovasi
 1. Penguatan kolaborasi intervensi para pemangku kepentingan dilakukan secara konvergen;
 2. Perbaikan asupan gizi balita *stunting* dan pra *stunting* (balita *wasting*, *underweight* dan *weightfltering* serta ibu hamil kurang gizi) melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemanfaatan sumberdaya pekarangan, promosi peningkatan konsumsi ikan, dan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS);
 3. Percepatan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) keluarga dengan pembentukan Kampung Gerakan Masyarakat (Germas)
 4. Percepatan perubahan pola asuh baik melalui pendampingan dan konseling oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), Tenaga Kesehatan (nakes), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Pendidikan maupun Organisasi Masyarakat;
 5. Perbaikan sanitasi (jamban sehat) pada keluarga berisiko *stunting*;
 6. Perbaikan akses air bersih;
 7. Perbaikan rumah tempat tinggal;
 8. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin;
 9. Melakukan publikasi dan edukasi tentang *stunting* melalui media sosial, cetak, elektronik, dan media luar ruang.
- c. Hambatan
 1. Anemia remaja putri masih tinggi 43%.
 2. Tambahan asupan gizi belum tersedia setiap bulan.
 3. Keluarga berisiko *stunting* belum semua dapat intervensi.



4. Kurangnya pemahaman keluarga tentang pentingnya asupan gizi dan perawatan kesehatan anak.
5. Belum terpenuhinya sarana prasarana sanitasi lingkungan yang memadai.
6. Jumlah pendampingan yang dilakukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) melebihi dari data Keluarga Resiko Stunting) KRS.
7. Rujukan dalam menentukan prevalensi *stunting* masih menggunakan metode sampling.

17. Kabupaten Purwakarta

- a. Kebijakan
 1. Peraturan Bupati Nomor 191 tahun 2021 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.
 2. Peraturan Bupati Nomor 193 tahun 2021 tentang pelayanan KB di Kabupaten Purwakarta.
 3. Peraturan Bupati Nomor 202 tahun 2021 tentang kewenangan Desa dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi di tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Purwakarta
 4. Peraturan Bupati nomor 203 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Purwakarta
 5. Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2022 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Purwakarta.
- b. Hambatan
 1. Komitmen dan Keberlanjutan
 - Keterlibatan aktif kepala daerah.
 - Kapasitas dan pengetahuan Kepala Desa yang masih perlu ditingkatkan.
 2. Perubahan Perilaku Masyarakat (tradisi dan kepercayaan)
 3. Konvergensi Program dan Anggaran
 - Koordinasi antar sektor.
 - Pemanfaatan anggaran secara optimal.
 4. Peningkatan Pangan dan Gizi
 - Diversifikasi pangan.
 - Firtifikasi pangan dan suplementasi gizi.
 5. Data, Inovasi dan Monitoring
 - Keakuratan dan keterkinian data.
 - Pengembangan inovasi.
 6. Monitoring dan evaluasi yang efektif.

18. Kota Tasikmalaya

- a. Kebijakan

Arah Kebijakan:

 - Peningkatan sinergitas lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
 - Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.
 - Peningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah.
 - Peningkatan pelayanan akses sanitasi rumah tangga terutama ari minum dan air limbah yang layak.
 - Peningkatan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat
- b. Hambatan
 1. Belum memadainya Anggaran APBD Kota Tasikmalaya terutama untuk peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan pengadaan makanan tambahan.
 2. Kurangnya tenaga gizi pelaksana di setiap kelurahan, baru terpenuhi 25 orang seharusnya 69 orang (1 orang per kelurahan).
 3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang (usg, antropometri kit, hb meter).
 4. Pemenuhan dokumen administrasi kependudukan.
 5. Belum optimalnya pendampingan calon pengantin.
 6. Kurangnya sarana mobilitas tenaga lapangan.



19. Kabupaten Ciamis

- a. Kebijakan
Melaksanakan 5 Tematik Kegiatan
 1. Pendampingan TPK
 2. Minilokakarya *Stunting*
 3. Rembuk *Stunting*
 4. Audit Kasus *Stunting*
 5. Monitoring pelaporan melalui el simil
- b. Inovasi
Melaksanakan Kegiatan inovasi Perubahan dengan kegiatan “Gerakan Bersama Cegah *Stunting* Masyarakat Ciamis (Gerabah *Stunting* Manis)” yang menitik beratkan pada penanganan pada strategi kolaborasi Pentahelix, yang melibatkan Dinas terkait, Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP/Pos KB Desa dan Sub Pos KB Desa) sebagai unsur masyarakat, unsur korporasi/BUMD, unsur media (media cetak, online dan elektronik) serta unsur akademisi (Stikes Muhammadiyah Ciamis).
- c. Hambatan
 1. Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung KIE yang mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan *stunting*;
 2. Belum sinerginya kegiatan pencegahan *stunting* secara Pentahelix;
 3. Belum optimalnya penyusunan dan penerapan prosedur pelaksanaan pencegahan *stunting*.

20. Kota Bandung

- a. Kebijakan
Isu *stunting* menjadi Isu Prioritas permasalahan kota yang dalam penanganannya tertuang dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Bandung semenjak Kota Bandung dijadikan Lokus Percepatan Penanganan *Stunting* Tahun 2020 sesuai surat Menteri PPN/Bapenas Nomor B 240/M.PPN/D.5/PP.01.01/04/2019 tentang Penyampaian perluasan Lokus *Stunting* Terintegrasi Tahun 2020. Dokumen yang telah memasukan Indikator strategis percepatan penurunan *stunting* yaitu Dokumen RPJMD Perubahan 2018-2023 serta Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.. Perangkat daerah sudah memasukan Program kegiatan dan sub kegiatan terkait *stunting*.
- b. Hambatan
 1. Masih ada stigma tentang *stunting* di masyarakat sehingga menolak pemberian intervensi.
 2. Masih ada Perangkat Daerah yang sulit menurunkan target indikator hingga ke level Kelurahan.
 3. Intervensi pelaksanaan kegiatan masih PD masing masing , belum terintegrasi, sehingga kesulitan Ketika menganalisa data capaian kegiatan percepatan penurunan *stunting*.
 4. Hasil Analisa situasi *stunting* yang dilakukan dengan pengumpulan data , audit kasus *stunting* dan FGD terhadap persentase *stunting*, diperoleh permasalahan *stunting* akibat :
 - Balita yang ditimbang dan diukur masih kurang dari < 90%
 - Akurasi pengukuran yang dilakuakn kader masih kurang tepat
 - Belum seluruh kader dapat mengoprasikan aplikasi epening
 - Perilaku Hidup Sehat dalam tatanan rumah tangga (Ibu Hamil Kurang Energi Kronis, Anemia, jarak kehamilan yang berdekatan, Bayi tidak diberi ASI eksklusif, Sanitasi kurang, Rumah Tidak Layak huni, Terpapar Asap Rokok)
 - Keluarga Miskin
 - Rumah Tidak layak huni.

21. Kabupaten Indramayu

- a. Kebijakan
Memetakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ tanggal 27 November 2022 sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Menyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Indramayu Tahun 2024.
- b. Inovasi atau kegiatan yang sudah dilakukan
 1. Intervensi *stunting* melalui berbagai inovasi Puskesmas



2. Kunjungan dan Pemantauan secara berkala;
 3. Rujukan bila ada penyakit penyerta;
 4. Konseling dan penyuluhan tentang sanitasi dan masalah gizi;
 5. Pemantauan seluruh ibu hamil, pemberian PMT bumil risiko dan rujukan bumil risiko;
 6. Perencanaan rujukan persalinan di faskes
 7. Pemantauan tumbang bayi dan balita secara rutin
 8. Pemantauan bayi balita dengan status imunisasinya
 9. Rujukan bayi balita yang bermasalah
 10. Pemberian fe Rematri
- c. Hambatan
1. Jarak pendaftaran nikah terlalu dekat dengan pernikahan.
 2. Rendahnya pengetahuan ibu tentang pemberian makan pada ibu hamil, bayi dan baduta.
 3. Kurangnya pemanfaatan posyandu dalam pencegahan balita *stunting*.
 4. Masih adanya masyarakat yang belum menggunakan air bersih dan BAB sembarangan.
 5. Konsumsi nutrisi yang kurang adekuat.
 6. Belum terdaftarnya sasaran 1000 HPK beresiko untuk mendapat bantuan.
 7. Belum semua desa dan kecamatan melaksanakan rebug *stunting*.
 8. Tidak semua balita bersedia diimunisasi.
 9. Belum semua desa mengalokasikan secara proposional untuk penanganan *stunting*.
 10. Masih rendahnya keterampilan kader dalam pengukuran panjang/tinggi badan di Posyandu.
 11. Masih banyak lembaga PAUD yang belum melaksanakan PAUD Holistik Integratif.
 12. Pemahaman bahwa 80% *stunting* terjadi akibat malnutrisi kronis PASCA LAHIR dan pentingnya sistem pencegahan *stunting* pasca lahir masih perlu ditingkatkan.
 13. Belum adanya program pencegahan *stunting* pasca lahir yang tepat dan terintegrasi.
 14. Alokasi anggaran untuk intervensi nutrisi yang berdampak langsung untuk meningkatkan status gizi balita masih sangat rendah.
 15. Rendahnya konsumsi protein hewani di masyarakat Indramayu.
 16. Data yang masih tersebar dan tidak terintegrasi.
 17. Belum semua pemangku kepentingan memahami tentang masalah *stunting* dan penanggulangannya.

22. Kabupaten Bogor

- a. Kebijakan
1. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan, Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 2. Peraturan Bupati Bogor, Nomor 1 Tahun 2023, Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- b. Inovasi atau kegiatan yang sudah dilaksanakan
- Gerakan Bogor Bebas *Stunting* (Go-Best) merupakan semangat bersama yang dibangun di Kabupaten Bogor dalam mewujudkan KARSA BOGOR SEHAT, yang merupakan salah satu bagian dari RPJMD Kabupaten Bogor Periode Tahun 2018-2023.
- c. Hambatan
1. Keterbatasan Alat Ukur Antropometri Kit untuk di 101 Puskesmas dan 5.133 Posyandu, baru di akhir tahun 2023 terpenuhi seluruh kebutuhannya dengan di distribusikan sejumlah 4.662 Unit ke wilayah di bulan Januari 2024, oleh Pj Bupati Bogor sehingga Alat Ukur Antropometri sudah terpenuhi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
 2. Kemampuan Kader dalam melakukan penimbangan dan pengukuran belum optimal, sehingga di setiap tahun terus di lakukan penguatan kapasitas dalam penggunaan alat ukur yang baik dan benar.
 3. 60% Tenaga pelaksana Gizi di puskesmas adalah Tenaga BOK (adanya Keterbatasan tenaga pelaksana gizi).
 4. Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat untuk datang ke posyandu.
 5. Masih kurangnya pemahaman tentang pemantauan dan pertumbuhan balita.
 6. Belum semua balita di timbang dan di input kedalam aplikasi e-PPGBM.



23. Kota Cimahi

- a. Kebijakan
 1. SK Wali Kota Cimahi Nomor 474/Kep.1405-DP3AP2KB/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Cimahi Tahun 2022.
 2. SK Wali Kota Cimahi Nomor 476/Kep.1423-DP3AP2KB/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan Se-Kota Cimahi Tahun 2022.
 3. SK Wali Kota Cimahi Nomor 476/Kep.1420-DP3AP2KB/2022 tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Tingkat Kota Cimahi Tahun 2022.
 4. SK Wali Kota Cimahi Nomor 440/Kep.2896-Dinkes/2023 tentang Aplikasi Pemantauan Pemberian Makanan Tambahan dan Dashboard Portal Titik *Stunting* di Daerah Kota Cimahi.
 5. SK Wali Kota Cimahi Nomor 440/Kep.2903-Dinkes/2023 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Makanan Tambahan Tingkat Daerah Kota Cimahi.
- b. Inovasi atau kegiatan yang sudah dilaksanakan
 1. Aksi bergizi berupa pelibatan aksi duta genre dan Dispangan untuk sayuran hijau.
 2. Sinergitas bimbingan perkawinan.
 3. Sosialisasi dan Skrinning TORCH (*Taxoplasma gondii, rubella, cyto megalovirus, herpes simplex virus*).
 4. Aktivitas rumah pangan lestari, budi daya ikan dalam ember, dan *urban farming*.
 5. Rempug *stunting* tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.
 6. Penuntasan ODF.
- c. Hambatan
 1. Cakupan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) pada siswi sekolah/madrasah yang masih rendah.
 2. Keterbatasan SOM Tenaga Kesehatan (Tenaga Pelaksana Gizi, Bidan, Tenaga Promkes).
 3. Belum adanya sistem aplikasi percepatan penurunan *stunting* yang terintegrasi.
 4. Sistem aplikasi pelaporan gizi dan KIA yang terlalu banyak (Komdat, EPPGBM, SIGIZI, MPDN (*Maternal Perinatal Death Notification*), e-koort, SIMATNEO (Sistem Informasi Maternal & Neonatal)).
 5. Masih terbatasnya sarana gedung dan dukungan insentif kader posyandu.
 6. Keterbatasan dukungan anggaran pencegahan dan penanganan *stunting* di tingkat kelurahan dan kecamatan.
 7. Keterbatasan anggaran kegiatan sosialisasi pemanfaatan aplikasi *elsimil* (Elektronik Siap Nikah dan Hamil).
 8. Tim Pendamping Keluarga yang sering berganti personil.
 9. Keterbatasan lahan untuk sanitasi lingkungan.

24. Kota Cirebon

- a. Kebijakan

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 34 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Cirebon.
- b. Inovasi atau kegiatan yang akan dilaksanakan
 1. Peningkatan sinergitas sumber pembiayaan Penurunan *Stunting* antara alokasi APBD Kota Cirebon dengan dana transfer BOKB, dan sumber dana lainnya, termasuk pembiayaan yang berasal dari Non Pemerintah berupa *Coorporate Social Responsibility* (CSR);
 2. Peningkatan kualitas penyusunan Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan yang berkaitan dengan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 3. Sinergitas TPPS Kota Cirebon dengan TPPS Kecamatan dan TPPS Kelurahan, dengan kegiatan Rembuk *Stunting* Kota Cirebon, Mini Lokakarya Kecamatan, Rembuk *Stunting* Kecamatan, dan Rembuk *Stunting* Kelurahan;
 4. Meningkatkan kapasitas pemerintahan kelurahan dalam percepatan penurunan *stunting*;
 5. Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Penurunan *Stunting* Lintas Agama;
 6. Rapat Koordinasi TPPS Tk. Kota Cirebon;



7. Rapat Koordinasi Tk. Kecamatan;
 8. Pemantauan dan Evaluasi Per Triwulan;
 9. Rapat penilaian kinerja pemerintahan kelurahan dalam konvergensi Percepatan penurunan *Stunting*;
 10. Melaksanakan Audit Kasus *Stunting*.
- c. Hambatan
1. Intervensi Sensitif dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya masih belum optimal, terkendala oleh persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan dari K/L terkait;
 2. Pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) belum optimal, disebabkan oleh:
 - kemampuan dalam mengoperasikan *handphone*;
 - alat atau *handphone* nya yang tidak memenuhi syarat untuk pemanfaatan aplikasi Elsimil;
 - jaringannya yang tidak stabil; dan
 - Sistem aplikasi Elsimilnya yang sering eror.
 3. Kehamilan yang Tidak Diinginkan masih tinggi, karena penata laksanaannya masih belum optimal;
 4. KB Pasca Persalinan masih rendah; dan
 5. Stigma tentang *stunting* pada keluarga berisiko juga menjadi hambatan dalam melakukan pendampingan dan pemantauan.

25. Kota Bekasi

- a. Inovasi atau kegiatan yang sudah dilaksanakan
1. Menerapkan PHBS di masyarakat untuk menurunkan risiko infeksi.
 2. Penyesuaian server dan penyediaan sarana pendukung untuk aplikasi Bagasasi (Membuka jalur integrasi database dengan aplikasi pusat seperti e-PPGBM, New SIGA, dan aplikasi lainnya terkait *stunting*).
 3. Membentuk tim pengelola sistem informasi GEMA PATRIOT dan pelatihan tenaga pengelola dan operator
 4. Membentuk tim pembinaan wilayah secara komprehensif
 5. Melakukan berbagai macam koordinasi dalam pelaksanaan program melalui kegiatan Rapat lintas SKPD, Diseminasi dan Evaluasi program lintas SKPD.
 6. Melakukan kegiatan minilokakarya tingkat kecamatan untuk mendiskusikan dan membahas update kondisi kasus *stunting* di wilayah.
 7. Melakukan Pendampingan teknis terhadap kampung KB dan semua kader KB di lapangan Termasuk kader Pendamping Keluarga.
- b. Hambatan
1. Masih ada masyarakat yang menganggap bahwa *stunting* (pendek) bukan menjadi masalah sehingga pola asuh terhadap anak kurang optimal.
 2. Masih perlunya kampanye pencegahan *stunting* dengan 1.000 HPK Masih ada masyarakat yang membutuhkan penanganan segera tapi terkendala dengan system rujukan yang berjenjang. Sehingga diperlukan dukungan kebijakan, melalui penunjukan RS.
 3. Perlu peningkatan kualitas data *stunting* dan data penanganan secara terintegrasi.
 4. Belum maksimalnya pengelolaan dan pengembangan *website stunting*.
 5. Perlunya strategi pengawasan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dengan sistem bina wilayah.

26. Kota Depok

- a. Inovasi atau kegiatan yang sudah dilaksanakan
- Kampung Caraka adalah kumpulan dari berbagai program kampung dari pemerintah pusat untuk memudahkan dalam pengukuran dan penilaian keberhasilannya dengan tujuan penurunan angka *stunting*. Lokus kampung caraka adalah 1 RW dengan beberapa kegiatan yang terfokus di RW tersebut. beberapa kegiatan dalam kampung caraka adalah sebagai berikut :
1. Posyandu multi fungsi digital
 2. Paud HI (Holistik integratif)



3. PIK (Pusat Informasi Remaja)
 4. RW Ramah anak
 5. Kampung Keluarga berkualitas
 6. Pekarangan Pangan Lestari
 7. Posbindu
 8. Program Kampung Iklim (Proklim)
- b. Hambatan
1. Tingginya migrasi penduduk di kota Depok dari luar ke dalam Kota Depok cukup menyulitkan dalam memonitor keluarga beresiko *stunting*, angka pindah datang penduduk 45.132 jiwa.
 2. Permasalahan terkait pola asuh orang tua yang keduanya bekerja berdasarkan hasil audit *stunting* beberapa kasus *stunting* bukan karena faktor ekonomi.
 3. Hasil audit kasus *stunting* dan Evaluasi KTR menunjukkan sebagian besar sample yang di audit /evaluasi terhadap Keluarga yang memiliki Balita *Stunting* ternyata dari keluarga perokok.
 4. Tingginya Angka Kelahiran dalam 1 tahun yaitu 43.673 kelahiran.
 5. Masih kurangnya cakupan Rematri yang mengonsumsi TTD sehingga perlu adanya pemantauan langsung dan menyeluruh, Pemerintah Kota Depok telah bekerjasama dengan Kementerian Agama tetapi implementasi pemantauan Rematri mengonsumsi TTD di madrasah belum maksimal.
 6. Masih kurangnya pemahaman orang tua dalam Penerapan pemberian PMBA yang sesuai standar.
 7. Masih terdapat masyarakat yang kurang memahami pentingnya penerapan PHBS.
 8. Pemanfaatan PMT lokal yang berasal dari pekarangan rumah yang masih harus di kembangkan dengan kondisi Kota Depok yang jarang memiliki lahan yang luas dimana PMT lokal ini diberikan bagi balita *stunting* maupun Ibu hamil KEK.
 9. Masih terdapat Bumil yang belum mengonsumsi TTD sesuai standar sehingga menjadi Bumil KEK.

27. Kabupaten Karawang

- a. Kebijakan
1. Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2019. Tentang Percepatan Pencegahan Dan Penanganan *Stunting*;
 2. Keputusan Bupati Karawang Nomor 147/Kep.184–Huk/2022 tanggal 28 Februari 2022. Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Karawang;
 3. Peraturan Bupati Karawang Nomor 18 Tahun 2022. Tentang Pedoman Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru lahir serta Pelayanan KB Pasca Persalinan;
- b. Inovasi atau kegiatan yang sudah dilaksanakan
1. Pelaksanaan PMT dengan pemberian makanan pangan lokal (nasi, lauk pauk, sayuran dan buah) ataupun susu khusus melalui kegiatan BAAS, DASHAT, POS GIZI serta Kegiatan Posyandu.
 2. Pemodelan Pentahelix Desa/ Kelurahan Tangkas (Tangginas Ngarojong Kesehatan) dengan melibatkan Pemerintah, Swasta, Masyarakat, Media dan akademisi Kegiatan Pos Terintegrasi.
 3. Pendampingan kepada sasaran meliputi penyuluhan, fasilitasi, pelayanan rujukan serta fasilitasi penerimaan program bantuan sosial dan mendeteksi dini faktor risiko *stunting*.
 4. Strategi dalam komunikasi untuk perubahan perilaku dalam percepatan penurunan *stunting* melalui ABC dengan 7 Gerakan Cegah *stunting*: A-B-C-D-E-F-G.
 5. Pelaksanaan Rutilahu dan Sanitasi di Kabupaten untuk sasaran Keluarga Berisiko *Stunting* dan kasus *stunting* sudah mulai terlaksana.

28. Kabupaten Cianjur

- a. Kebijakan
1. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan *Stunting* serta Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat;
 2. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Intervensi Spesifik dan Sensitif dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
 3. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 115 Tahun 2022 tentang Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa sesuai dengan Kewenangan Desa.



b. Inovasi

Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Cianjur melalui gerakan Bapak Asuh Anak *Stunting* (GEBRAK ROASTING) yaitu Gerakan yang digagas untuk melibatkan seluruh pihak baik dari aparat pemerintah, tokoh masyarakat, maupun para pengusaha yang mau bekerja sama secara sukarela menjadi donatur dalam memberikan bantuan penanganan dan pencegahan *stunting* di Kecamatan Kabupaten Cianjur bertujuan untuk membantu anak-anak yang masuk kriteria *stunting* untuk mendapatkan pemenuhan gizi, pendampingan kesehatan, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak didapatkan dari keluarga inti dikarenakan faktor ekonomi, dimana gerakan ini dilaksanakan secara sukarela, dan dilandasi oleh semangat kegotongroyongan.

c. Tantangan dan Hambatan

1. Perlu adanya Peraturan Bupati terkait target angka prevalensi *stunting* lima tahunan yang saat ini telah ditetapkan dengan perbup Renstra SKPD.
2. Perlunya peningkatan peran TPPS kecamatan dan TPPS desa melalui pelaksanaan 8 aksi konvergensi *stunting*.
3. Perlunya peningkatan peran lintas sektor dan pelaku program dalam aksi peduli penganggaran dalam penurunan *stunting*.
4. Perlunya peningkatan peranan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan dalam program percepatan dan penurunan *stunting* melalui kolaborasi penanganan sensitif dan spesifik.



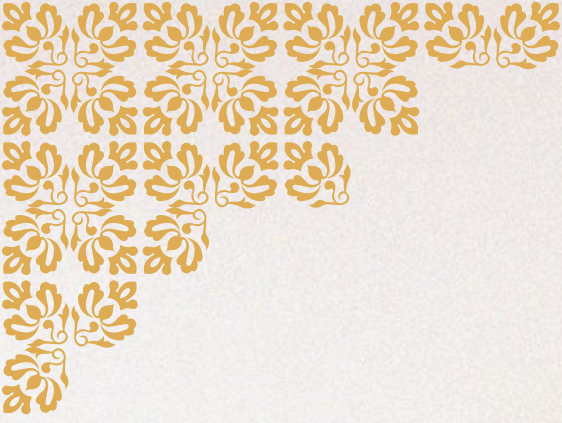
LAMPIRAN

LAPORAN GFS STRATEGIS

Tahun 2023 *Preliminary*

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat





LAMPIRAN I

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH PUSAT, DAN PEMERINTAH DAERAH
KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA
BARAT TAHUN 2023 *PRELIMINARY*



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

Per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023
A. PENDAPATAN KONSOLIDASI	176.851.448.919.984
Pendapatan Perpajakan konsolidasi	156.263.026.846.045
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	154.950.201.830.341
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	1.312.825.015.704
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	20.471.144.910.241
Pendapatan Sumber Daya Alam	
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	1.010.980.249.629
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	6.428.923.947.979
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	1.102.126.440.193
Bantuan Keuangan - LRA	1.328.756.389.339
Pendapatan Badan Layanan Umum	10.600.357.883.101
Pendapatan hibah	117.277.163.698
Pendapatan hibah dalam negeri	117.277.163.698
Pendapatan hibah luar negeri	
B. Belanja	172.573.341.339.408
Belanja pegawai	59.306.392.282.329
Belanja gaji dan tunjangan	54.413.712.920.125
Belanja honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan belanja pegawai transit	3.074.780.051.087
Belanja kontribusi sosial	1.817.899.311.117
Belanja barang dan jasa	56.782.167.817.514
Belanja barang	15.304.794.098.407
Belanja Jasa	16.716.335.803.744
Belanja Pemeliharaan	4.174.620.634.273
Belanja Perjalanan Dinas	3.966.230.488.375
Belanja Badan Layanan Umum (BLU)	2.825.779.842.562
Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pemda	11.080.144.080.728
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	2.714.262.869.425
Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden	
Belanja Modal	27.784.862.781.294
Belanja Modal Tanah	652.054.540.163
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.171.827.694.702
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.020.788.888.410
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.458.001.346.355
Belanja Modal Lainnya	803.946.835.836
Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)	678.243.475.828
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	47.074.280.825
Belanja Pembayaran Bunga Utang	47.074.280.825
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara	
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption	
Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara	
Belanja Denda	
Belanja Subsidi	25.417.188.637
Belanja Subsidi Perusahaan Negara	25.417.188.637
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	
Belanja Hibah	6.764.787.352.242
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	964.232.199.014
Belanja Hibah Lainnya	5.800.555.153.228
Belanja Bantuan Sosial	916.975.760.085
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	13.823.354.869
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	

Uraian

31 Desember 2023

Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	40.654.200.000
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	862.498.205.216
Belanja Lain-lain	327.292.185.523
Belanja Lain-lain	327.292.185.523
C. BELANJA TRANSFER	20.618.371.690.959
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	11.517.421.410.507
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1.035.273.204.307
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	971.821.725.781
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	63.451.478.526
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	10.482.148.206.200
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	78.949.050.000
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	10.403.199.156.200
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	
Transfer Dana Otonomi Khusus	
Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah Dan Dana Desa	9.100.950.280.452
Dana Bagi Hasil	
Dana Bagi Hasil Pajak	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
Dana Bagi Hasil Cukai	
Dana Alokasi Umum	
Dana Alokasi Umum	
Dana Alokasi Khusus Fisik	
Dana Alokasi Khusus Fisik	
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana Insentif Daerah	90.761.414.500
Dana Otonomi Khusus	
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
Dana Insentif Daerah	90.761.414.500
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	8.901.679.139.802
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	8.901.679.139.802
Hibah ke Daerah	
Hibah ke Daerah	
Dana Desa	108.509.726.150
Dana Desa	108.509.726.150
D. Surplus (Defisit) Anggaran (A-B-C)	4.278.107.580.576
E. Pembiayaan	7.461.529.334.148
Penerimaan Pembiayaan	9.637.751.728.081
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	9.637.751.728.081
Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	
Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri	
Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri	
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	
Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	
Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	
Pengeluaran Pembiayaan	2.176.222.393.933
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	1.550.194.671.933
Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	
Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali	
Penyertaan Modal Negara	626.027.722.000
RDI/RPD	
Dukungan Infrastruktur	
Pengeluaran Investasi Pemerintah	
Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	
Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	
Suspense Pembiayaan	
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+C)	11.739.636.914.724

**LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL	83.115.710.401.751
Pendapatan Operasional-LO	273.984.708.297.382
Pendapatan perpajakan-LO	182.448.272.596.011
Pendapatan pajak dalam negeri-LO	181.157.486.935.605
Pendapatan pajak perdagangan internasional-LO	1.290.785.660.406
Pendapatan bukan pajak-LO	14.029.103.027.804
Pendapatan sumber daya alam-LO	
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	1.010.980.249.629
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya - LO	13.018.122.778.175
Pendapatan Transfer - LO	2.904.437.847.295
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	1.102.126.440.193
Bantuan Keuangan - LO	1.802.311.407.102
Pendapatan BLU-LO	3.422.007.306.198
Pendapatan Jasa BLU - LO	3.169.960.566.758
Pendapatan Hibah BLU - LO	69.513.247.916
Pendapatan Lainnya BLU - LO	182.533.491.524
Pendapatan hibah-LO	182.889.703.845
Pendapatan hibah dalam negeri dan luar negeri-LO	182.889.703.845
Pendapatan lainnya-LO	70.997.997.816.229
Pendapatan lainnya Pemda	
Pendapatan Penyesuaian Akrual	25.481.355.287
Sub Total Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	70.972.516.460.942
Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	70.972.516.460.942
Beban Operasional	164.126.640.701.632
Beban pegawai	60.320.860.436.938
Beban gaji dan tunjangan	57.132.153.665.983
Beban honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan Beban pegawai transitio	3.188.706.770.955
Beban kontribusi sosial	
Beban persediaan	3.099.889.344.829
Beban barang dan jasa	55.274.807.334.186
Beban barang	26.126.760.360.620
Beban jasa	16.747.868.271.118
Beban pemeliharaan	4.396.318.093.078
Beban perjalanan dinas	4.067.004.972.568
Beban BLU/BLUD	928.937.415.564
Beban barang untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pemda/pihak ketiga	3.007.918.221.238
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden	
Beban bunga	47.074.280.825
Beban Pembayaran Bunga Utang	47.074.280.825
Beban Pembayaran Discount Surat Utang Negara	
Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption	
Beban Denda	
Beban subsidi	25.417.188.637
Beban subsidi kepada perusahaan publik	25.417.188.637
Beban subsidi kepada perusahaan swasta	
Beban Subsidi - Estimasi	
Beban hibah	6.764.787.352.242
Beban hibah kepada pemerintah negara lain	
Beban hibah kepada organisasi internasional	

Uraian

31 Desember 2023

Beban hibah kepada pemerintah daerah	964.232.199.014
Beban Hibah Lainnya	5.800.555.153.228
Beban bantuan sosial	919.456.362.499
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	14.480.961.039
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	1.822.996.244
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	40.654.200.000
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	862.498.205.216
Beban lain-lain/beban tidak terduga	
Beban Lain-lain	
Beban akrual lainnya	10.931.991.207.477
Beban Penyusutan Aset Tetap	10.247.778.203.319
Beban Penyusutan Aset Lainnya/Amortisasi Aset Lainnya	241.993.188.052
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	442.219.816.106
BEBAN TRANSFER	26.742.357.193.999
Transfer Pempus Ke Daerah Dan Dana Desa	15.224.935.783.492
Dana Bagi Hasil	
Dana Bagi Hasil Pajak	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
Dana Bagi Hasil Cukai	
Dana Alokasi Umum	
Dana Alokasi Umum	
Dana Alokasi Khusus Fisik	
Dana Alokasi Khusus Fisik	
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana Insentif Daerah	90.761.414.500
Dana Otonomi Khusus	
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
Dana Insentif Daerah	90.761.414.500
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	8.901.679.139.802
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	8.901.679.139.802
Hibah ke Daerah	
Hibah ke Daerah	
Dana Desa	6.232.495.229.190
Dana Desa	6.232.495.229.190
Beban Transfer Lain-lain	
Beban Suspense Transfer	
BEBAN TRANSFER PEMDA	11.517.421.410.507
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	971.821.725.781
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	63.451.478.526
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah dan Partai Politik	78.949.050.000
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	10.403.199.156.200
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	109.858.067.595.750
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS SELISIH KURS BELUM TEREALISASI	46.323.963.244
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PELEPASAN ASET NON LANCAR	(206.863.681.341)
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	617.675.957.101
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENJUALAN ASET NON LANCAR	
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	457.136.239.004
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	110.315.203.834.754
SURPLUS (DEFISIT) LO	110.315.203.834.754

NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
PER 31 DESEMBER 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023
Aset	934.812.565.523.233
Aset lancar	94.107.435.065.405
Kas dan setara kas	60.013.584.811.073
Uang muka rekening BUN-khusus pusat	
Investasi jangka pendek	698.529.365.834
Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja	160.081.257.760
Piutang	16.606.675.923.507
Piutang Perpajakan	13.883.290.265.145
Piutang Bukan Pajak	11.189.860.589.952
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	54.314.689.172
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	2.832.303.774
Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman	
Piutang lain-lain	675.073.456.836
Penyisihan piutang tak tertagih	(9.198.695.381.371)
Persediaan	16.628.563.707.230
Piutang PFK	
Investasi jangka panjang	23.105.882.074.169
Investasi jangka panjang non permanen	99.643.939.540
Investasi jangka panjang permanen	23.006.238.134.629
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	
Aset tetap	806.645.948.019.259
Tanah	497.768.103.090.676
Peralatan dan mesin	113.892.423.750.287
Gedung dan bangunan	109.364.260.531.468
Jalan, irigasi, dan jaringan	190.763.654.851.820
Aset tetap lainnya	8.224.252.743.297
Konstruksi dalam pengerjaan	18.955.727.626.116
Konsesi Jasa	81.295.583.448.352
Akumulasi penyusutan	(213.618.068.693.108)
Aset Tetap Yang Belum Diregister	10.670.350
Properti Investasi	858.195.306.396
Dana cadangan	295.171.110.113
Dana cadangan	295.171.110.113
Piutang jangka panjang	47.027.274.095
Tagihan piutang penjualan angsuran	4.584.295.239
Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi	43.391.808.461
Piutang jangka panjang kredit pemerintah	
Piutang jangka panjang lainnya	4.093.302.213
Penyisihan piutang jangka panjang	(5.042.131.818)
Aset lainnya	9.752.906.673.796
Kemitraan dengan pihak ketiga	2.328.960.219.350
Aset tidak berwujud	3.370.696.994.184
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	557.693.647.455
Dana Penjaminan	
Dana Kelolaan BLU	
Aset lain-lain	7.803.418.006.648
Aset Lainnya Dari Unit Pemerintah Lainnya	
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman	
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(4.307.862.193.842)
Kewajiban / Utang	76.365.117.456.762
Kewajiban jangka pendek	4.951.700.643.238
Utang perhitungan pihak ketiga	59.966.631.832
Utang kepada pihak ketiga	3.369.913.403.063
Utang bunga	25.256.453.201

Uraian**31 Desember 2023**

Utang subsidi	
Utang Transfer	81.701.464.920
Bagian lancar utang jangka panjang	107.238.875.320
Utang surat perbendaharaan negara	
Utang Yang Belum Ditagihkan	15.377.350
Utang jangka pendek lainnya	1.267.928.857.550
Uang Muka	1.759.859.659
Utang Jangka Pendek Lainnya	37.919.720.343
Kewajiban jangka panjang	71.413.416.813.524
Utang jangka panjang dalam negeri	3.635.088.886.004
Utang jangka panjang luar negeri	
Kewajiban Konsesi Jasa	67.778.327.927.520
Ekuitas	858.447.448.066.471

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023
A. Pendapatan Negara dan Hibah	
I. Pendapatan Perpajakan	118.410.200.697.068
1. Pajak Dalam Negeri	117.097.375.681.364
2. Pajak Perdagangan Internasional	1.312.825.015.704
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	7.024.810.952.762
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	
3. Pendapatan Badan Layanan Umum	3.394.574.266.161
4. Pendapatan PNBP Lainnya	3.630.236.686.601
III. Pendapatan Hibah	
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	125.435.011.649.830
B. Belanja Negara	
I. Belanja Pemerintah Pusat	51.466.877.145.103
1. Belanja Pegawai	18.198.021.352.053
2. Belanja Barang	20.368.575.633.573
3. Belanja Modal	12.845.802.604.608
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	
5. Belanja Subsidi	
6. Belanja Hibah	
7. Bantuan Sosial	54.477.554.869
8. Belanja Lain-lain	
II. Transfer ke Daerah	70.972.516.460.942
1. Dana Transfer Umum	43.100.246.872.768
a. Dana Bagi Hasil	8.150.980.164.875
b. Dana Alokasi Umum	34.949.266.707.893
2. Dana Transfer Khusus	21.276.685.753.484
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	2.733.402.754.538
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	18.543.282.998.946
c. Hibah Kepada Daerah	
3. Dana Otonomi Khusus	
4. Dana Keistimewaan DIY	
5. Insentif Fiskal	363.088.605.500
6. Dana Desa	6.232.495.229.190
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	122.439.393.606.045
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	2.995.618.043.785
D. Pembiayaan	
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Netto)	
1. Rekening Pemerintah	
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	
4. Surat Berharga Negara (Neto)	
a. Penerimaan Surat Berharga Negara	
b. Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara	
5. Pinjaman dalam negeri (Neto)	
a. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	
b. Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	
6. PMN/ Dana Investasi Pemerintah	
7. Kewajiban Penjaminan	
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	
9. Pembiayaan Lain-lain	
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	

Uraian**31 Desember 2023**

a. Penarikan Pinjaman Program	
b. Penarikan Pinjaman Proyek	
2. Penerusan Pinjaman	
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)	
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran - SILPA (SIKPA) (D-C)	2.995.618.043.785

LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Pajak Penghasilan	54.199.492.117.423
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	58.254.408.746.630
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	623.647.305.543
Pendapatan Cukai	29.320.914.511.164
Pendapatan Pajak Lainnya	905.677.618.112
Pendapatan Bea Masuk	1.290.785.660.406
Pendapatan Bea Keluar	
Pendapatan Pajak Lain-lain	520.487.756
Jumlah Pendapatan Perpajakan	144.595.446.447.034
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Penerimaan Sumber Daya Alam	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN / Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3.512.688.272.907
Pendapatan Badan Layanan Umum	3.422.007.306.198
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	6.934.695.579.105
PENDAPATAN HIBAH	
Pendapatan Hibah	65.612.540.147
Jumlah Pendapatan Hibah	65.612.540.147
PENDAPATAN PENYESUAIAN	
Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	70.972.516.460.942
Jumlah Pendapatan Penyesuaian	70.972.516.460.942
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	222.568.271.027.228
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	19.212.489.506.662
Beban Persediaan	3.094.110.390.044
Beban Barang dan Jasa	9.758.017.281.048
Beban Pemeliharaan	2.182.261.845.656
Beban Perjalanan Dinas	2.078.559.394.200
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	2.117.136.170.330
Beban Bunga	
Beban Subsidi	
Beban Hibah	
Beban Bantuan Sosial	56.958.157.283
Beban Transfer	70.972.516.460.942
Beban Lain-lain	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	10.489.771.391.371
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	442.219.816.106
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	120.404.040.413.642
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	102.164.230.613.586
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	25.489.637.163
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	232.353.318.504
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(206.863.681.341)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	700.622.000.277

Uraian**31 Desember 2023**

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	36.622.079.932
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	663.999.920.345
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	457.136.239.004
POS LUAR BIASA	
Pendapatan Luar Biasa	
Beban Luar Biasa	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	
SURPLUS/(DEFISIT) LO	102.621.366.852.590

NERACA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
PER 31 DESEMBER 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas:	
Rekening Kas BUN di BI	
Rekening Pemerintah Lainnya	
Rekening Kas di KPPN	
Kas dalam Transito	
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.973.943.268
Kas di Bendahara Penerimaan	2.516.467.571
Kas Lainnya dan Setara Kas	1.282.824.753.355
Kas pada Badan Layanan Umum	2.693.230.377.660
Jumlah Kas dan Setara Kas	3.980.545.541.854
Uang Muka Dari Rekening BUN	
Investasi Jangka Pendek	
Investasi dalam Deposito	
Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara	
Investasi Jangka Pendek BLU	625.780.838.332
Bagian Lancar Investasi Non Permanen	
Investasi Jangka Pendek Lainnya	
Jumlah Investasi Jangka Pendek	625.780.838.332
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	56.888.349.358
Uang Muka Belanja (prepayment)	3.980.042.763
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	35.679.605.423
Piutang:	
Piutang Perpajakan	12.197.443.838.008
Piutang Bukan Pajak	1.281.085.279.376
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	2.832.303.774
Piutang Penerusan Pinjaman	
Bagihan Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	
Piutang dari KUN (Uang Muka yang Akan Diterima)	
Piutang dari Kegiatan BLU	293.067.753.351
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	
Piutang PFK	
Jumlah Piutang (Bruto)	13.774.429.174.509
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(3.948.169.948.970)
Jumlah Piutang (Bersih)	9.826.259.225.539
Persediaan	13.875.803.790.976
Persediaan yang Belum Diregister	(1.728.231.797)
Jumlah Aset Lancar	28.403.209.162.448
Investasi Jangka Panjang	
Investasi Non Permanen	
Dana Restrukturisasi Perbankan	
Dana Bergulir	
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)	
Investasi dalam Obligasi	
Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan	
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum	
Investasi Non Permanen Rekening Investasi BUN	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih)	
Jumlah Investasi Non Permanen	
Investasi Permanen	

Uraian

31 Desember 2023

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	
Investasi Permanen Badan Layanan Umum	
Investasi Permanen Lainnya	
Jumlah Investasi Permanen	
Jumlah Investasi Jangka Panjang	
Aset Tetap	
Tanah	384.557.206.372.428
Peralatan dan Mesin	62.062.535.734.882
Gedung dan Bangunan	35.368.369.154.700
Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.329.729.372.205
Aset Tetap Lainnya	1.530.390.417.410
Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.894.468.728.230
Tanah Belum Diregister	
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
Aset Tetap Lainnya Belum Diregister	10.670.350
Aset Konsesi Jasa	81.295.583.448.352
Jumlah Aset Tetap (Bruto)	666.038.293.898.557
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(92.206.960.671.499)
Jumlah Aset Tetap	573.831.333.227.058
Properti Investasi	
Properti Investasi	970.794.680.095
Jumlah Properti Investasi (Bruto)	970.794.680.095
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(112.599.373.699)
Jumlah Properti Investasi (Bersih)	858.195.306.396
Piutang Jangka Panjang	
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	4.243.567.008
Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	
Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah	
Piutang Jangka Panjang Subsidi	
Piutang Jangka Panjang Lainnya	4.093.302.213
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)	8.336.869.221
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	(5.042.131.818)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)	3.294.737.403
Aset Lainnya	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	435.567.316.000
Aset Tidak Berwujud	2.594.492.371.860
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	557.693.647.455
Dana Penjaminan	
Dana Kelolaan BLU	
Dana Jangka Panjang	
Aset Lain-lain	1.773.537.809.810
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman	
Aset Lainnya yang Belum Diregister	
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)	5.361.291.145.125
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.057.416.629.144)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(1.503.527.330.491)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)	2.800.347.185.490
JUMLAH ASET	605.896.379.618.795
KEWAJIBAN	
Kewajiban Jangka Pendek	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	
Utang kepada Pihak Ketiga	801.359.239.840
Utang Bunga	
Utang Subsidi	
Belanja subsidi yang masih harus dibayar	

Uraian

31 Desember 2023

Utang Transfer	81.701.464.920
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
Unamortized Discount	
Unamortized Premium	
Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek	
Unamortized Discount	
Unamortized Premium	
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	543.563.920.713
Pendapatan Diterima Dimuka	119.430.755.759
Pendapatan Yang Ditangguhkan	
Utang Kepada KUN	
Utang Kepada RPL	
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.762.722.258
Hibah Yg Belum Disahkan	
Uang Muka Rekening Khusus	
Uang Muka	
Uang Muka Dari KPPN	1.759.859.659
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.549.577.963.149
Kewajiban Jangka Panjang	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	
Unamortized Discount	
Unamortized Premium	
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	
Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	
Utang Jangka Panjang Subsidi	
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri	
Kewajiban Konsesi Jasa	
Kewajiban Konsesi Jasa	67.778.327.927.520
Jumlah Kewajiban Konsesi Jasa	67.778.327.927.520
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	67.778.327.927.520
JUMLAH KEWAJIBAN	69.327.905.890.669
EKUITAS	536.568.473.728.126
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	605.896.379.618.795

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023
PENDAPATAN - LRA	113.288.003.450.644
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	48.868.595.744.163
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	37.852.826.148.977
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	959.854.540.505
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	1.010.980.249.629
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	9.044.934.805.052
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	63.961.898.629.653
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	55.134.703.106.081
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	6.396.312.694.040
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	1.102.126.440.193
Bantuan Keuangan - LRA	1.328.756.389.339
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	457.509.076.828
Pendapatan Hibah - LRA	117.277.163.698
Dana Darurat - LRA	
Pendapatan Lainnya - LRA	340.231.913.130
BELANJA	112.013.465.211.007
BELANJA OPERASI	85.221.740.141.137
Belanja Pegawai	41.108.370.930.276
Belanja Barang dan Jasa	36.413.592.183.941
Belanja Bunga	47.074.280.825
Belanja Subsidi	25.417.188.637
Belanja Hibah	6.764.787.352.242
Belanja Bantuan Sosial	862.498.205.216
BELANJA MODAL	14.947.011.473.840
Belanja Modal Tanah	535.430.456.118
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.746.325.914.587
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.276.759.929.481
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.538.930.585.729
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	428.822.645.383
Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan	645.797.217
Belanja Modal Aset Lainnya	237.707.458.256
Belanja Modal BLUD	182.388.687.069
BELANJA TAK TERDUGA	327.292.185.523
Belanja Tak Terduga	327.292.185.523
TRANSFER	11.517.421.410.507
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1.035.273.204.307
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	971.821.725.781
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	63.451.478.526
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	10.482.148.206.200
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	78.949.050.000
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	10.403.199.156.200
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	
Transfer Dana Otonomi Khusus	
SURPLUS/DEFISIT LRA	1.274.538.239.637
PEMBIAYAAN	7.461.529.334.148
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	9.637.751.728.081
Penggunaan SiLPA	8.993.553.050.438
Pencairan Dana Cadangan	196.267.637.695
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
Pinjaman Dalam Negeri	433.366.444.220
Penerimaan Kembali Piutang	14.564.595.728

Uraian

31 Desember 2023

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	
Pinjaman Luar Negeri	
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.176.222.393.933
Pembentukan Dana Cadangan	1.002.314.765.678
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	626.027.722.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	542.879.906.255
Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	8.736.067.573.785

**LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

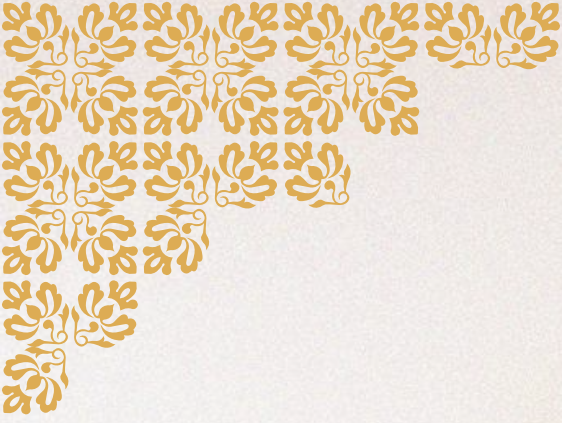
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023
PENDAPATAN - LO	107.164.017.947.604
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	48.868.595.744.163
Pendapatan Pajak Daerah - LO	37.852.826.148.977
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	959.854.540.505
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	1.010.980.249.629
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	9.044.934.805.052
PENDAPATAN TRANSFER - LO	57.837.913.126.613
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	55.134.703.106.081
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	272.327.191.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	1.102.126.440.193
Bantuan Keuangan - LO	1.328.756.389.339
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	457.509.076.828
Pendapatan Hibah - LO	117.277.163.698
Dana Darurat - LO	
Pendapatan Lainnya - LO	340.231.913.130
BEBAN	99.470.180.965.440
BEBAN OPERASI - LO	87.952.759.554.933
Beban Pegawai - LO	41.108.370.930.276
Beban Barang dan Jasa	39.144.611.597.737
Beban Bunga	47.074.280.825
Beban Subsidi	25.417.188.637
Beban Hibah	6.764.787.352.242
Beban Bantuan Sosial	862.498.205.216
Beban Penyusutan dan Amortisasi	
Beban Penyisihan Piutang	
Beban Lain-lain	
BEBAN TRANSFER	11.517.421.410.507
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	971.821.725.781
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	63.451.478.526
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	78.949.050.000
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	10.403.199.156.200
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	7.693.836.982.164
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
DEFISIT NON OPERASIONAL	
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	7.693.836.982.164
POS LUAR BIASA	
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	
Pendapatan Luar Biasa - LO	
BEBAN LUAR BIASA	
Beban Luar Biasa	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.693.836.982.164

**NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
PER 31 DESEMBER 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023
ASET	328.916.185.904.438
ASET LANCAR	65.704.225.902.957
Kas dan Setara Kas	56.033.039.269.219
Investasi Jangka Pendek	72.748.527.502
Piutang Pendapatan	11.594.621.737.713
Piutang Lainnya	437.035.913.902
Penyisihan Piutang	(5.250.525.432.401)
Beban Dibayar Dimuka	62.817.738.971
Persediaan	2.754.488.148.051
Aset Untuk Dikonsolidasikan	
INVESTASI JANGKA PANJANG	23.105.882.074.169
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	99.643.939.540
Investasi Jangka Panjang Permanen	23.006.238.134.629
ASET TETAP	232.814.614.792.201
Tanah	113.210.896.718.248
Peralatan dan Mesin	51.829.888.015.405
Gedung dan Bangunan	73.995.891.376.768
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	105.433.925.479.615
Aset Tetap Lainnya	6.693.862.325.887
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.061.258.897.886
Akumulasi Penyusutan	(121.411.108.021.609)
DANA CADANGAN	295.171.110.113
Dana Cadangan	295.171.110.113
ASET LAINNYA	6.996.292.024.998
Tagihan Jangka Panjang	43.732.536.692
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.893.392.903.350
Aset Tidak Berwujud	(970.713.611.882)
Aset Lain-lain	6.029.880.196.838
KEWAJIBAN	7.037.211.566.093
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.402.122.680.089
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	59.966.631.832
Utang Bunga	25.256.453.201
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	107.238.875.320
Pendapatan Diterima Dimuka	196.823.446.015
Utang Belanja	2.568.554.163.223
Utang Jangka Pendek Lainnya	444.283.110.499
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	3.635.088.886.004
Utang Dalam Negeri	3.635.088.886.004
Utang Jangka Panjang Lainnya	
EKUITAS	321.878.974.338.345



LAMPIRAN II

LAPORAN OPERASIONAL DAN NERACA STATISTIK
KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 *PRELIMINARY*



**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023
REVENUE	299.181.004.150.412
Taxes	156.212.102.888.429
Social contributions	
Grants	2.521.624.699.185
Other revenue	140.447.276.562.798
EXPENSE	144.788.478.558.114
Compensation of employees	60.216.819.400.239
Use of goods and services	51.773.569.797.335
Consumption of fixed capital	
Interests	47.074.280.825
Subsidies	25.417.188.637
Grants	23.084.771.731.243
Social benefits	916.975.760.085
Other expense	8.723.850.399.750
Gross operating balance (1-2+23+NOBz)	154.392.525.592.298
Net operating balance (1-2+NOBz)	154.392.525.592.298
NET TRANSACTIONS IN ASSETS AND LIABILITIES	154.392.525.592.298
Net/gross investment in nonfinancial assets	27.682.975.702.831
Fixed Assets	27.020.306.878.013
Weapon systems	5.869.364.217
Inventories	
Nonproduced assets	662.668.824.818
Net lending / borrowing (1-2+NOBz-31)	126.709.549.889.467
TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING):	
Net acquisition of financial assets [321+322+323]	126.600.036.427.432
Domestic debtors	126.600.036.427.432
External debtors	
Net incurrence of liabilities [331+332]	(109.513.462.035)
Domestic creditors	(109.513.462.035)
External creditors	
Vertical check: Difference between net lending/borrowing and financing (1-2-31=32-33-NLBz=0)	

**NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
PER 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023
NET WORTH	867.651.185.579.660
Nonfinancial assets	831.434.527.155.876
Fixed assets	316.899.503.462.988
Buildings and structures	267.716.593.901.404
Dwellings	27.779.260.844.007
Buildings other than dwellings	149.475.917.242.075
Other structures	90.461.415.815.323
Land improvements	
Machinery and equipment	33.835.801.718.180
Transport equipment	33.835.801.718.180
Machinery and equipment other than transport equipment	
Information, computer, and telecommunications (ICT) equipment	
Machinery and equipment not elsewhere classified	
Other fixed assets	15.347.107.843.404
Cultivated biological resources	
Animal resources yielding repeat products	
Tree, crop, and plant resources yielding repeat products	
Intellectual property products	15.347.107.843.404
Research and development	425.859.554.027
Mineral exploration and evaluation	
Computer software and databases	2.117.386.008.920
Entertainment, literary, and artistic originals	(1.057.416.629.144)
Other intellectual property products	13.861.278.909.601
Inventories	16.628.563.707.230
Strategic stocks	1.237.763.552
Other inventories	16.627.325.943.678
Materials and supplies	11.049.701.201.544
Work in progress	
Finished goods	
Goods for resale	5.577.624.742.134
Military inventories	
Valuables	
Nonproduced assets	497.906.459.985.658
Land	497.768.103.090.676
Mineral and energy resources	
Other naturally occurring assets	
Noncultivated biological resources	
Water resources	
Other natural resources	
Radio spectrum	
Natural resources not elsewhere classified	
Intangible nonproduced assets	138.356.894.982
Contracts, leases, and licenses	138.356.894.982
Marketable operating leases	
Permits to use natural resources	
Permits to undertake specific activities	
Entitlement to future goods and services on an exclusive basis	138.356.894.982
Goodwill and marketing assets	
Financial assets [621+622]	112.581.775.880.546
Monetary gold and SDRs	
Currency and deposits [6212+6222]	60.866.449.568.641
Debt securities [6213+6223]	725.424.777.872

Loans [6216+6226]	
Equity and investment fund shares [6215+6225]	23.078.986.662.131
Equity [62151+62251]	23.078.986.662.131
Investment fund shares [62152+62252]	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes [6216+6226]	
Nonlife insurance technical reserves [62161 +62261]	
Life insurance and annuities entitlements [62162 + 62262]	
Pension entitlements [62163 + 62263]	
Claims of pension funds on pension manager [62164 + 62264]	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes [62165 + 62265]	
Financial derivatives and employee stock options [6217+6227]	
Financial derivatives [62171 + 62271]	
Employee stock options [62172 + 62272]	
Other accounts receivable [6218+6228]	27.910.914.871.902
Trade credit and advances [62181 + 62281]	45.359.909.970
Miscellaneous other accounts receivable [62182 + 62282]	27.865.554.961.931
Domestic debtors	112.581.775.880.546
Monetary gold and SDRs	
Currency and deposits	60.866.449.568.641
Debt securities	725.424.777.872
Loans	
Equity and investment fund shares	23.078.986.662.131
Equity	23.078.986.662.131
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Life insurance and annuities entitlements	
Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	27.910.914.871.902
Trade credit and advances	45.359.909.970
Miscellaneous other accounts receivable	27.865.554.961.931
External creditors	
Monetary gold and SDRs	
Currency and deposits	
Debt securities	
Loans	
Equity and investment fund shares	
Equity	
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Life insurance and annuities entitlements	
Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	
Trade credit and advances	
Miscellaneous other accounts receivable	
Liabilities [631+632]	76.365.117.456.762

Special Drawing Rights (SDRs) [6321]	
Currency and deposits [6212+6222]	
Debt securities [6213+6223]	
Loans [6216+6226]	3.742.327.761.324
Equity and investment fund shares [6215+6225]	
Equity [62151+62251]	
Investment fund shares [62152+62252]	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes [6216+6226]	
Nonlife insurance technical reserves [62161 +62261]	
Life insurance and annuities entitlements [62162 + 62262]	
Pension entitlements [62163 + 62263]	
Claims of pension funds on pension manager [62164 + 62264]	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes [62165 + 62265]	
Financial derivatives and employee stock options [6217+6227]	
Financial derivatives [62171 + 62271]	
Employee stock options [62172 + 62272]	
Other accounts payable [6218+6228]	72.622.789.695.438
Trade credit and advances [62181 + 62281]	357.465.300.549
Miscellaneous other accounts receivable [62182 + 62282]	72.265.324.394.889
Domestic creditors	76.365.117.456.762
Currency and deposits	
Debt securities	
Loans	3.742.327.761.324
Equity and investment fund shares	
Equity	
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Life insurance and annuities entitlements	
Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	72.622.789.695.438
Trade credit and advances	357.465.300.549
Miscellaneous other accounts receivable	72.265.324.394.889
External creditors	
Special Drawing Rights (SDRs)	
Currency and deposits	
Debt securities	
Loans	
Equity and investment fund shares	
Equity	
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	
Trade credit and advances	
Miscellaneous other accounts receivable	

METADATA

INFORMASI DASAR

1. Nama Data	: Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Wilayah Tahun 2023 <i>Preliminary</i>
2. Penyelenggara Statistik	: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI
3. Alamat	: Jalan Diponegoro No. 59 Bandung
4. Nomor Telepon	: (022) 7207046
5. Nomor Faksimili	: (022) 7207048
6. Email	: papk.jabar@kemenkeu.go.id

DEFINISI DATA

Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Tingkat Wilayah merupakan laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat selama suatu periode berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan dalam menyusun laporan ekonomi dan statistik seperti Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounts – SNA*), Manual Neraca Pembayaran (*The Balance of Payments Manual*), Manual Statistik Moneter dan Keuangan (*The Monetary and Financial Statistics Manual*).

Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Kementerian Negara/Lembaga, Kuasa Bendahara Negara Tingkat Wilayah dan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Jawa Barat.

LSKP-TW merupakan konsolidasi dari kertas kerja LSKPP-TW dan Kertas Kerja LSKPDK-TW. Entitas pelaporan yang dicakup dalam Laporan ini adalah entitas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan seluruh Pemerintah Daerah.

LSKP-TW disusun terdiri dari:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah
2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah
3. Metadata Laporan Statistik Keuangan Pemerintah

CAKUPAN DATA

Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Wilayah meliputi meliputi:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Umum yang merupakan hasil konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.
2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Umum yang merupakan hasil konsolidasi Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.
3. Metadata Laporan Statistik Keuangan Pemerintah yang memuat informasi dasar, definisi data, cakupan data, tanggal *cut off*, periode publikasi, ketepatan waktu publikasi, sumber data, metodologi, integritas data dan akses data.

PERIODE PUBLIKASI

Tahun 2023 *Preliminary*

WAKTU PUBLIKASI

Data Tahun 2023 *Preliminary* diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2024.

STATUS DATA

Status Angka Sangat Sementara dengan tanda dua bintang (**) diberikan karena LKPK-TW dan LSKP-TW periode Tahun 2023 *Preliminary* disusun menggunakan angka estimasi.

SUMBER DATA

1. Kertas kerja LKDPDK-TW dan kertas kerja eliminasi LKPK-TW.
2. Aplikasi SPAN SIKRI Modul Pelaporan
3. Raw Data Pemerintah Daerah yang diambil melalui <https://linktr.ee/gfskanwil>

METODOLOGI

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah disusun dengan mengkonsolidasikan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW) dengan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW). LSKPP-TW dan LSKPDK-TW disusun dengan melakukan *mapping* BAS detail kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPDK-TW ke dalam *GFS classification assistant* yang berupa kertas kerja MS Excel yang menyediakan kerangka *mapping* masing-masing akun BAS detail ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah.

LSKPU-TW disusun melalui tiga tahapan, yaitu (1) Penyusunan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW), melalui *mapping* BAS detail data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW), (2) Penyusunan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW), melalui *mapping* BAS detail data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW); dan (3) Konsolidasian kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW menjadi Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah (LSKPU-TW).

METADATA

INTEGRITAS DATA

1. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 *Preliminary* berasal dari data Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas LKPP TW yang diunduh menggunakan SPAN SIKRI Modul Pelaporan per tanggal 16 Februari 2024 Pukul 17.42 WIB
2. Data pemerintah daerah Tahun 2023 *Preliminary* disediakan dalam bentuk raw data LRA pemerintah daerah melalui <https://linktr.ee/gfskanwil> sebanyak 28 Pemda yang diunduh pada tanggal 12 Februari 2024. Selanjutnya data tersebut diolah dan diproses melalui unggah WebADI ke dalam SIKRI Modul Pelaporan.
3. Pemutakhiran data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.

AKSES DATA

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dapat diperoleh pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Gedung Dwi Warna, Jalan Diponegoro No. 59 Bandung. Sedangkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Nasional dapat diperoleh pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat.

GFS QUESTIONNAIRE
TABLE 1

REVENUE		2023				
		Central Government a/	provincial government	Local Governments	Consolidation Column	General Government b/
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Accounting method:		Cash	Cash	Cash	Cash	Cash
1	REVENUE	247.848.915.618.712	27.774.147.901.874	96.229.688.900.820	-72.671.748.270.994	299.181.004.150.412
11	Taxes	118.359.276.739.452	20.482.098.247.591	17.370.727.901.386	0	156.212.102.888.429
111	Taxes on income, profits, and capital gain	37.349.608.892.394	0	0	0	37.349.608.892.394
1111	Payable by individuals	23.986.590.401.100	0	0	0	23.986.590.401.100
1112	Payable by corporations and other enterprises	13.363.018.491.294	0	0	0	13.363.018.491.294
1113	Other taxes on income, profits, and capital gains					
112	Taxes on payroll and workforce					
113	Taxes on property	158.101.879.614	0	9.927.509.256.420	0	10.085.611.136.034
1131	Recurrent taxes on immovable property	158.101.879.614	0	4.393.582.917.599	0	4.551.684.797.213
1132	Recurrent taxes on net wealth					
1133	Estate, inheritance, and gift taxes					
1135	Other nonrecurrent taxes on property	0	0	5.533.926.338.821	0	5.533.926.338.821
1136	Other recurrent taxes on property	0	0	0	0	0
114	Taxes on goods and services	78.690.468.768.934	20.482.098.247.591	7.443.218.644.966	0	106.615.785.661.491
1141	General taxes on goods and services	37.176.111.200.746	5.193.235.957.019	168.004.911.441	0	42.537.352.069.206
11411	Value-added taxes	34.043.664.832.530	0	0	0	34.043.664.832.530
11412	Sales taxes	3.132.446.368.216	5.193.235.957.019	168.004.911.441	0	8.493.687.236.676
11413	Turnover and other general taxes on G and S					
11414	Taxes on financial and capital transactions					
1142	Excises	30.911.330.473.000	0	0	0	30.911.330.473.000
1143	Profits of fiscal monopolies					
1144	Taxes on specific services	10.603.027.095.188	0	0	0	10.603.027.095.188
1145	Taxes on use of goods, permission to use goods or	0	15.288.862.290.572	7.275.213.733.525	0	22.564.076.024.097
11451	Motor vehicles taxes	0	15.227.019.709.387	0	0	15.227.019.709.387
11452	Other taxes on use of goods and on permission to	0	61.842.581.185	7.275.213.733.525	0	7.337.056.314.710
1146	Other taxes on goods and services					

REVENUE		2023				
		Central Government a/	provincial government	Local Governments	Consolidation Column	General Government b/
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Accounting method:</i>		<i>Cash</i>	<i>Cash</i>	<i>Cash</i>	<i>Cash</i>	<i>Cash</i>
115	Taxes on international trade and transactions	1.312.825.015.704	0	0	0	1.312.825.015.704
1151	Customs and other import duties	1.312.825.015.704	0	0	0	1.312.825.015.704
1152	Taxes on exports	0	0	0	0	0
1153	Profits of export or import monopolies					
1154	Exchange profits					
1155	Exchange taxes					
1156	Other taxes on international trade and transactions					
116	Other taxes	848.272.182.806	0	0	0	848.272.182.806
1161	Payable solely by business					
1162	Payable by other than business or unidentifiable	848.272.182.806	0	0	0	848.272.182.806
12	Social contributions	0	0	0	0	0
121	Social security contributions	0	0	0	0	0
1211	Employee contributions					
1212	Employer contributions					
1213	Self-employed or nonemployed contributions					
1214	Unallocable contributions					
122	Other social contributions	0	0	0	0	0
1221	Employee contributions					
1222	Employer contributions					
1223	Imputed contributions					
13	Grants	8.478.945.523	5.618.900.861.485	69.225.442.782.802	-72.331.197.890.625	2.521.624.699.185
131	From foreign governments	0	0	0	0	0
1311	Current	0	0	0	0	0
1312	Capital					
132	From international organizations	572.693.509	0	0	0	572.693.509
1321	Current	572.693.509	0	0	0	572.693.509
1322	Capital					
133	From other general government units	7.906.252.014	5.618.900.861.485	69.225.442.782.802	-72.331.197.890.625	2.521.052.005.676
1331	Current	7.906.252.014	5.618.900.861.485	69.225.442.782.802	-72.331.197.890.625	2.521.052.005.676
1332	Capital					

REVENUE		2023				
		Central Government a/	provincial government	Local Governments	Consolidation Column	General Government b/
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Accounting method:		Cash	Cash	Cash	Cash	Cash
14	Other revenue	129.481.159.933.737	1.673.148.792.798	9.633.518.216.632	-340.550.380.369	140.447.276.562.798
141	Property income	15.387.051.267	612.711.076.895	727.094.634.797	0	1.355.192.762.959
1411	Interest	66.536.742	78.619.950.665	250.205.511.398	0	328.891.998.805
14111	Withdrawals from income of quasi-corporations					
14112	Property income attrib to insurance policyholders	66.536.742	78.619.950.665	250.205.511.398	0	328.891.998.805
14113	Rent	0	0	0	0	0
1412	Dividends	0	534.091.126.230	476.889.123.399	0	1.010.980.249.629
1413	Withdrawals from income of quasi-corporations					
1414	Property income from investment income					
1415	Rent	15.320.514.525	0	0	0	15.320.514.525
142	Sales of goods and services	6.371.613.168.865	35.152.782.234	8.217.550.561.611	0	14.624.316.512.710
1421	Sales of market establishments	259.807.409.403	2.543.251.213	7.290.305.552.127	0	7.552.656.212.743
1422	Administrative fees	1.831.143.248.681	503.365.550	421.436.932.442	0	2.253.083.546.673
1423	Incidental sales by nonmarket establishments	4.280.662.510.781	32.106.165.471	505.808.077.042	0	4.818.576.753.294
1424	Imputed sales of goods and services					
143	Fines, penalties, and forfeits	123.686.985.266	487.422.663.693	187.375.541.655	0	798.485.190.614
144	Transfer not elsewhere classified	100.000.000	0	35.014.239.568	0	35.114.239.568
1441	Current	100.000.000	0	35.014.239.568	0	35.114.239.568
14411	Subsidies					
14412	Other	100.000.000	0	35.014.239.568	0	35.114.239.568
1442	Capital					
145	Premiums, fees, and claims related to nonlife	122.970.372.728.339	537.862.269.976	466.483.239.001	-340.550.380.369	123.634.167.856.947
1451	Premiums, fees, and current claims	0	0	0	0	0
14511	Premiums					
14512	Fees for standardized guarantee schemes					
14513	Current claims					
1452	Capital claims					

GFS QUESTIONNAIRE
TABLE 2

EXPENSES		2023				
		Central Government a/ (5)	provincial government (6)	Local Governments (7)	Consolidation Column (8)	General Government b/ (9)
Accounting method:		Cash	Cash	Cash	Cash	Cash
2	EXPENSE	109.593.591.001.437	25.695.209.453.365	82.171.426.374.306	-72.671.748.270.994	144.788.478.558.114
21	Compensation of employees	19.108.448.469.963	6.244.164.925.114	34.864.206.005.162	0	60.216.819.400.239
211	Wages and salaries	19.108.448.469.963	6.244.164.925.114	34.864.206.005.162	0	60.216.819.400.239
212	Employer's social contribution	0	0	0	0	0
2121	Actual employer's social contribution	0	0	0	0	0
2122	Imputed employer's social contribution					
22	Use of goods and services	15.359.977.613.394	4.793.673.438.383	31.619.918.745.558	0	51.773.569.797.335
23	Consumption of fixed capital	0	0	0	0	0
24	Interests	0	0	47.074.280.825	0	47.074.280.825
241	To nonresidents	0	0	0	0	0
242	To residents other than general government	0	0	47.074.280.825	0	47.074.280.825
243	To other general government units					
25	Subsidies	0	9.999.977.850	15.417.210.787	0	25.417.188.637
251	To public corporations	0	9.999.977.850	15.417.210.787	0	25.417.188.637
252	To private enterprises	0	0	0	0	0
26	Grants	70.972.516.460.942	12.598.535.418.927	12.185.468.122.368	-72.671.748.270.994	23.084.771.731.243
261	To foreign governments	0	0	0	0	0
2611	Curent	0	0	0	0	0
2612	Capital					
262	To international organizations	0	0	0	0	0
2621	Curent	0	0	0	0	0
2622	Capital					
263	To other general government units	70.972.516.460.942	12.598.535.418.927	12.185.468.122.368	-72.671.748.270.994	23.084.771.731.243
2631	Curent	70.972.516.460.942	12.598.535.418.927	12.185.468.122.368	-72.671.748.270.994	23.084.771.731.243
2632	Capital					
27	Social benefits	54.477.554.869	143.865.503.060	718.632.702.156	0	916.975.760.085

EXPENSES		2023				
		Central Government a/ (5)	provincial government (6)	Local Governments (7)	Consolidation Column (8)	General Government b/ (9)
<i>Accounting method:</i>		<i>Cash</i>	<i>Cash</i>	<i>Cash</i>	<i>Cash</i>	<i>Cash</i>
271	Social security benefits	40.654.200.000	0	0	0	40.654.200.000
272	Social assistance benefits	13.823.354.869	143.865.503.060	718.632.702.156	0	876.321.560.085
273	Employment-related social benefits					
28	Other expense	4.098.170.902.269	1.904.970.190.031	2.720.709.307.450	0	8.723.850.399.750
281	Property expense other than interest	0	0	0	0	0
2811	Dividends					
2812	Withdrawals from income of quasi-corporations					
2813	Property expense for investment income					
2815	Reinvested earnings on foreign direct investment					
282	Transfer not elsewhere classified	4.098.170.902.269	1.904.970.190.031	2.720.709.307.450	0	8.723.850.399.750
2821	Current	702.677.520.438	1.904.970.190.031	2.720.709.307.450	0	5.328.357.017.919
2822	Capital	3.395.493.381.831	0	0	0	3.395.493.381.831
283	Premiums, fees, and claims related to nonlife	0	0	0	0	0
2831	Premiums, fees, and current claims	0	0	0	0	0
28311	Premiums					
28312	Fees for standardized guarantee schemes					
28313	Current claims					
2832	Capital claims					

GFS QUESTIONNAIRE
TABLE 3

TRANSACTIONS IN ASSETS IN LIABILITIES		2023				
		Central Government a/ (5)	provincial government (6)	Local Governments (7)	Consolidation Column (8)	General Government b/ (9)
<i>Accounting method:</i>		<i>Cash</i>	<i>Cash</i>	<i>Cash</i>	<i>Cash</i>	<i>Cash</i>
3	NET TRANSACTIONS IN ASSETS AND LIABILITIES	138.255.324.617.275	2.078.938.448.509	14.058.262.526.514	-72.671.748.270.994	81.720.777.321.304
31	Net/gross investment in nonfinancial assets	12.820.312.967.445	1.609.506.554.646	13.253.156.180.740	0	27.682.975.702.831
311	Fixed Assets	12.693.074.598.745	1.595.521.066.676	12.731.711.212.592	0	27.020.306.878.013
311.1	Acquisitions: fixed assets	12.718.564.235.908	1.616.446.400.326	12.795.134.617.396	0	27.130.145.253.630
311.2	Disposals: fixed assets	25.489.637.163	20.925.333.650	63.423.404.804	0	109.838.375.617
311.3	Consumption of fixed capital (CFC): fixed assets	0	0	0	0	0
3111	Buildings and structures	10.776.169.197.410	1.067.494.774.851	8.748.195.740.359	0	20.591.859.712.620
3111.1	Acquisitions: buildings and structures	10.777.195.713.319	1.067.494.774.851	8.748.195.740.359	0	20.592.886.228.529
3111.2	Disposals: buildings and structures	1.026.515.909	0	0	0	1.026.515.909
3111.3	CFC: buildings and structures	0	0	0	0	0
31111	Dwellings	1.451.054.015.637	355.990.821.783	3.650.154.837.074	0	5.457.199.674.494
31111.1	Acquisitions: Dwellings	1.451.054.015.637	355.990.821.783	3.650.154.837.074	0	5.457.199.674.494
31111.2	Disposals: Dwellings					
31111.3	CFC: Dwellings	0	0	0	0	0
31112	Building other than dwellings	291.948.427.383	0	0	0	291.948.427.383
31112.1	Acquisitions: Building other than dwellings	292.974.943.292	0	0	0	292.974.943.292
31112.3	Disposal: Building other than dwellings	1.026.515.909	0	0	0	1.026.515.909
31112.3	CFC: Building other than dwellings	0	0	0	0	0
31113	Other structures	9.033.166.754.390	711.503.953.068	5.098.040.903.285	0	14.842.711.610.743
31113.1	Acquisitions: Other structures	9.033.166.754.390	711.503.953.068	5.098.040.903.285	0	14.842.711.610.743
31113.2	Disposals: Other structures	0	0	0	0	0
31113.3	CFC: Other structures	0	0	0	0	0
31114	Land improvements	0	0	0	0	0
31114.1	Acquisitions: Land improvements					
31114.2	Disposals: Land improvements					

TRANSACTIONS IN ASSETS IN LIABILITIES		2023				
		Central Government a/	provincial government	Local Governments	Consolidation Column	General Government b/
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Accounting method:		Cash	Cash	Cash	Cash	Cash
31114.3	CFC: Land improvements					
3112	Machinery and equipment	1.756.529.486.005	317.122.136.786	3.338.985.675.130	0	5.412.637.297.921
3112.1	Acquisitions: machinery and equipment	1.780.992.607.259	338.047.470.436	3.402.409.079.934	0	5.521.449.157.629
3112.2	Disposals: machinery and equipment	24.463.121.254	20.925.333.650	63.423.404.804	0	108.811.859.708
3112.3	CFC: machinery and equipment	0	0	0	0	0
31121	Transport equipment	1.780.992.607.259	536.363.168	490.104.449.194	0	2.271.633.419.621
31121.1	Acquisitions: Transport equipment	1.780.992.607.259	21.461.696.818	553.527.853.998	0	2.355.982.158.075
31121.2	Disposals: Transport equipment	0	20.925.333.650	63.423.404.804	0	84.348.738.454
31121.3	CFC: Transport equipment	0	0	0	0	0
31122	Other machinery and equipment	-24.463.121.254	316.585.773.618	2.848.881.225.936	0	3.141.003.878.300
31122.1	Acquisitions: Other machinery and equipment	0	316.585.773.618	2.848.881.225.936	0	3.165.466.999.554
31122.2	Disposals: Other machinery and equipment	24.463.121.254	0	0	0	24.463.121.254
31122.3	CFC: Other machinery and equipment	0	0	0	0	0
311221	Information, computer, and telecommunications	0	115.197.893.175	697.749.325.991	0	812.947.219.166
311221.1	Acquisitions: Information, computer, and	0	115.197.893.175	697.749.325.991	0	812.947.219.166
311221.2	Disposals: Information, computer, and					
311221.3	CFC: Information, computer, and					
311222	Machinery and equipment not elsewhere classified	-24.463.121.254	201.387.880.443	2.151.131.899.945	0	2.328.056.659.134
311222.1	Acquisitions: Machinery and equipment not	0	201.387.880.443	2.151.131.899.945	0	2.352.519.780.388
311222.2	Disposals: Machinery and equipment not	24.463.121.254	0	0	0	24.463.121.254
311222.3	CFC: Machinery and equipment not elsewhere	0	0	0	0	0
3113	Other fixed assets	-160.375.915.330	-210.687.036.920	-634.864.651.936	0	-1.005.927.604.186
3113.1	Acquisitions: other fixed assets	160.375.915.330	210.687.036.920	638.877.551.005	0	1.009.940.503.255
3113.2	Disposals: other fixed assets	0	0	0	0	0
3113.3	CFC: other fixed assets	0	0	0	0	0
31131	Cultivated biological resources	0	0	1.358.798.811	0	1.358.798.811
31131.1	Acquisitions: Cultivated biological resources	0	0	1.358.798.811	0	1.358.798.811
31131.2	Disposals: Cultivated biological resources	0	0	0	0	0

TRANSACTIONS IN ASSETS IN LIABILITIES		2023				
		Central Government a/	provincial government	Local Governments	Consolidation Column	General Government b/
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Accounting method:		Cash	Cash	Cash	Cash	Cash
31131.3	CFC: Cultivated biological resources	0	0	0	0	0
311311	Animal resources yielding repeat products	0	0	884.700.086	0	884.700.086
311311.1	Acquisitions: Animal resources yielding repeat	0	0	884.700.086	0	884.700.086
311311.2	Disposals: Animal resources yielding repeat					
311311.3	CFC: Animal resources yielding repeat products					
311312	Tree, crop, and plant resources yielding repeat	0	0	-474.098.725	0	-474.098.725
311312.1	Acquisitions: Tree, crop, and plant resources	0	0	474.098.725	0	474.098.725
311312.2	Disposals: Tree, crop, and plant resources					
311312.3	CFC: Tree, crop, and plant resources yielding					
31132	Intellectual property products	-160.375.915.330	-210.687.036.920	-637.518.752.194	0	-1.008.581.704.444
31132.1	Acquisitions: Intellectual property products	160.375.915.330	210.687.036.920	637.518.752.194	0	1.008.581.704.444
31132.2	Disposals: Intellectual property products	0	0	0	0	0
31132.3	CFC: Intellectual property products	0	0	0	0	0
311321	Research and development	0	0	0	0	0
311321.1	Acquisitions: Research and development					
311321.2	Disposals: Research and development					
311321.3	CFC: Research and development					
311322	Mineral exploration and evaluation	0	0	0	0	0
311322.1	Acquisitions: Mineral exploration and evaluation					
311322.2	Disposals: Mineral exploration and evaluation					
311322.3	CFC: Mineral exploration and evaluation					
311323	Computer software and database	160.375.915.330	0	0	0	160.375.915.330
311323.1	Acquisitions: Computer software and database	160.375.915.330	0	0	0	160.375.915.330
311323.2	Disposals: Computer software and database					
311323.3	CFC: Computer software and database	0	0	0	0	0
311324	Entertainment, literary, and databases	0	210.687.036.920	637.518.752.194	0	848.205.789.114
311324.1	Acquisitions: Entertainment, literary, and	0	210.687.036.920	637.518.752.194	0	848.205.789.114
311324.2	Disposals: Entertainment, literary, and					

TRANSACTIONS IN ASSETS IN LIABILITIES		2023				
		Central Government a/	provincial government	Local Governments	Consolidation Column	General Government b/
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Accounting method:		Cash	Cash	Cash	Cash	Cash
311324.3	CFC: Entertainment, literary, and databases	0	0	0	0	0
311325	Other intellectual property products	0	0	0	0	0
311325.1	Acquisitions: Other intellectual property					
311325.2	Disposals: Other intellectual property products					
311325.3	CFC: Other intellectual property products	0	0	0	0	0
31133	Costs of ownership transfer of nonproduced assets	0	0	0	0	0
31133.1	Acquisitions: Costs of ownership transfer of					
31133.2	Disposals: Costs of ownership transfer of					
31133.3	CFC: Costs of ownership transfer of nonproduced					
3114	Weapon systems	0	217.118.119	5.652.246.098	0	5.869.364.217
3114.1	Acquisitions: Weapon systems	0	217.118.119	5.652.246.098	0	5.869.364.217
3114.2	Disposals: Weapon systems					
3114.3	CFC: Weapon systems					
312	Inventories	0	0	0	0	0
3121	Strategic stocks	0	0	0	0	0
312.2	Disposal: Inventories	0	0	0	0	0
3121	Strategic stocks	0	0	0	0	0
3122	Other Inventories	0	0	0	0	0
3122.1	Acquisitions: Other Inventories	0	0	0	0	0
3122.2	Disposals: Other Inventories	0	0	0	0	0
31221	Materials and supplies	0	0	0	0	0
31221.1	Acquisitions: Materials and supplies					
31223	Finished goods					
31222	Work in progress	0	0	0	0	0
31222.1	Acquisitions: Work in progress	0	0	0	0	0
31222.2	Disposals: Work in progress					
31223	Finished goods	0	0	0	0	0
31223.1	Acquisitions: Finished goods					

TRANSACTIONS IN ASSETS IN LIABILITIES		2023				
		Central Government a/	provincial government	Local Governments	Consolidation Column	General Government b/
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Accounting method:		Cash	Cash	Cash	Cash	Cash
31223.2	Disposals: Finished goods					
31224	Goods for resale	0	0	0	0	0
31224.1	Acquisitions: Goods for resale	0	0	0	0	0
31224.2	Disposals: Goods for resale					
31225	Military inventories	0	0	0	0	0
31225.1	Acquisitions: Military inventories					
31225.2	Disposals: Military inventories					
313	Valuables	0	0	0	0	0
313.1	Acquisitions: valuables					
313.2	Disposals: valuables					
314	Nonproduced assets	127.238.368.700	13.985.487.970	521.444.968.148	0	662.668.824.818
314.1	Acquisitions: nonproduced assets	127.238.368.700	13.985.487.970	521.444.968.148	0	662.668.824.818
314.2	Disposals: nonproduced assets	0	0	0	0	0
3141	Land	127.238.368.700	13.985.487.970	521.444.968.148	0	662.668.824.818
3141.1	Acquisitions: land	127.238.368.700	13.985.487.970	521.444.968.148	0	662.668.824.818
3141.2	Disposals: land	0	0	0	0	0
3142	Mineral and energy resources	0	0	0	0	0
3142.1	Acquisitions: subsoil assets					
3142.2	Disposals: subsoil assets					
3143	Other naturally occurring assets	0	0	0	0	0
3143.1	Acquisitions: other naturally occurring assets					
3143.2	Disposals: other naturally occurring assets					
31431	Noncultivated biological resources	0	0	0	0	0
31431.1	Acquisitions: Noncultivated biological resources					
31431.2	Disposals: Noncultivated biological resources					
31432	Water resources	0	0	0	0	0
31432.1	Acquisitions: Water resources					
31432.2	Disposals: Water resources					
31433	Other natural resources	0	0	0	0	0

TRANSACTIONS IN ASSETS IN LIABILITIES		2023				
		Central Government a/	provincial government	Local Governments	Consolidation Column	General Government b/
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Accounting method:		Cash	Cash	Cash	Cash	Cash
31433.1	Acquisitions: Other natural resources	0	0	0	0	0
31433.2	Disposals: Other natural resources	0	0	0	0	0
314331	Radio spectrum	0	0	0	0	0
314331.1	Acquisitions: Radio spectrum					
314331.2	Disposals: Radio spectrum					
314332	Natural resources not elsewhere classified	0	0	0	0	0
314332.1	Acquisitions: Natural resources not elsewhere					
314332.2	Disposals: Natural resources not elsewhere					
3144	Intangible nonproduced assets	0	0	0	0	0
3144.1	Acquisitions: intangible nonproduced assets	0	0	0	0	0
3144.2	Disposals: intangible nonproduced assets	0	0	0	0	0
31441	Contracts, leases, and licenses	0	0	0	0	0
31441.1	Acquisitions: Contracts, leases, and licenses	0	0	0	0	0
31441.2	Disposals: Contracts, leases, and licenses	0	0	0	0	0
314411	MarkeTABLE operaing leases	0	0	0	0	0
314411.1	Acquisitions: MarkeTABLE operaing leases					
314411.2	Disposals: MarkeTABLE operaing leases					
314412	Permits to use natural resources	0	0	0	0	0
314412.1	Acquisitions: Permits to use natural resources					
314412.2	Disposals: Permits to use natural resources					
314413	Permits to undertake specific activities	0	0	0	0	0
314413.1	Acquisitions: Permits to undertake specific					
314413.2	Disposals: Permits to undertake specific					
314414	Entitlement to future goods and services on an	0	0	0	0	0
314414.1	Acquisitions: Entitlement to future goods and					
314414.2	Disposals: Entitlement to future goods and					
31442	Goodwill and marketing assets	0	0	0	0	0
31442.1	Acquisitions: Goodwill and marketing assets					
31442.2	Disposals: Goodwill and marketing assets					

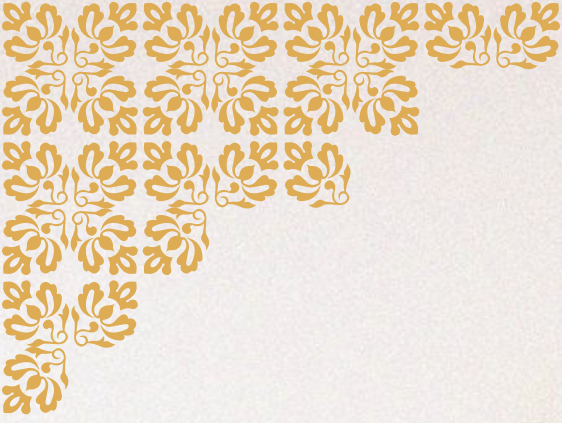
TRANSACTIONS IN ASSETS IN LIABILITIES		2023				
		Central Government a/	provincial government	Local Governments	Consolidation Column	General Government b/
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Accounting method:		Cash	Cash	Cash	Cash	Cash
NLB	Net lending / borrowing (1-2+NOBz-31)	125.435.011.649.830	469.431.893.863	805.106.345.774	-72.671.748.270.994	54.037.801.618.473
	TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES					
32	Net acquisition of financial assets [321+322+323]	125.435.011.649.830	324.270.729.036	840.754.048.566	-72.671.748.270.994	53.928.288.156.438
3201	Monetary gold and SDRs	0	0	0	0	0
32011	Monetary gold					
32012	Special Drawing Rights					
3202	Currency and deposits [3212+3222]	125.435.011.649.830	161.637.729.036	386.923.922.294	-72.671.748.270.994	53.311.825.030.166
3203	Debt securities [3213 +3223]	0	0	0	0	0
3204	Loans [3214+3224]	0	0	-9.559.595.728	0	-9.559.595.728
3205	Equity and investment fund shares [3215+3225]	0	162.633.000.000	463.394.722.000	0	626.027.722.000
32051	Equity [32151+32251]	0	162.633.000.000	463.394.722.000	0	626.027.722.000
32052	Investment fund shares [32152+32252]	0	0	0	0	0
3206	Insurance, pension, and standardized guarantee	0	0	0	0	0
32061	Nonlife insurance technical reserves [32161 +32261]	0	0	0	0	0
32062	Life insurance and annuities entitlements [32162 +	0	0	0	0	0
32063	Pension entitlements [32163 + 32263]	0	0	0	0	0
32064	Claims of pension funds on pension manager	0	0	0	0	0
32065	Provisions for calls under standardized guarantee	0	0	0	0	0
3207	Financial derivatives and employee stock options	0	0	0	0	0
32071	Financial derivatives	0	0	0	0	0
32072	Employee stock options	0	0	0	0	0
3208	Other accounts receivable [3218+3228]	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000
32081	Trade credit and advances [32181 + 32281]	0	0	0	0	0
32082	Miscellaneous other accounts receivable [32182 +	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000
321	Domestic debtors	125.435.011.649.830	324.270.729.036	840.754.048.566	-72.671.748.270.994	53.928.288.156.438
3212	Currency and deposits	125.435.011.649.830	161.637.729.036	386.923.922.294	-72.671.748.270.994	53.311.825.030.166
3213	Debt securities					
3214	Loans	0	0	-9.559.595.728	0	-9.559.595.728

TRANSACTIONS IN ASSETS IN LIABILITIES		2023				
		Central Government a/	provincial government	Local Governments	Consolidation Column	General Government b/
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Accounting method:		Cash	Cash	Cash	Cash	Cash
3215	Equity and investment fund shares	0	162.633.000.000	463.394.722.000	0	626.027.722.000
32151	Equity	0	162.633.000.000	463.394.722.000	0	626.027.722.000
32152	Investment fund shares					
3216	Insurance, pension, and standardized guarantee	0	0	0	0	0
32161	Nonlife insurance technical reserves					
32162	Life insurance and annuities entitlements					
32163	Pension entitlements					
32164	Claims of pension funds on pension manager					
32165	Provisions for calls under standardized					
3217	Financial derivatives and employee stock options	0	0	0	0	0
32171	Financial derivatives					
32172	Employee stock ooptions					
3218	Other accounts receivable	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000
32181	Trade credit and advances					
32182	Miscellaneous other accounts receivable	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000
322	External debtors	0	0	0	0	0
3221	Monetary gold and SDRs					
3222	Currency and deposits					
3223	Debt securities					
3224	Loans					
3225	Equity and investment fund shares	0	0	0	0	0
32251	Equity	0	0	0	0	0
32252	Investment fund shares					
3226	Insurance, pension, and standardized guarantee	0	0	0	0	0
32261	Nonlife insurance technical reserves					
32262	Life insurance and annuities entitlements					
32263	Pension entitlements					
32264	Claims of pension funds on pension manager					
32265	Provisions for calls under standardized					

TRANSACTIONS IN ASSETS IN LIABILITIES		2023				
		Central Government a/	provincial government	Local Governments	Consolidation Column	General Government b/
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Accounting method:		Cash	Cash	Cash	Cash	Cash
3227	Financial derivatives and employee stock options	0	0	0	0	0
32271	Financial derivatives					
32272	Employee stock options					
3228	Other accounts receivable	0	0	0	0	0
32281	Trade credit and advances					
32282	Miscellaneous other accounts receivable					
33	Net incurrence of liabilities [331+332]	0	-145.161.164.827	35.647.702.792	0	-109.513.462.035
3301	Special Drawing Rights (SDRs) [3321]	0	0	0	0	0
3302	Currency and deposits [3312+3322]	0	0	0	0	0
3303	Debt securities [3313+3323]	0	0	0	0	0
3304	Loans [3314+3324]	0	-145.161.164.827	35.647.702.792	0	-109.513.462.035
3305	Equity and investment fund shares [3315+3325]	0	0	0	0	0
33051	Equity [32151+32251]	0	0	0	0	0
33052	Investment fund shares [32152+32252]	0	0	0	0	0
3306	Insurance, pension, and standardized guarantee	0	0	0	0	0
33061	Nonlife insurance technical reserves [32161 +32261]	0	0	0	0	0
33062	Life insurance and annuities entitlements [32162 +	0	0	0	0	0
33063	Pension entitlements [32163 + 32263]	0	0	0	0	0
33064	Claims of pension funds on pension manager	0	0	0	0	0
33065	Provisions for calls under standardized guarantee	0	0	0	0	0
3307	Financial derivatives and employee stock options	0	0	0	0	0
33071	Financial derivatives	0	0	0	0	0
33072	Employee stock options	0	0	0	0	0
3308	Other accounts receivable [3318+3328]	0	0	0	0	0
33081	Trade credit and advances [32181 + 32281]	0	0	0	0	0
33082	Miscellaneous other accounts receivable [32182 +	0	0	0	0	0
331	Domestic creditors	0	-145.161.164.827	35.647.702.792	0	-109.513.462.035
3312	Currency and deposits					

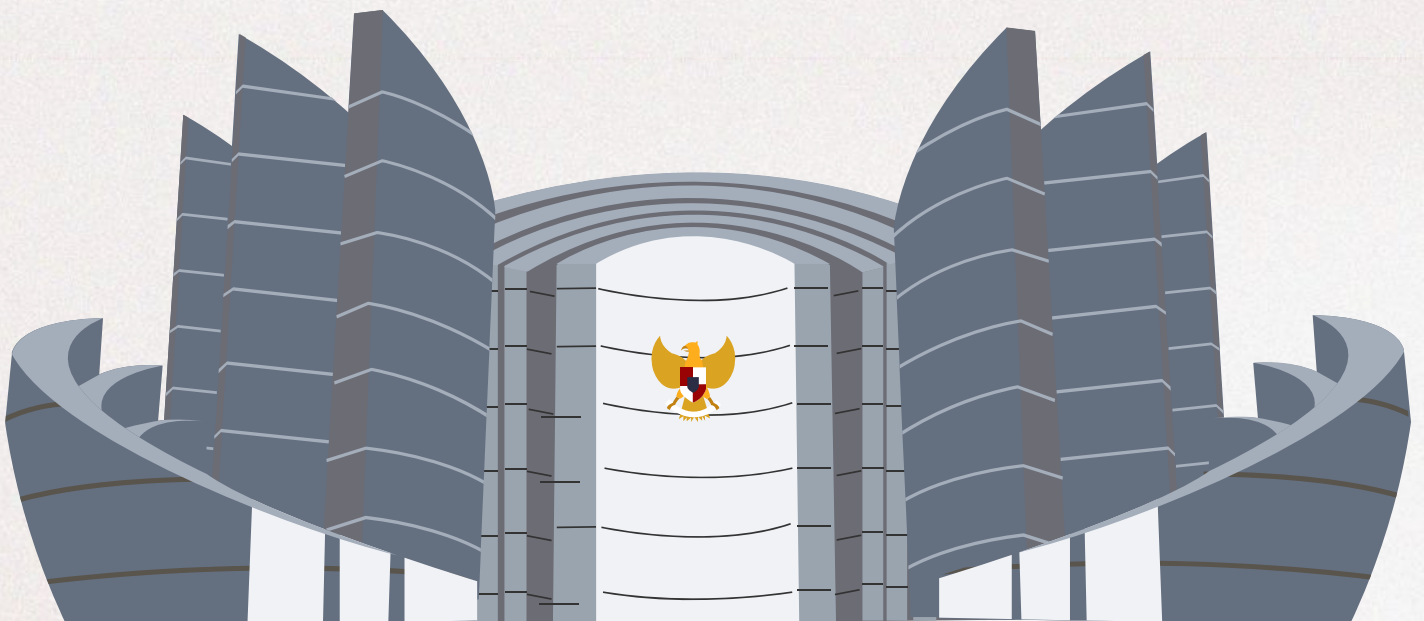
TRANSACTIONS IN ASSETS IN LIABILITIES		2023				
		Central Government a/	provincial government	Local Governments	Consolidation Column	General Government b/
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Accounting method:</i>		<i>Cash</i>	<i>Cash</i>	<i>Cash</i>	<i>Cash</i>	<i>Cash</i>
3313	Debt securities	0	0	0	0	0
3314	Loans	0	-145.161.164.827	35.647.702.792	0	-109.513.462.035
3315	Equity and investment fund shares	0	0	0	0	0
33151	Equity					
33152	Investment fund shares					
3316	Insurance, pension, and standardized guarantee	0	0	0	0	0
33161	Nonlife insurance technical reserves					
33162	Life insurance and annuities entitlements					
33163	Pension entitlements					
33164	Claims of pension funds on pension manager					
33165	Provisions for calls under standardized					
3317	Financial derivatives and employee stock options	0	0	0	0	0
33171	Financial derivatives					
33172	Employee stock ooptions					
3318	Other accounts payable	0	0	0	0	0
33181	Trade credit and advances					
33182	Miscellaneous other accounts receivable	0	0	0	0	0
332	External creditors	0	0	0	0	0
3321	Special Drawing Rights (SDRs)					
3322	Currency and deposits					
3323	Debt securities	0	0	0	0	0
3324	Loans	0	0	0	0	0
3325	Equity and investment fund shares	0	0	0	0	0
33251	Equity					
33252	Investment fund shares					
3326	Insurance, pension, and standardized guarantee	0	0	0	0	0
33261	Nonlife insurance technical reserves					
33262	Life insurance and annuities entitlements					
33263	Pension entitlements					

TRANSACTIONS IN ASSETS IN LIABILITIES		2023				
		Central Government a/ (5) Cash	provincial government (6) Cash	Local Governments (7) Cash	Consolidation Column (8) Cash	General Government b/ (9) Cash
<i>Accounting method:</i>						
33264	Claims of pension funds on pension manager					
33265	Provisions for calls under standardized					
3327	Financial derivatives and employee stock options	0	0	0	0	0
33271	Financial derivatives					
33272	Employee stock options					
3328	Other accounts payable	0	0	0	0	0
33281	Trade credit and advances					
33282	Miscellaneous other accounts receivable					



LAMPIRAN III

ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAN ANALISIS INDIKATOR
FISKAL PADA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH





**ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN
ANALISIS INDIKATOR FISKAL PADA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2023 *PRELIMINARY***

A. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah

1. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Rasio Solvabilitas Jangka Pendek	<p>Rasio Solvabilitas Jangka Pendek digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan satu tahun periode anggaran. Melalui penghitungan rasio ini diperoleh informasi kemampuan Pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya hasil analisis terhadap Rasio Solvabilitas Jangka Pendek pada LKPKD dan LKPK tingkat wilayah Provinsi Jawa Barat dapat diuraikan sebagai berikut :</p> <p>a. Rasio solvabilitas jangka pendek pada LKPKD Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 <i>Preliminary</i> yaitu sebesar 1.956 persen. Perhitungan tersebut diperoleh dari nilai aset lancar sebesar Rp65,7 triliun dibagi dengan nilai kewajiban jangka pendek sebesar Rp3,36 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Konsolidasian di tingkat LKPD memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini dikarenakan tersedianya aset lancar yang 19 kali lebih besar dari setiap utang jangka pendek pemerintah yang jatuh tempo. Selanjutnya, jika dirinci per pemda untuk rasio solvabilitas jangka pendek tertinggi tercatat pada Pemerintah Kabupaten Garut yakni dengan rasio sebesar 17.410 persen. Sedangkan Rasio Solvabilitas Jangka Pendek terendah tercatat pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan rasio sebesar 331 persen. Informasi rasio solvabilitas jangka pendek Tahun 2023 <i>Preliminary</i> per pemda disajikan pada Lampiran grafik rasio solvabilitas jangka pendek Tahun 2023 <i>Preliminary</i>.</p> <p>b. Rasio solvabilitas jangka pendek pada LKPK Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 <i>Preliminary</i> yakni sebesar 1.900,5 persen. Perhitungan tersebut berasal dari aset lancar sebesar Rp94,11 triliun dibagi dengan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp4,95 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Konsolidasian di tingkat LKPK memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini dikarenakan tersedianya aset lancar yang hampir 19 kali lebih tinggi dari setiap utang jangka pendek pemerintah yang akan jatuh tempo.</p>
2.	Rasio Solvabilitas Jangka Panjang	<p>Rasio solvabilitas jangka panjang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun periode anggaran. Melalui penghitungan rasio ini diperoleh informasi kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Selanjutnya hasil analisis terhadap rasio solvabilitas jangka panjang pada LKPKD dan LKPK tingkat wilayah Provinsi Jawa Barat dapat diuraikan sebagai berikut :</p>



No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
		<p>a. Rasio solvabilitas jangka panjang pada LKPKD Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 <i>Preliminary</i> yaitu sebesar 9.048 persen. Perhitungan tersebut berasal dari Total Aset sebesar Rp328,92 triliun dibagi dengan kewajiban jangka panjang sebesar Rp3,64 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya kemampuan pemerintah konsolidasian di tingkat LKPD dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Persentase yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa pemerintah konsolidasian di tingkat LKPD memiliki Aset yang bernilai 90 kali dari setiap kewajiban jangka panjangnya. Selanjutnya, jika dirinci per pemda, rasio solvabilitas jangka panjang tertinggi tercatat pada Pemerintah Kota Bekasi yakni dengan rasio solvabilitas jangka panjang sebesar 1.225.928 persen. Adapun rasio solvabilitas jangka panjang terendah tercatat pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yakni dengan rasio sebesar 1.388 persen. Adapun terhadap 22 pemda lainnya (Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar) tidak dapat dilakukan perhitungan rasio solvabilitas jangka panjang karena pemda tersebut tidak memiliki kewajiban jangka panjang.</p> <p>b. Rasio solvabilitas jangka panjang pada LKPK Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 <i>Preliminary</i> yakni sebesar 1.309 persen. Perhitungan tersebut berasal dari total Aset Rp934,81 triliun dibagi dengan Kewajiban Jangka Panjang yang keseluruhannya berasal dari pemda sebesar Rp71,41 Triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Konsolidasian di tingkat LKPK memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Hal ini dikarenakan tersedianya aset yang nilainya sebesar 13 kali dari setiap utang jangka panjang pemerintah yang jatuh tempo.</p>

2. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	<p>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengukur tingkat ketergantungan Pemda terhadap pihak eksternal. Dengan demikian, semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan Pemda terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Metode yang digunakan dalam perhitungan rasio ini adalah:</p> $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Termasuk Bantuan Keuangan}}$ <p>Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 39,38 persen (naik 5,78 poin <i>yoy</i>) dan masuk ke dalam kategori cukup. Artinya masih terdapat kontribusi pihak luar yakni sekitar 60,62 persen dalam mendukung penerimaan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah masih rendah sejalan dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Angka capaian rasio keuangan yang hanya 39,38 persen</p>



No	Jenis Analisis	Hasil Analisis																					
		<p>tersebut menunjukkan kondisi bahwa daerah masih dalam kriteria cukup terkait penilaian keuangan daerah. Selanjutnya jika dirinci per Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tertinggi terdapat pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Rasio Kemandirian Keuangan daerah tercatat sebesar 79,55 persen. Adapun Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terendah tercatat pada Pemerintah Kabupaten Kuningan yakni dengan rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 8,32 persen. Jika dirinci menurut kategori kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="493 554 1528 1682"> <thead> <tr> <th data-bbox="493 554 883 632">Kategori</th> <th data-bbox="883 554 1130 632">Jumlah Pemda</th> <th data-bbox="1130 554 1528 632">Sebaran (diurutkan berdasarkan nilai tertinggi ke terendah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="493 632 883 669">Sangat Baik (>50%)</td> <td data-bbox="883 632 1130 669">1 Pemda</td> <td data-bbox="1130 632 1528 669">1. Provinsi Jawa Barat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 669 883 894">Baik (40,01% – 50%)</td> <td data-bbox="883 669 1130 894">6 Pemda</td> <td data-bbox="1130 669 1528 894">1. Kota Depok 2. Kota Bogor 3. Kabupaten Bekasi 4. Kota Bekasi 5. Kota Bandung 6. Kabupaten Bogor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 894 883 1045">Cukup (30,01% – 40%)</td> <td data-bbox="883 894 1130 1045">4 Pemda</td> <td data-bbox="1130 894 1528 1045">1. Kabupaten Karawang 2. Kota Sukabumi 3. Kota Cirebon 4. Kota Cimahi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 1045 883 1157">Sedang (20,01% – 30%)</td> <td data-bbox="883 1045 1130 1157">3 Pemda</td> <td data-bbox="1130 1045 1528 1157">1. Kabupaten Bandung Barat 2. Kabupaten Purwakarta 3. Kabupaten Bandung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 1157 883 1566">Kurang (10,01% – 20%)</td> <td data-bbox="883 1157 1130 1566">11 Pemda</td> <td data-bbox="1130 1157 1528 1566">1. Kabupaten Majalengka 2. Kabupaten Cirebon 3. Kabupaten Sumedang 4. Kota Banjar 5. Kabupaten Pangandaran 6. Kabupaten Indramayu 7. Kota Tasikmalaya 8. Kabupaten Sukabumi 9. Kabupaten Cianjur 10. Kabupaten Subang 11. Kabupaten Garut</td> </tr> <tr> <td data-bbox="493 1566 883 1682">Sangat Kurang (0,00% – 10%)</td> <td data-bbox="883 1566 1130 1682">3 Pemda</td> <td data-bbox="1130 1566 1528 1682">1. Kabupaten Ciamis 2. Kabupaten Tasikmalaya 3. Kabupaten Kuningan</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Jumlah Pemda	Sebaran (diurutkan berdasarkan nilai tertinggi ke terendah)	Sangat Baik (>50%)	1 Pemda	1. Provinsi Jawa Barat	Baik (40,01% – 50%)	6 Pemda	1. Kota Depok 2. Kota Bogor 3. Kabupaten Bekasi 4. Kota Bekasi 5. Kota Bandung 6. Kabupaten Bogor	Cukup (30,01% – 40%)	4 Pemda	1. Kabupaten Karawang 2. Kota Sukabumi 3. Kota Cirebon 4. Kota Cimahi	Sedang (20,01% – 30%)	3 Pemda	1. Kabupaten Bandung Barat 2. Kabupaten Purwakarta 3. Kabupaten Bandung	Kurang (10,01% – 20%)	11 Pemda	1. Kabupaten Majalengka 2. Kabupaten Cirebon 3. Kabupaten Sumedang 4. Kota Banjar 5. Kabupaten Pangandaran 6. Kabupaten Indramayu 7. Kota Tasikmalaya 8. Kabupaten Sukabumi 9. Kabupaten Cianjur 10. Kabupaten Subang 11. Kabupaten Garut	Sangat Kurang (0,00% – 10%)	3 Pemda	1. Kabupaten Ciamis 2. Kabupaten Tasikmalaya 3. Kabupaten Kuningan
Kategori	Jumlah Pemda	Sebaran (diurutkan berdasarkan nilai tertinggi ke terendah)																					
Sangat Baik (>50%)	1 Pemda	1. Provinsi Jawa Barat																					
Baik (40,01% – 50%)	6 Pemda	1. Kota Depok 2. Kota Bogor 3. Kabupaten Bekasi 4. Kota Bekasi 5. Kota Bandung 6. Kabupaten Bogor																					
Cukup (30,01% – 40%)	4 Pemda	1. Kabupaten Karawang 2. Kota Sukabumi 3. Kota Cirebon 4. Kota Cimahi																					
Sedang (20,01% – 30%)	3 Pemda	1. Kabupaten Bandung Barat 2. Kabupaten Purwakarta 3. Kabupaten Bandung																					
Kurang (10,01% – 20%)	11 Pemda	1. Kabupaten Majalengka 2. Kabupaten Cirebon 3. Kabupaten Sumedang 4. Kota Banjar 5. Kabupaten Pangandaran 6. Kabupaten Indramayu 7. Kota Tasikmalaya 8. Kabupaten Sukabumi 9. Kabupaten Cianjur 10. Kabupaten Subang 11. Kabupaten Garut																					
Sangat Kurang (0,00% – 10%)	3 Pemda	1. Kabupaten Ciamis 2. Kabupaten Tasikmalaya 3. Kabupaten Kuningan																					
2	Rasio Solvabilitas Anggaran	<p>Rasio Solvabilitas Anggaran digunakan mengukur kemampuan Pemda untuk menghasilkan pendapatan untuk menutupi belanja pemerintah selama periode anggaran. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik kemampuan Pemda untuk menghasilkan pendapatan. Metode yang digunakan dalam perhitungan rasio ini adalah :</p>																					



No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
		<p style="text-align: center;"><u>Total Pendapatan LRA – DAK LRA Total</u> <u>Belanja – Belanja Modal</u></p> <p>Solvabilitas anggaran Jawa Barat secara keseluruhan bernilai positif, yaitu sebesar 0,95 (naik 0,08 poin yoy) atau <1, yang berarti secara rata-rata pemda tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk mendanai belanjanya. Namun demikian terdapat 8 pemda yang bernilai di atas 1. Pemerintah Kabupaten Majalengka memiliki kemampuan tertinggi dalam menghasilkan pendapatan dengan solvabilitas anggaran sebesar 1,14 dan terendah Pemerintah Kota Tasikmalaya 0,77.</p>
3	Rasio Solvabilitas Layanan	<p>Rasio Solvabilitas Layanan digunakan mengukur kemampuan Pemda dalam menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan untuk publik. Semakin tinggi Rasio Solvabilitas Layanan, maka semakin baik kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada publik. Metode yang digunakan dalam perhitungan rasio ini adalah:</p> <p style="text-align: center;"><u>Total Aset</u> <u>Jumlah Penduduk</u></p> <p>Solvabilitas layanan Jawa Barat secara total senilai 6.657.437 (turun 744.933 yoy). Kemampuan Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyediakan pelayanan terhadap publik memiliki rasio terendah yaitu 2.312.255, dan tertinggi terdapat pada Pemerintah Kota Bandung dengan rasio sebesar 19.893.504. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai satker tidak memiliki penduduk, hanya sebagai wilayah, sehingga solvabilitas layanan tidak dapat diukur.</p>
4	Rasio Solvabilitas Operasional	<p>Rasio Solvabilitas Operasional digunakan mengukur kemampuan Pemda dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran. Semakin tinggi rasio Solvabilitas Operasional, maka semakin baik kemampuan Pemerintah dalam menghasilkan pendapatan. Metode yang digunakan dalam perhitungan rasio ini adalah:</p> <p style="text-align: center;"><u>Total Pendapatan LO – DAK LO</u> <u>Beban Operasi LO</u></p> <p>Rasio Solvabilitas Operasional Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 1,1 (naik 0,75 poin yoy). Rasio ini menunjukkan kondisi bahwa sekitar 1,1 persen Beban Operasional didanai dari Pendapatan Operasional diluar Dana Alokasi Khusus (DAK). Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa Pemerintah Daerah masih memerlukan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menutupi Beban Operasionalnya. Jika dirinci per Pemerintah Daerah, Rasio Solvabilitas Operasional terbesar tercatat pada Pemerintah Kota Bekasi yakni dengan rasio 3,61. Adapun Rasio Solvabilitas Operasional terendah tercatat pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran yakni dengan rasio 0,19.</p>



No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
5	Rasio Fleksibilitas Keuangan	<p>Rasio Fleksibelitas Keuangan digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan Pemerintah untuk menghadapi kondisi peningkatan pendapatan maupun hutang. Semakin tinggi rasio, maka semakin baik fleksibelitas pemerintah dalam menghadapi kondisi peningkatan Pendapatan atau Hutang. Metode yang digunakan dalam perhitungan rasio ini adalah:</p> $\frac{\text{Total Pendapatan LO} - \text{DAK LO} - \text{Pembayaran Pokok Hutang} - \text{Beban Operasional LO}}{\text{Beban Operasi LO} + \text{Pembayaran Pokok Hutang}}$ <p>Fleksibilitas Keuangan Jawa Barat secara keseluruhan menunjukkan nilai 0,09 (naik 0,74 poin yoy), yang artinya belum memiliki fleksibilitas dalam menghadapi kondisi peningkatan pendapatan atau utang. Pemerintah Kota Bekasi memiliki nilai fleksibilitas keuangan tertinggi sebesar 2,61 dan terendah yaitu Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebesar minus 0,82.</p>

B. Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

1. Analisis Keseimbangan Fiskal

No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1	Keseimbangan Operasi Neto	<p>Perhitungan Keseimbangan Operasi Netto (<i>Net Operating Balance / NOB</i>) bertujuan untuk melihat perubahan kekayaan bersih pemerintah yang diakibatkan oleh transaksi selama tahun berjalan. Metode yang digunakan dalam perhitungan Keseimbangan Operasi Netto (<i>Net Operating Balance / NOB</i>) ini adalah :</p> $(\text{Pendapatan GFS dikurangi dengan Beban GFS})$ <p>Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa Nilai Keseimbangan Operasi Netto (<i>Net Operating Balance/NOB</i>) yang ada pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemda Gabungan Kabupaten/Kota Lingkup Jawa Barat dan Pemerintah Umum yakni masing-masing sebesar Rp138.255.324.617.275; Rp2.078.938.448.509; Rp14.058.262.526.514; dan Rp154.392.525.592.298.</p>
2	Keseimbangan Operasi Bruto	<p>Perhitungan Keseimbangan Operasi Bruto (<i>Net Operating Balance/NOB</i>) bertujuan untuk melihat perubahan kekayaan bersih pemerintah yang diakibatkan oleh transaksi selama tahun berjalan dengan mengeluarkan transaksi konsumsi aset tetap. Metode yang digunakan dalam perhitungan Keseimbangan Operasi Bruto (<i>Net Operating Balance/NOB</i>) ini adalah :</p> $[\text{Pendapatan GFS dikurangi (Beban GFS dikurangi Konsumsi Aset Tetap)}]$ <p>Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai Keseimbangan Operasi Bruto (<i>Net Operating Balance/NOB</i>) yang ada pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemda Gabungan Kabupaten/Kota Lingkup Jawa Barat, dan Pemerintah Umum yakni masing-masing sebesar Rp138.255.324.617.275; Rp2.078.938.448.509; Rp14.058.262.526.514; dan Rp154.392.525.592.298.</p>



No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
		Tidak adanya perbedaan antara nilai Keseimbangan Operasi Bruto (<i>Net Operating Balance/NOB</i>) dengan Keseimbangan Operasi Netto (<i>Net Operating Balance/NOB</i>) disebabkan tidak adanya konsumsi aset tetap selama periode berjalan.
3	Pinjaman Neto	<p>Perhitungan terhadap Peminjaman/Pinjaman Neto (<i>Net Lending/Borrowing/NLB</i>) bertujuan untuk melihat seberapa besar sumber daya finansial yang mampu disalurkan ataupun diperoleh dari sektor ekonomi lain ataupun total kebutuhan pembiayaan. Metode yang digunakan dalam perhitungan Peminjaman/Pinjaman Neto (<i>Net Lending/Borrowing/NLB</i>) ini adalah :</p> <p style="text-align: center;"><i>[Pendapatan GFS – (Beban GFS + Investasi Neto Aset Non Keuangan)]</i></p> <p>Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa Nilai Peminjaman/Pinjaman Neto (<i>Net Lending/Borrowing/NLB</i>) yang ada pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemda Gabungan Kabupaten/Kota Lingkup Jawa Barat, dan Pemerintah Umum yakni masing-masing sebesar yakni masing-masing sebesar Rp125.435.011.649.830; Rp469.431.893.863; Rp805.106.345.774; dan Rp126.709.549.889.467.</p>
4	Keseimbangan Operasi Primer	<p>Perhitungan terhadap Keseimbangan Operasi Primer (<i>Primary Operating Balance</i>) bertujuan untuk melihat berapa selisih antara pendapatan dan beban setelah dikurangi beban bunga (<i>Interest Expense</i>). Metode yang digunakan dalam perhitungan Keseimbangan Operasi Primer (<i>Primary Operating Balance</i>) ini adalah :</p> <p style="text-align: center;"><i>(NOB + Beban Bunga)</i></p> <p>Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai Keseimbangan Operasi Primer (<i>Primary Operating Balance</i>) yang ada pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemda Gabungan Kabupaten/Kota Lingkup Jawa Barat dan Pemerintah Umum yakni masing-masing sebesar yakni masing-masing sebesar Rp138.255.324.617.275; Rp2.078.938.448.509; Rp14.105.336.807.339; dan Rp154.439.599.873.123.</p>
5	Keseimbangan Primer	<p>Perhitungan terhadap Keseimbangan Primer (<i>Primary Balance</i>) bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban interest expense tanpa perlu melakukan penambahan kewajiban baru. Metode yang digunakan dalam perhitungan Keseimbangan Primer (<i>Primary Balance</i>) ini adalah :</p> <p style="text-align: center;"><i>(NLB + Beban Bunga)</i></p> <p>Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai Keseimbangan Primer (<i>Primary Balance</i>) yang ada pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemda Gabungan Kabupaten/Kota Lingkup Jawa Barat dan Pemerintah Umum yakni masing-masing sebesar Rp125.435.011.649.830; Rp469.431.893.863; Rp852.180.626.599; dan Rp126.756.624.170.292.</p>

2. Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya

No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1	Pajak Langsung	Perhitungan terhadap Pajak Langsung (<i>Direct Taxes</i>) bertujuan untuk melihat seberapa besar penerimaan pajak yang perhitungannya mempertimbangkan situasi/keadaan/kemampuan masing-masing wajib pajaknya. Metode yang digunakan dalam perhitungan Pajak langsung (<i>Direct Taxes</i>) ini adalah :



No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
		<p><i>Taxes on income, profits, and capital gains (111) + Recurrent taxes on immovable property (1131) + Recurrent taxes on net wealth (1132) + Other recurrent taxes on property (1136)</i></p> <p>Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai Pajak Langsung (<i>Direct Taxes</i>) yang ada pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemda Gabungan Kabupaten/Kota Lingkup Jawa Barat dan Pemerintah Umum yakni masing-masing sebesar Rp116.198.179.540.942; Rp20.482.098.247.591; Rp11.836.801.562.565; dan Rp148.517.079.351.098.</p>
2	Pajak Tidak Langsung	<p>Perhitungan terhadap Pajak Tidak Langsung (<i>Indirect Taxes</i>) bertujuan untuk melihat seberapa besar penerimaan pajak yang perhitungannya tidak mempertimbangkan situasi/keadaan/kemampuan individu masing-masing wajib pajak. Metode yang digunakan dalam perhitungan Pajak Tidak Langsung (<i>Indirect Taxes</i>) ini adalah :</p> <p><i>Taxes on payroll and workforce (112) + Taxes on goods and services (114) + Taxes on international trade and transactions (115) + Other taxes (116)</i></p> <p>Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai Pajak Tidak Langsung (<i>Indirect Taxes</i>) Pemerintahan Umum keseluruhannya berasal dari Pemerintah Pusat yakni sebesar Rp2.161.097.198.510.</p>
3	Pajak Modal	<p>Perhitungan terhadap Pajak Modal (<i>Capital Taxes</i>) bertujuan untuk melihat seberapa besar penerimaan pajak yang dibebankan secara tidak berkala dan tidak sering atas nilai aset atau kekayaan neto unit institusi atau nilai aset yang ditransfer antar unit institusi sebagai warisan, hadiah dan transfer lain. Metode yang digunakan dalam perhitungan Pajak Modal (<i>Capital Taxes</i>) ini adalah :</p> <p><i>Estate, inheritance, and gift taxes (1133) + Other nonrecurrent taxes on property (1135)</i></p> <p>Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai Pajak Modal (<i>Capital Taxes</i>) Pemerintah Umum keseluruhannya berasal dari Pemda gabungan Kabupaten dan Kota Lingkup Jawa Barat yakni sebesar Rp5.533.926.338.821,-.</p>
4	Belanja Konsumsi Final Pemerintah	<p>Perhitungan terhadap Belanja Konsumsi Final Pemerintah (<i>Government Final Consumption Expenditure</i>) bertujuan untuk melihat seberapa besar Pengeluaran pemerintah yang terkait dengan Kompensasi Pegawai, Penggunaan Barang dan jasa, Konsumsi Aset Tetap, Pembelian Barang/Jasa untuk transfer langsung ke rumah tangga setelah dikurangi penjualan atas Barang dan Jasa. Metode yang digunakan dalam perhitungan Belanja Konsumsi Final Pemerintah (<i>Government Final Consumption Expenditure</i>) ini adalah :</p> <p><i>Compensation of employees (21) + Use of goods and services (22) + Consumption of fixed capital (23) + Miscellaneous other expense (282) + Sales of goods and services (142)</i></p> <p>Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai Belanja Konsumsi Final Pemerintah (<i>Government Final Consumption Expenditure</i>) yang ada pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemda Gabungan Kabupaten dan Kota Lingkup Jawa Barat dan Pemerintah Umum yakni masing-masing sebesar Rp32.194.983.816.761; Rp12.907.655.771.294; Rp60.987.283.496.559; dan Rp106.089.923.084.614.</p>



No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
5	Tabungan Bruto	<p>Perhitungan terhadap Tabungan Bruto (<i>Gross Saving</i>) bertujuan untuk melihat keseimbangan operasi bruto setelah dikurangi piutang transfer modal neto, termasuk hibah modal neto dan pajak modal atau peminjaman neto/pinjaman neto tanpa investasi bruto aset non keuangan dan piutang transfer modal neto. Metode yang digunakan dalam perhitungan Belanja Tabungan Bruto (<i>Gross Saving</i>) ini adalah :</p> <p style="text-align: center;"><i>GOB – Net Capital Transfer</i></p> <p>Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai Tabungan Bruto (<i>Gross Saving</i>) yang ada pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemda Gabungan Kabupaten dan Kota Lingkup Jawa Barat dan Pemerintah Umum yakni masing-masing sebesar Rp141.650.817.999.106; Rp2.078.938.448.509; Rp 8.524.336.187.693; dan Rp152.254.092.635.308.</p>

3. Analisis Indikator Pembiayaan

No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1	Total Pembiayaan	<p>Perhitungan terhadap Total Pembiayaan (<i>Total Financing</i>) bertujuan untuk melihat seberapa besar nilai transaksi aset keuangan dikurangi transaksi kewajiban. Metode yang digunakan dalam perhitungan Total Pembiayaan (<i>Total Financing</i>) ini adalah :</p> <p style="text-align: center;"><i>Transaction in Financial Assets (32) - Transaction in liabilities (33)</i></p> <p>Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai Total Pembiayaan (<i>Total Financing</i>) yang ada pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemda Gabungan Kabupaten dan Kota Lingkup Jawa Barat dan Pemerintah Umum yakni masing-masing sebesar Rp125.435.011.649.830; Rp469.431.893.863; Rp805.106.345.774; dan Rp54.037.801.618.473.</p>
2	Pembiayaan Dalam Negeri	<p>Perhitungan terhadap Pembiayaan Dalam Negeri (<i>Domestic Financing</i>) bertujuan untuk melihat seberapa besar nilai transaksi aset keuangan dikurangi transaksi kewajiban yang dilakukan terhadap debitur/kreditur dalam negeri. Metode yang digunakan dalam perhitungan Pembiayaan Dalam Negeri (<i>Domestic Financing</i>) ini adalah :</p> <p style="text-align: center;"><i>Transaction in financial assets with resident institutional units (321) - Transaction in liabilities with resident institutional units (331)</i></p> <p>Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai Pembiayaan Dalam Negeri (<i>Domestic Financing</i>) yang ada pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemda Gabungan Kabupaten dan Kota Lingkup Jawa Barat dan Pemerintah Umum yakni masing-masing sebesar Rp125.435.011.649.830; Rp469.431.893.863; Rp805.106.345.774; dan Rp54.037.801.618.473. Tidak adanya perbedaan antara nilai Pembiayaan Dalam Negeri (<i>Domestic Financing</i>) dengan Total Pembiayaan (<i>Total Financing</i>) disebabkan seluruh transaksi terkait pembiayaan berasal dari dalam negeri.</p>
3	Pembiayaan Luar Negeri	<p>Perhitungan terhadap Pembiayaan Luar Negeri (<i>Foreign Financing</i>) bertujuan untuk melihat seberapa besar nilai transaksi aset keuangan dikurangi transaksi kewajiban yang dilakukan terhadap debitur/kreditur dari luar negeri. Metode yang digunakan dalam perhitungan Pembiayaan Luar Negeri (<i>Foreign Financing</i>) ini adalah :</p> <p style="text-align: center;"><i>Transaction in financial assets with non resident institutional units (322) - Transaction in liabilities with non resident institutional units (332)</i></p>



No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
		Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai Pembiayaan Luar Negeri (<i>Foreign Financing</i>) yang ada pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemda Gabungan Kabupaten dan Kota Lingkup Jawa Barat dan Pemerintah Umum keseluruhannya tercatat sebesar Rp0,-. Nihilnya perhitungan Pembiayaan Luar Negeri (<i>Foreign Financing</i>) disebabkan karena tidak adanya transaksi pembiayaan yang berasal dari luar negeri.
4	Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri	<p>Perhitungan terhadap Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri (<i>Domestic Bank Financing</i>) bertujuan untuk melihat seberapa besar nilai transaksi aset keuangan dikurangi transaksi kewajiban dengan bank sentral dan korporasi penyimpanan uang residen yang berasal dari bank sentral. Metode yang digunakan dalam perhitungan Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri (<i>Domestic Bank Financing</i>) ini adalah :</p> <p style="text-align: center;"><i>Transaction in financial assets with central bank + Transaction in financial assets with other depository corporation - Transaction in liabilities with central bank - Transactions in liabilities with other depository corporations</i></p> <p>Saat ini hasil perhitungan nilai Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri (<i>Domestic Bank Financing</i>) yang ada pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemda Gabungan Kabupaten dan Kota Lingkup Jawa Barat dan Pemerintah Umum belum teridentifikasi dikarenakan keterbatasan informasi pada Laporan Keuangan.</p>
5	Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri	<p>Perhitungan terhadap Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri (<i>Domestic Non Bank Financing</i>) bertujuan untuk melihat seberapa besar nilai transaksi aset keuangan dikurangi transaksi kewajiban selain dengan bank sentral dan korporasi penyimpanan uang residen selain bank sentral. Metode yang digunakan dalam perhitungan Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri (<i>Domestic Non Bank Financing</i>) ini adalah :</p> <p style="text-align: center;"><i>Transaksi Aset Finansial dengan pihak selain bank sentral dan perbankan - transaksi liabilitas dengan pihak selain bank sentral dan perbankan</i></p> <p>Saat ini hasil perhitungan Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri (<i>Domestic Non Bank Financing</i>) yang ada pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemda Gabungan Kabupaten dan Kota Lingkup Jawa Barat dan Pemerintah Umum belum teridentifikasi dikarenakan keterbatasan informasi pada Laporan Keuangan.</p>

4. Analisis Indikator Kekayaan dan Utang

No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1	Utang Bruto	<p>Perhitungan Indikator Kekayaan dan Utang menggunakan metode analisis Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>) bertujuan untuk melihat bagaimana posisi klaim keuangan yang membutuhkan pembayaran bunga dan pokok oleh debitur kepada kreditur pada tanggal tertentu di masa depan termasuk semua kewajiban dalam instrumen utang (total kewajiban kecuali saham dan ekuitas lainnya, derivatif keuangan dan opsi saham pegawai). Metode yang digunakan dalam perhitungan Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>) ini adalah :</p> <p style="text-align: center;"><i>Liabilities (63) – Equity and investment fund shares (6305) – Financial derivatives and employee stock options (6307)</i></p> <p>Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>) yang ada pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemda Gabungan Kabupaten dan</p>



No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
		Kota Lingkup Jawa Barat dan Pemerintah Umum masing-masing sebesar Rp69.327.905.890.669; Rp3.864.475.707.633; Rp3.172.735.858.460; dan Rp76.365.117.456.762.
2	Utang Neto	<p>Perhitungan terhadap Utang Neto (<i>Net Debt</i>) bertujuan untuk melihat bagaimana posisi klaim keuangan yang membutuhkan pembayaran bunga dan pokok oleh debitur kepada kreditur pada tanggal tertentu di masa depan termasuk semua kewajiban dalam instrumen utang (total kewajiban kecuali saham dan ekuitas lainnya, derivatif keuangan dan opsi saham pegawai) setelah dikurangi posisi aset keuangan terkait instrumen utang, termasuk semua aset keuangan/kewajiban dalam instrumen utang (aset keuangan/kewajiban tanpa saham dan ekuitas lainnya, derivatif keuangan dan opsi saham pegawai). Metode yang digunakan dalam perhitungan Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>) ini adalah :</p> <p style="text-align: center;"><i>Liabilities (63) – Equity and investment fund shares (6305) – Financial derivatives and employee stock options (6307) – Monetary gold and SDRs (6201)</i></p> <p>Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa Utang Neto (<i>Net Debt</i>) yang ada pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemda Gabungan Kabupaten dan Kota Lingkup Jawa Barat dan Pemerintah Umum masing-masing sebesar Rp69.327.905.890.669; Rp3.864.475.707.633; Rp3.172.735.858.460; dan Rp76.365.117.456.762.</p>

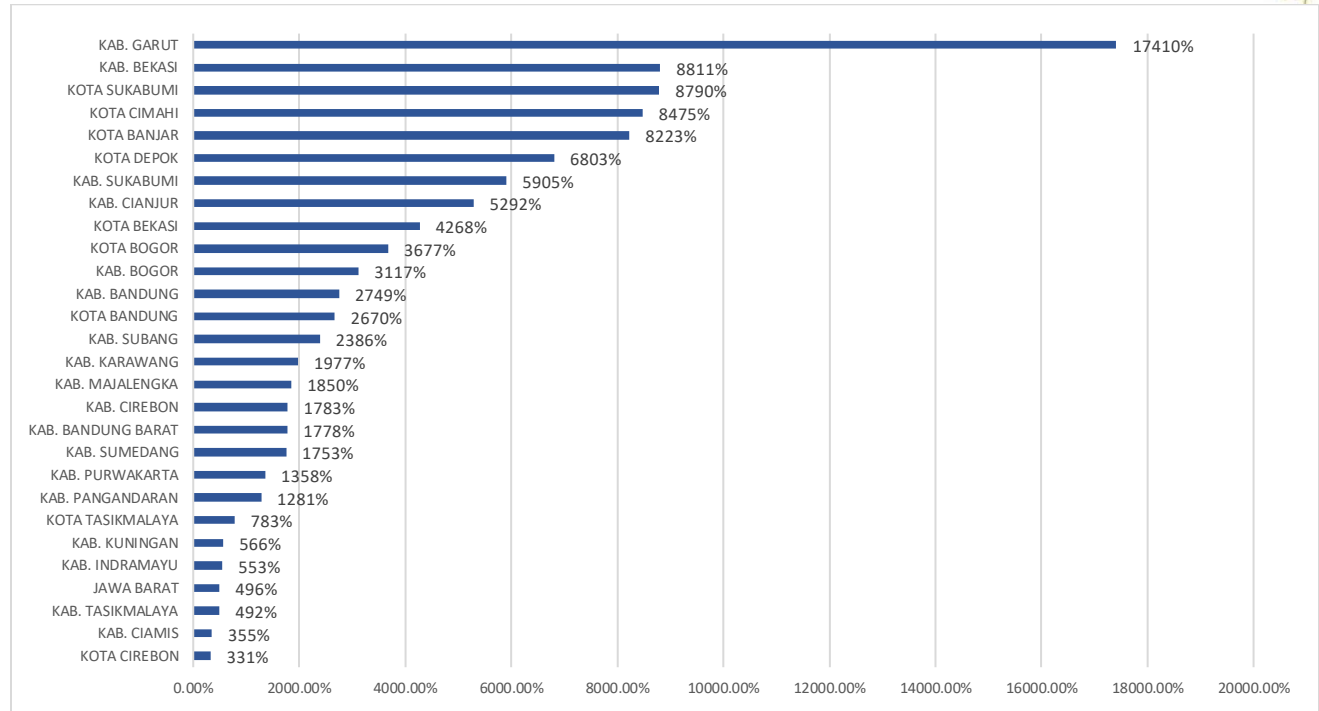
C. Lampiran

1. Perhitungan Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah

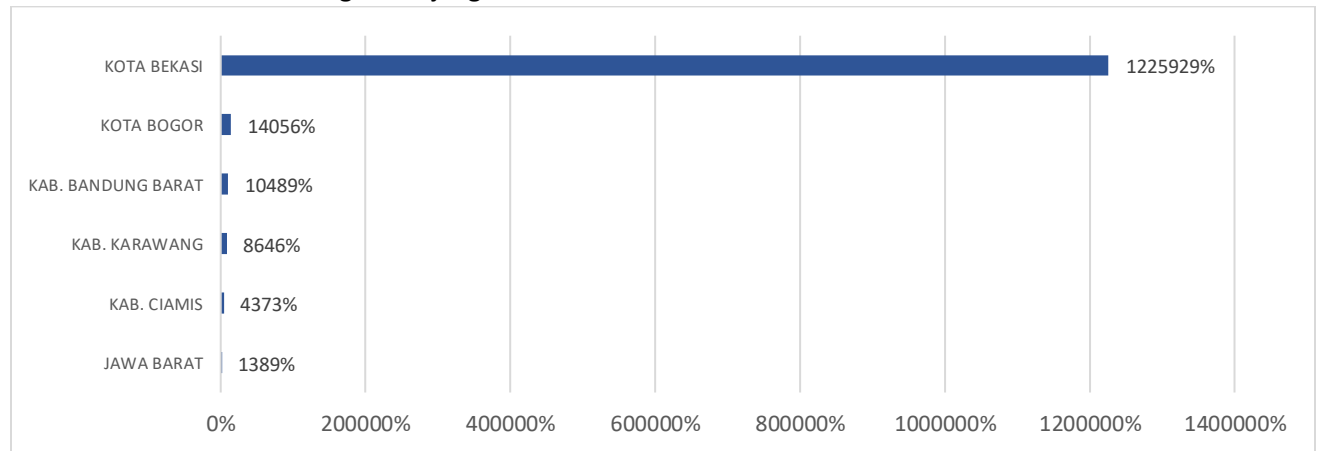
- Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

No	Jenis Laporan	Rasio Solvabilitas Jangka Pendek		Rasio Solvabilitas Jangka Panjang	
1	LKPK-TW Provinsi Jawa Barat	Rp94.107.435.065.405	= 1900,51%	Rp934.812.565.523.233	= 1309,02%
		Rp4.951.700.643.238		Rp71.413.416.813.524	
2	LKPK-TW Provinsi Jawa Barat	Rp 65.704.225.902.960	= 1956,57%	Rp 328.916.185.904.439	= 9048,37%
		Rp 3.358.139.924.623		Rp 3.635.088.886.004	

Grafik Rasio Solvabilitas Jangka Pendek Per Pemda



Grafik Rasio Solvabilitas Jangka Panjang Per Pemda



• Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

No.	Prov/Kab/Kota	Rasio				
		Kemandirian Daerah	Solvabilitas Anggaran	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Operasional	Fleksibilitas Keuangan
1	Prov. Jawa Barat	79,55%	0,89	-	1,57	0,55
2	Kab. Bogor	40,70%	0,99	5.827.862,54	1,98	0,98
3	Kab. Sukabumi	16,83%	0,90	2.802.066,66	0,57	-0,43
4	Kab. Cianjur	15,29%	0,93	4.865.691,34	0,42	-0,58
5	Kab. Bekasi	44,71%	0,96	5.241.027,39	2,61	1,61
6	Kab. Karawang	33,87%	1,08	4.095.287,74	1,30	0,30



No.	Prov/Kab/Kota	Rasio				
		Kemandirian Daerah	Solvabilitas Anggaran	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Operasional	Fleksibilitas Keuangan
7	Kab. Purwakarta	22,72%	0,93	4.022.176,43	0,60	-0,40
8	Kab. Subang	15,03%	0,85	4.155.809,60	0,61	-0,39
9	Kab. Bandung	20,63%	0,98	3.927.579,37	1,70	0,70
10	Kab. Sumedang	18,63%	0,92	4.886.464,01	0,60	-0,40
11	Kab. Garut	10,08%	0,97	2.312.254,75	1,57	0,57
12	Kab. Tasikmalaya	9,47%	0,87	2.436.082,09	0,80	-0,20
13	Kab. Ciamis	9,57%	0,92	3.529.095,44	1,10	0,07
14	Kab. Cirebon	18,80%	0,85	2.497.355,70	1,33	0,33
15	Kab. Kuningan	8,32%	0,87	3.843.801,68	0,55	-0,46
16	Kab. Indramayu	17,31%	0,87	3.294.367,91	0,96	-0,04
17	Kab. Majalengka	18,92%	1,14	4.900.201,39	1,30	0,30
18	Kab. Bandung Barat	23,39%	1,09	4.297.189,69	0,39	-0,62
19	Kab. Pangandaran	18,00%	1,10	18.242.583,62	0,19	-0,82
20	Kota Bandung	42,06%	1,04	19.893.504,01	2,23	1,23
21	Kota Bogor	45,23%	1,05	10.947.364,93	1,98	0,97
22	Kota Sukabumi	32,35%	0,95	12.867.824,91	0,39	-0,61
23	Kota Cirebon	31,97%	0,95	11.632.331,03	1,00	-0,02
24	Kota Bekasi	44,61%	1,06	7.376.900,94	3,61	2,61
25	Kota Depok	48,47%	1,13	9.189.430,52	2,22	1,22
26	Kota Tasikmalaya	17,03%	0,77	6.169.516,79	2,07	1,07
27	Kota Cimahi	30,34%	0,89	7.225.351,69	0,67	-0,33
28	Kota Banjar	18,40%	0,90	10.708.751,94	0,60	-0,40
Nilai Konsolidasi		39,38%	0,95	6.657.436,70	1,10	0,09

2. Perhitungan Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

- Analisis Keseimbangan Fiskal

No	Jenis Tingkatan Pemerintahan	Keseimbangan Operasi Neto	Keseimbangan Operasi Bruto	Pinjaman Neto	Keseimbangan Operasi Primer	Keseimbangan Primer
1	Pemerintah Pusat	138.255.324.617.275	138.255.324.617.275	125.435.011.649.830	138.255.324.617.275	125.435.011.649.830
2	Pemerintah Provinsi	2.078.938.448.509	2.078.938.448.509	469.431.893.863	2.078.938.448.509	469.431.893.863
3	Pemerintah Kab/Kota	14.058.262.526.514	14.058.262.526.514	805.106.345.774	14.105.336.807.339	852.180.626.599
4	Pemerintah Umum	154.392.525.592.298	154.392.525.592.298	126.709.549.889.467	154.439.599.873.123	126.756.624.170.292



• Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya

No	Jenis Tingkatan Pemerintahan	Pajak Langsung	Pajak Tidak Langsung	Pajak Modal	Belanja Konsumsi Final Pemerintah	Tabungan Bruto
1	Pemerintah Pusat	116.198.179.540.942	2.161.097.198.510	-	32.194.983.816.761	141.650.817.999.106
2	Pemerintah Provinsi	20.482.098.247.591	-	-	12.907.655.771.294	2.078.938.448.509
3	Pemerintah Kab/Kota	11.836.801.562.565	-	5.533.926.338.821	60.987.283.496.559	8.524.336.187.693
4	Pemerintah Umum	148.517.079.351.098	2.161.097.198.510	5.533.926.338.821	106.089.923.084.614	152.254.092.635.308

• Analisis Indikator Pembiayaan

No	Jenis Tingkatan Pemerintahan	Total Pembiayaan	Pembiayaan Dalam Negeri	Pembiayaan Luar Negeri	Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri	Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri
1	Pemerintah Pusat	125.435.011.649.830	125.435.011.649.830	-	-	-
2	Pemerintah Provinsi	469.431.893.863	469.431.893.863	-	-	-
3	Pemerintah Kab/Kota	805.106.345.774	805.106.345.774	-	-	-
4	Pemerintah Umum	54.037.801.618.473	54.037.801.618.473	-	-	-

• Analisis Indikator Kekayaan dan Utang

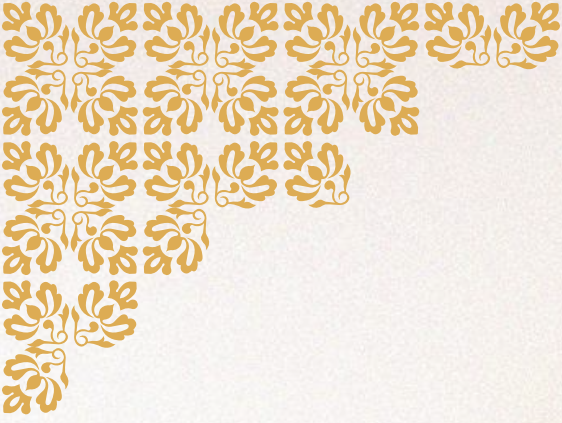
No	Jenis Tingkatan Pemerintahan	Utang Bruto	Utang Neto
1	Pemerintah Pusat	69.327.905.890.669	69.327.905.890.669
2	Pemerintah Provinsi	3.864.475.707.633	3.864.475.707.633
3	Pemerintah Kab/Kota	3.172.735.858.460	3.172.735.858.460
4	Pemerintah Umum	76.365.117.456.762	76.365.117.456.762

Dibuat di Bandung
pada tanggal 27 Februari 2024,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat



Ditandatangani secara elektronik
Heru Pudyo Nugroho





KANTOR WILAYAH DJPB

Provinsi Jawa Barat

Gedung Dwiwarna Jl. Diponegoro No. 59, Bandung - 40123

Telp. (022) 7207046, Faks. (022) 7207046

website : <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/id>

